



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022

Maret, 2023

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tanjungpinang, 08 Maret 2023

**INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



ST. IRMENDAS, S.E., Ak.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650726 199403 1 001



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan laporan atas capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama RPJMD Tahun 2021 - 2026. Laporan kinerja ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan.

Laporan kinerja disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara optimal.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya mengumpulkan berbagai data kinerja untuk disajikan dalam laporan kinerja ini agar dapat menguraikan informasi kinerja yang objektif dan dapat mendukung perencanaan pembangunan di masa mendatang.



Akhirnya, saya berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tanjungpinang, Maret 2023

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD





DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	x
Daftar Gambar	xi
Ikhtisar Eksekutif	xii

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	1
	1.3 Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2
	1.3.1 Letak dan Kondisi Geografis	3
	1.4 Gambaran Umum Demografi	6
	1.4.1 Jumlah Penduduk	6
	1.4.2 Pertumbuhan Ekonomi	9
	1.4.3 PDRB Per Kapita	10
	1.4.4 Persentase Penduduk Miskin	11
	1.5 Tugas dan Struktur Organisasi	12
	Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	12
	1.6 Kondisi Pegawai	14
	1.7 Sistematika Penulisan	15

BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
	A Rencana Strategis	17
	Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau	17
	Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	18
	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau	19
	B Perjanjian Kinerja	25

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	27
	III.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	27
	III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	30
	1 Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	31
	2 Menurunnya Angka Kemiskinan	62
	3 Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	92
	4 Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif ...	105
	5 Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berkarakter	120
	6 Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	133



	7	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	146
	8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	159
	9	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	169
	10	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	183
	11	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir.....	192
	12	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya dan Harmoni Masyarakat	201
BAB IV	PENUTUP		217
	1	Aspek Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat	218
	2	Aspek Pelayanan Umum	218
	3	Aspek Daya Saing Daerah	219

Lampiran :

- I Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022
- II Daftar Penghargaan yang diterima Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022





DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Riau	3
Tabel 1.2	Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	6
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	7
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018- 2022	8
Tabel 1.5	Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	10
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	26
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	29
Tabel 3.2	PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan IV-2021, Triwulan III-2022 dan Triwulan IV-2022 (milyar rupiah)	33
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	34
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Indikator Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021-2022	35
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Target RPJMD Tahun 2022	36
Tabel 3.6	Tingkat Efisiensi dari Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran yang dipergunakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022	43
Tabel 3.7	PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan IV-2021, Triwulan III-2022 dan Triwulan IV-2022 (milyar rupiah)	44
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Indikator Pendapatan Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	45
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Indikator Pendapatan Per Kapita Tahun 2021-2022	46
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Pendapatan Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau dengan Target RPJMD Tahun 2022	46
Tabel 3.11	Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan (ribu rupiah) 2019-2021	47
Tabel 3.12	Perbandingan PDRB Per Kapita Kepulauan Riau dan Nasional 2020-2022	47



Tabel 3.13	Tingkat Efisiensi dari Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran yang dipergunakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022	52
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Indikator Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	53
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Gini Tahun 2021-2022	54
Tabel 3.16	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Target RPJMD Tahun 2022	55
Tabel 3.17	Tingkat Efisiensi dari Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran yang dipergunakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022	61
Tabel 3.18	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2022	62
Tabel 3.19	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2022	65
Tabel 3.20	Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	67
Tabel 3.21	Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka pada Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2022	67
Tabel 3.22	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target RPJMD	68
Tabel 3.23	TPT Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan TPT se-Indonesia Tahun 2022	69
Tabel 3.24	Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Berdasarkan Tahun di Provinsi Kepulauan Riau, Agustus 2022	71
Tabel 3.25	Karakteristik Penduduk Bekerja Provinsi Kepulauan Riau Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020-2022	73
Tabel 3.26	Karakteristik Penduduk Bekerja Pekerjaan Penuh/Tidak Penuh Tahun 2020-2022	74
Tabel 3.27	Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pendukung Target Indikator Angka Pengangguran Tahun 2022	75
Tabel 3.28	Evaluasi Capaian Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022	77
Tabel 3.29	Program /Kegiatan Pendukung Capaian Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022	78
Tabel 3.30	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin dari Tahun 2021-2022	80
Tabel 3.31	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022 dengan Target RPJMD	88
Tabel 3.32	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kategori Perkotaan dan Perdesaan September 2021-September 2022	88
Tabel 3.33	Persentase Penduduk Miskin Per Kabupaten/Kota Tahun 2022	89
Tabel 3.34	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin se-Indonesia Semester II Tahun 2022	90
Tabel 3.35	Kinerja Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	93



Tabel 3.36	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	94
Tabel 3.37	Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2022	96
Tabel 3.38	Evaluasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2022.....	98
Tabel 3.39	Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	100
Tabel 3.40	Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	104
Tabel 3.41	Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Antisipatif	106
Tabel 3.42	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan kondisi akhir RPJMD (2026)	106
Tabel 3.43	Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	114
Tabel 3.44	Capaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	121
Tabel 3.45	Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021-2022	121
Tabel 3.46	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau Menurut Komponen 2012-2022	123
Tabel 3.47	Capaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	125
Tabel 3.48	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2022.....	126
Tabel 3.49	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Nasional dan Kepulauan Riau Tahun 2022	127
Tabel 3.50	Realisasi Belanja Berdasarkan Program Tahun 2022	132
Tabel 3.51	Capaian Sasaran Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan	134
Tabel 3.52	Perbandingan Realisasi Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2020, 2021 dan 2022	135
Tabel 3.53	Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Menurut Kabupaten/Kota	136
Tabel 3.54	Perbandingan Realisasi Angka Partisipasi Sekolah Nasional	137
Tabel 3.55	Realisasi Belanja Berdasarkan Program Tahun 2022	139
Tabel 3.56	Jumlah P3K di Provinsi Kepulauan Riau	139
Tabel 3.57	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2022	147
Tabel 3.58	Evaluasi Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2017-2022	147
Tabel 3.59	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022	148



Tabel 3.60	Angka Harapan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau	149
Tabel 3.61	Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau	149
Tabel 3.62	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) di Provinsi Kepulauan Riau	150
Tabel 3.63	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2022	150
Tabel 3.64	Capaian Kinerja IPG Berdasarkan Provinsi se Indonesia Tahun 2022	151
Tabel 3.65	Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	160
Tabel 3.66	Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2022	161
Tabel 3.67	Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	161
Tabel 3.68	Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	161
Tabel 3.69	Prevalensi Stunting se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2022 .	162
Tabel 3.70	Persentase Stunting di Indonesia Tahun 2021-2022	163
Tabel 3.71	Tingkat Efisiensi dari Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran yang di pergunakan untruk Pencapaian Sasaran Tahun 2022	164
Tabel 3.72	Tingkat Efisiensi dari Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran yang di pergunakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021-2022 .	164
Tabel 3.73	Realisasi Keuangan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 yang Menunjang Persentase Balita Pendek (Stunting) pada Anak Balita Proivinsi Kepulauan Riau	166
Tabel 3.74	Capaian Kinerja Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Rasio Elektrifikasi Tahun 2022	169
Tabel 3.75	Data Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau	171
Tabel 3.76	Realisasi dan Capaian Kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2022	172
Tabel 3.77	Evaluasi Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	173
Tabel 3.78	Capaian Kesesuaian Standar Teknis dan Kelaikan Fungsi Tahun 2022	176
Tabel 3.79	Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh Tahun 2022	177
Tabel 3.80	Target dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja	178
Tabel 3.81	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022	178
Tabel 3.82	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022	179
Tabel 3.83	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh pada Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022	179
Tabel 3.84	Perbandingan Realisasi Kinerja Provinsi dan Target Nasional Tahun	



Tabel 3.85	2022 Program/Kegiatan Penunjang Capaian Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	180 181
Tabel 3.86	Data Trayek angkutan Darat Dalam Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	184
Tabel 3.87	Data Lintasan Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	184
Tabel 3.88	Tingkat Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2022	187
Tabel 3.89	Data Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2021	187
Tabel 3.90	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Konektivitas Tahun 2021 dan Tahun 2022	188
Tabel 3.91	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Konektivitas Tingkat Nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	188
Tabel 3.92	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD	189
Tabel 3.93	Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Pendukung	190
Tabel 3.94	Capaian Kinerja Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir Tahun 2022 (sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2022)	193
Tabel 3.95	Perhitungan Capaian Kinerja Pesentase Jalan Kondisi Baik	193
Tabel 3.96	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022	194
Tabel 3.97	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Akhir RPJMD 2026	194
Tabel 3.98	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017-2022	194
Tabel 3.99	Perbandingan Kondisi Jalan Baik Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	195
Tabel 3.100	Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2022	198
Tabel 3.101	Perbandingan Persentase Penambahan Anggaran Pendukung Kinerja Panjang Jalan Berkondisi Baik pada Tahun 2021-2022	200
Tabel 3.102	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah	203
Tabel 3.103	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan	203
Tabel 3.104	Target Belanja Dinas Kebudayaan APBD Perubahan Tahun 2022 ...	213
Tabel 3.105	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	213
Tabel 3.106	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	214



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
--------	---------

Grafik 1.1	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 (BPMD Disduk Capil)	7
Grafik 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 (BPS Provinsi Kepri Tahun 2022)	8
Grafik 1.3	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2022 (%)	9
Grafik 1.4	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	10
Grafik 1.5	Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau	11
Grafik 1.6	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	11
Grafik 1.7	Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022	15
Grafik 1.8	Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jabatan Tahun 2022	15
Grafik 3.1	Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2011-2022 ...	63
Grafik 3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2022	66
Grafik 3.3	Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkatan Pendidikan Tahun 2019-2022	72
Grafik 3.4	Kinerja Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	93
Grafik 3.5	Pencapaian Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau	99
Grafik 3.6	Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS)	136
Grafik 3.7	Penyebaran P3K di Provinsi Kepulauan Riau	140
Grafik 3.8	Kondisi Rasio Elektrifikasi Tahun 2022	170
Grafik 3.9	Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau	171
Grafik 3.10	Pencapaian Realisasi Kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2018-2022	173



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1.1	Peta Provinsi Kepulauan Riau	4
Gambar 1.2	Batas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	5
Gambar 3.1	Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan IV-201-2022 (c-to-c) (persen)	35
Gambar 3.2	Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan IV-2022 (c-to-c) (persen)	36
Gambar 3.3	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional 2017-2022	37
Gambar 3.4	Rasio Indeks Gini	54
Gambar 3.5	Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2022 September	56
Gambar 3.6	Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan dengan Provinsi di wilayah Sumatera .	56
Gambar 3.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2019-Agustus 2022	65
Gambar 3.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau 2012-2022	123
Gambar 3.9	Umur Harapan Hidup Saat (UHH) Kepulauan Riau	124
Gambar 3.10	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kepulauan Riau Tahun 2012-2022	124
Gambar 3.11	Pengeluaran Riil Per Kapita yang disesuaikan (PPP) Kepulauan Riau, 2012-2022	125
Gambar 3.12	Peningkatan Jalan Trans Batubi-Kelarik (Natuna) (DAK)	196
Gambar 3.13	Peningkatan jalan Kerandin-Belungkur Kabupaten Lingga (DAK)	197
Gambar 3.14	Pemeliharaan Berkala Jalan Toapaya Km. 46 Kabupaten Bintan (DAK)...	197



IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja berdasarkan Visi dan Misi Gubernur.

Adapun Hasil evaluasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 bertujuan sebagai *feedback* bagi kepala daerah dan juga dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun ke-1 (satu) dan merupakan tahun pertama dari pelaksanaan dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran mengalami kontraksi dalam hal mewujudkan visi, misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

Kontraksi tersebut dikarenakan terdampak oleh pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 dan 2021. Pandemi covid-19 ini merupakan suatu bencana global yang berdampak terhadap seluruh dunia termasuk Indonesia dan Provinsi Kepulauan Riau, antara lain pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pariwisata, transportasi dan beberapa sektor jasa lainnya. Secara garis besar pandemi covid-19 ini akan mempengaruhi sasaran strategis pembangunan dan indikator kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2022 telah ditetapkan 12 sasaran strategis pembangunan dengan 16 indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja tersebut setelah dilakukan evaluasi diperoleh hasil sebagai berikut :

1. 10 (sepuluh) indikator kinerja dengan capaian kinerja dikategorikan sangat baik
2. 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja dikategorikan baik

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan adanya dampak pandemi covid-19 ini membuat beberapa realisasi mengalami penurunan, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik. Pentingnya koordinasi dan sinergi antar OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten/kota dan pihak luar pemerintah dalam mencapai sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung-jawaban atas kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Provinsi Kepulauan Riau. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis

instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.3 Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 pada tanggal 24 September 2002, Secara de jure Provinsi Kepulauan Riau berdiri tahun 2002, akan tetapi secara de facto penyelenggaraan pemerintahannya baru dimulai tanggal 1 Juli 2004. Kemudian



Keterangan: Kantor Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau

dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 40P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2021-2024, dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2021-2024 merupakan periode pertama Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2021-2024.

Secara Administratif Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2 (dua) kota yaitu Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Kota Tanjungpinang adalah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, serta memiliki 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Letak astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada tabel berikut :

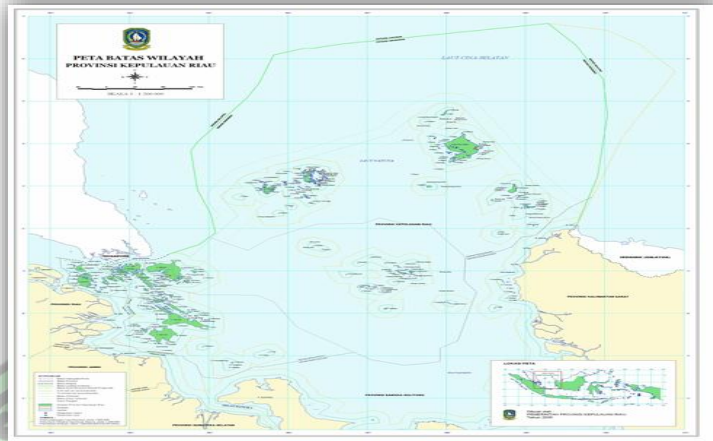
Tabel 1.1
Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab / Kota	Ibukota	Luas Wilayah (Km ²)			Jumlah Kel /Desa
			Daratan	% Daratan	Jumlah Kec	
1	Bintan	Bintan Buyu	1.318,21	16,07	10	51
2	Karimun	Tanjung Balai	912,75	11,13	14	71
3	Natuna	Ranai	2.009,04	24,50	15	77
4	Lingga	Daik	2.266,77	27,64	13	82
5	Kepulauan Anambas	Tarempa	590,14	7,20	10	54
6	Kota Batam	Batam	960,25	11,71	12	64
7	Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang	144,56	1,76	4	18
Provinsi Kepulauan Riau			8.201,72	100	78	417

1.3.1 Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang daerahnya sebagian besar adalah daerah kepulauan. Sebagai daerah kepulauan Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas 425.214,69 km², dengan luas lautan 417.012,97 km² (98,07 persen) dan luas daratannya sebesar 8.201,72 km² (1,93 persen). Luas daratan sekitar 0,20 % dari luas Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau terletak pada posisi 00°29' Lintang Selatan dan 04°40' Lintang Utara serta antara 103°22' dan 109°40' Bujur Timur.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar dari Selat Malaka sampai Laut Cina Selatan. Letak dan kondisi geografis ini memiliki keuntungan tersendiri bagi Provinsi Kepulauan Riau, hal ini karena Provinsi Kepulauan Riau berada di jalur emas perdagangan di bagian barat Indonesia yang dapat menjadi potensi untuk mendatangkan pendapatan bagi daerah maupun devisa bagi Negara Indonesia. Berikut ini peta Provinsi Kepulauan Riau:



Gambar 1.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau-pulau besar maupun kecil yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota serta dikelilingi oleh lautan dan memiliki pulau terluar yang berbatasan dengan Negara tetangga, hal ini yang membuat Provinsi Kepulauan Riau harus memperkuat diplomatik wilayah, sehingga wilayah Indonesia pada umumnya dan Provinsi Kepulauan Riau khususnya menjadi satu kesatuan yang utuh yang tak terpisahkan. Bagi Penduduk Provinsi Kepulauan Riau laut merupakan potensi, jumlah lautnya yang luas, pantainya yang indah serta hasil lautnya yang melimpah sehingga membuat Provinsi Kepulauan Riau menjadi sasaran Negara luar/tetangga untuk berinvestasi, terutama dibidang perhotelan/resort. Luasnya wilayah laut lebih besar dibandingkan daratan, sehingga Provinsi Kepulauan Riau harus mengembangkan maritim menjadi salah satu potensi untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, Singapura, Brunei, Vietnam dan Kamboja. Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ). Selain itu juga memiliki ribuan pulau dengan keindahan alami yang menawan dan eksotis, serta Kekayaan sumber daya alam (perikanan, kelautan, energi, mineral) yang melimpah. Tentunya hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pengelolaannya.

Berikut ini Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

Gambar 1.2
Batas Wilayah
Provinsi Kepulauan Riau

1) Sebelah Utara : Laut Cina Selatan

2) Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat

3) Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi

4) Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau

Sumber : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002

1) Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja

2) Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat

4) Sebelah Selatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jambi

5) Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal klarifikasi data geografis Kabupaten/Kota dengan mengambil data dari interpretasi peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000. Setelah terbitnya Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2002, Markas Besar TNI Angkatan Laut Dinas Hidro Oseanografi mengeluarkan rekapitulasi data jumlah pulau dimana Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.408 pulau dengan jumlah yang bernama 1.350 pulau dan yang belum bernama sebanyak 1.058 pulau. Adapun hasil verifikasi Ulang Pulau Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 terdapat 1800.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki 1.800 pulau yang terdiri dari 395 pulau yang sudah berpenghuni dan 1.405 pulau yang belum berpenghuni, terdiri dari Kota Tanjungpinang memiliki jumlah pulau paling sedikit, yaitu 9 pulau, yang terdiri dari 2

pulau berpenghuni dan 7 pulau yang tidak berpenghuni, sedangkan Kabupaten Lingga adalah kabupaten dengan jumlah pulau terbanyak, dengan 537 pulau yang terdiri dari 77 pulau berpenghuni dan 460 pulau yang tidak berpenghuni. Kota Batam memiliki jumlah pulau yang berpenghuni terbanyak (35,75%), sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki jumlah pulau yang berpenghuni paling sedikit (11,34%). Jumlah masing-masing pulau yang dimiliki Kabupaten/Kota tersaji dalam Tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Pulau Berpenghuni		Pulau Tidak Berpenghuni		Total Jumlah Pulau
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
1	Bintan	48	19,92	193	80,08	241
2	Karimun	73	29,32	176	70,68	249
3	Natuna	35	22,73	119	77,27	154
4	Lingga	77	14,34	460	85,66	537
5	Kepulauan Anambas	27	11,34	211	88,66	238
6	Kota Batam	133	35,75	239	64,25	372
7	Kota Tanjungpinang	2	22,22	7	77,78	9
Provinsi Kepulauan Riau		395	22	1.405	78	1.800

Sumber: Verifikasi Ulang Pulau Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 /Kepulauan Riau Dalam Angka 2022

1.4 Gambaran Umum

1.4.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 berdasarkan data base kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 2.101.215 jiwa (Semester I Tahun 2022). Penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam yakni sebesar 57,45% atau sekitar 1.207.082 jiwa, sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 2,29% atau sekitar 48,084 Jiwa. Hal ini memperlihatkan masih kurang meratanya persebaran penduduk di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.



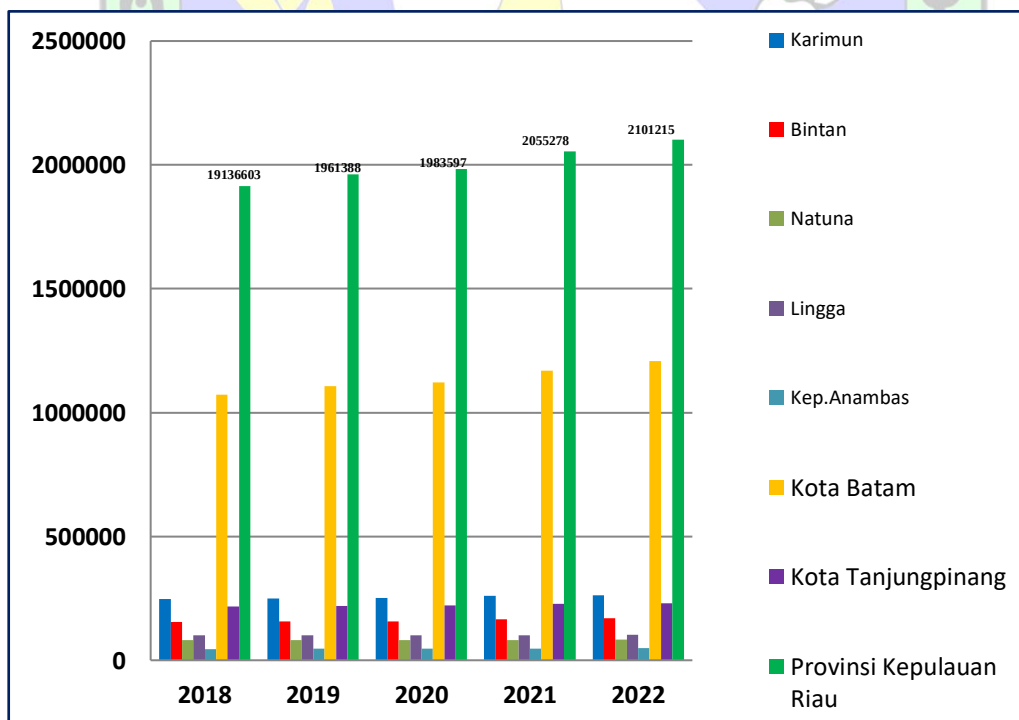
Berikut ini adalah jumlah dan laju pertumbuhan penduduk pada masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018 – 2022

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Karimun	246.522	249.375	251.510	260.438	262.075
2	Bintan	153.675	156.105	157.459	165.920	169.447
3	Natuna	80.558	81.786	82.192	82.537	82.824
4	Lingga	100.243	100.905	101.429	101.863	102.150
5	Kep.Anambas	45.347	46.271	47.022	47.803	48.084
6	Kota Batam	1.071.231	1.107.551	1.121.875	1.169.648	1.207.082
7	Kota Tanjung Pinang	216.084	219.395	222.110	227.069	229.553
	Provinsi Kepulauan Riau	1.913.660	1.961.388	1.983.597	2.055.278	2.101.215

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Grafik 1.1
Jumlah Penduduk Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018 - 2022



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

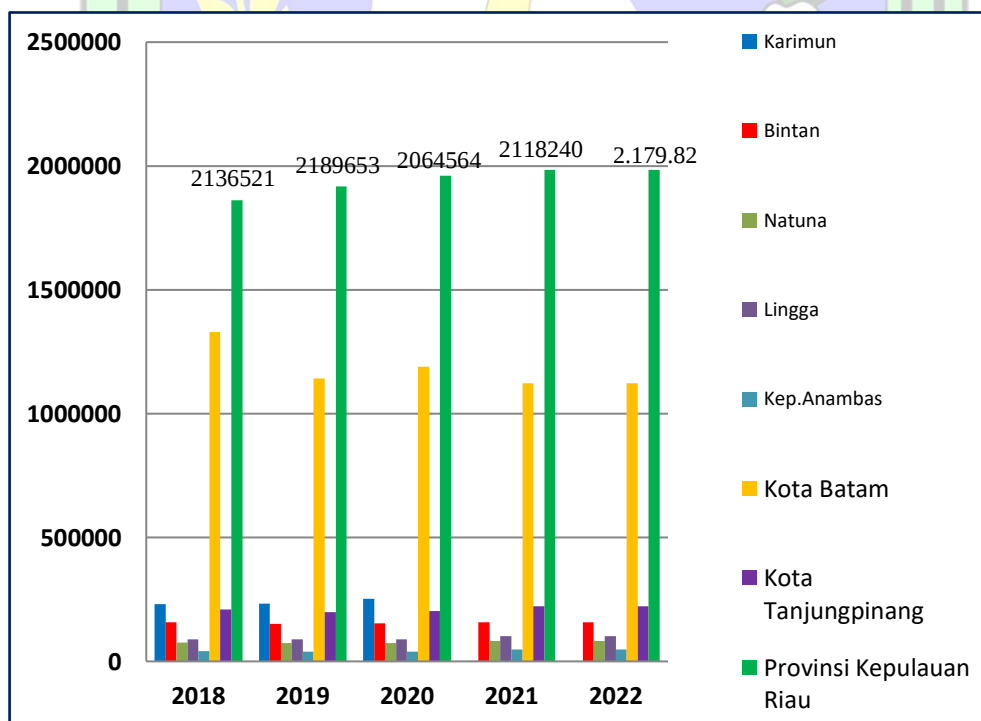


Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018 - 2022

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Karimun	231.145	232.797	253.457	259.45	266,18
2	Bintan	157.927	159.403	159.518	162.56	165,78
3	Natuna	76.968	77.771	81.495	83.36	85,45
4	Lingga	89.501	89.781	98.633	100.66	102,85
5	Kep.Anambas	41.927	42.309	47.402	48.74	50,30
6	Kota Batam	1.329.773	1.376.009	1.196.396	1.230.10	1.269,41
7	KotaTanjung Pinang	209.280	211.583	227.663	233.37	239,85
	Provinsi Kepulauan Riau	2.136.521	2.189.653	2.064.564	2.118.24	2.179,82

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Grafik 1.2
Jumlah Penduduk Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

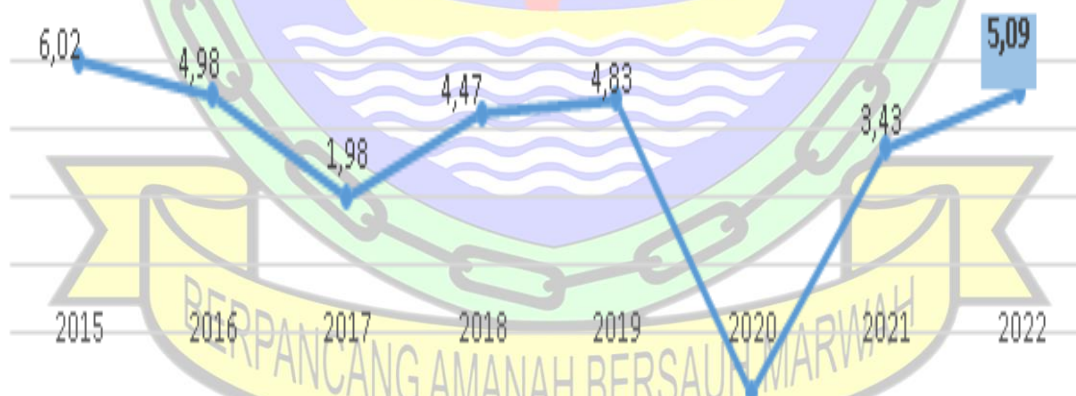
Pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau tergolong cukup tinggi, Hal ini sebagaimana diungkapkan berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk tahun 2022 sebesar 2.179,82 jiwa, terutama dikontribusikan dari pertumbuhan penduduk Kota Batam yang mencapai

rata-rata sebesar 58,23% atau sebesar 1.269,41 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang besar di Kota Batam lebih disebabkan oleh migrasi masuk penduduk karena perkembangan Kota Batam yang sangat pesat sehingga menarik perhatian bagi penduduk dari daerah lain.

1.4.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Dalam kurun waktu tahun 2020-2021, trend pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,43 %. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan sebesar 5,09%, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31 %, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau meningkat sebesar 0,22%. Secara lengkap perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 1.3
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2015-2022 (%)

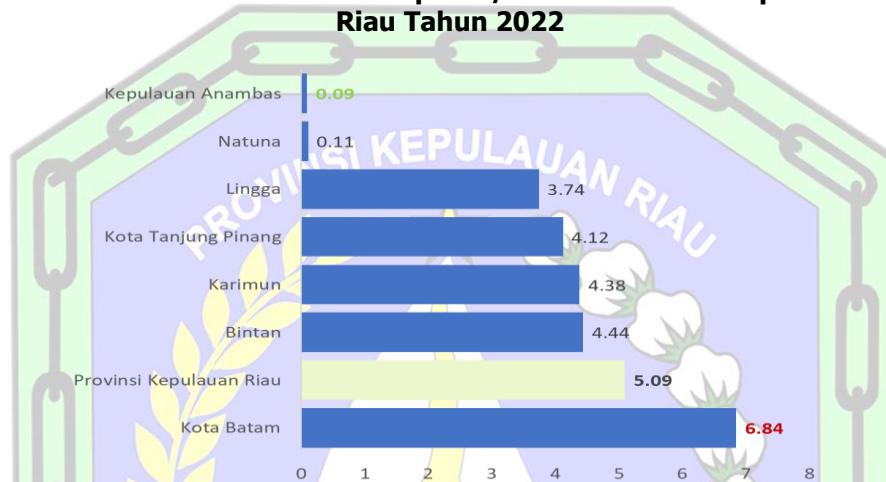


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau dan BPS Pusat Tahun 2022

Hampir seluruh sektor perekonomian di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau terdampak akibat pandemik Covid-19. Sektor yang mengalami dampak paling besar terjadi pada sektor Jasa Perusahaan, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, dan Jasa Lainnya yang mengalami pertumbuhan negatif di atas 40%

di tahun 2022 ini. Sementara itu, tercatat hanya 3 sektor yang bertumbuh secara positif di tahun 2022 yaitu pada sektor Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

Grafik 1.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 tertinggi adalah Kota Batam sebesar 6,84%, selanjutnya Kabupaten Bintan sebesar 4,44% dan Kabupaten Karimun sebesar 4,38%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 0,09%.

1.4.3 PDRB Per Kapita

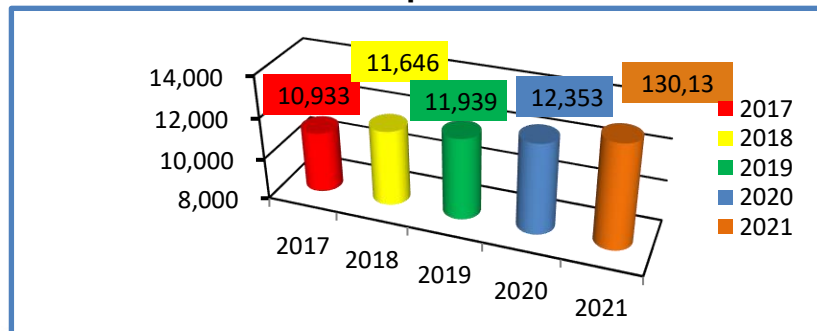
PDRB per kapita secara relatif dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021 PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku mencapai sebesar Rp 130,13 ribu. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 109,33 ribu.

Tabel 1.5
Perkembangan PDRB PerKapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017- 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp ribu)	109,33	116.46	119,39	123,53	130,13

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Grafik 1.5
Perkembangan PDRB Per Kapita
Provinsi Kepulauan Riau

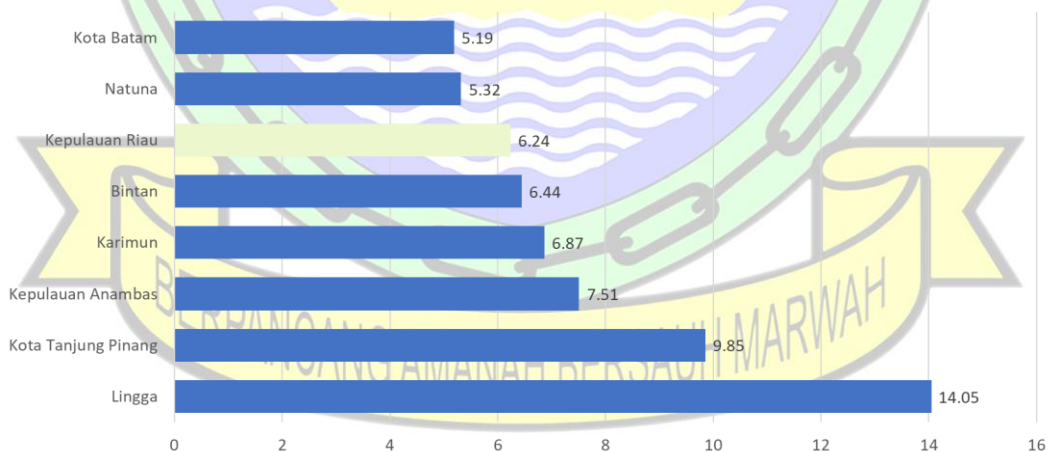


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

1.4.4 Persentase Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 sebesar 6,03%, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,75% atau sebesar 0,28% dilihat pada grafik 1.6 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, yaitu dari sebesar 6,03%. Dalam kurun waktu tersebut, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan sebesar 0,28%. Jika dilihat dari kinerja penurunannya, tren kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kondisi yang melambat. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja setiap tahunnya.

Grafik 1.6
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau 2022

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 sebesar 6,03%, lebih baik dari tingkat kemiskinan Nasional sebesar 9,57%. Jika dilihat berdasarkan provinsi di wilayah Sumatera, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau

lebih rendah dibandingkan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, namun lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.5 Tugas dan Struktur Organisasi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dengan mensejahterakan masyarakat

melalui penyiapan Sumber Daya Manusia dengan dukungan

infrastruktur yang memadai untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, berakhlak mulia dan ramah lingkungan.

Untuk mewujudkan tugas

tersebut ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi

Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:

1. Sekretariat

a. Sekretaris Daerah

- a.1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
- a.2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan,
- a.3. Asisten Administrasi Umum.

b. Staf Ahli

- b.1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum,
- b.2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan,
- b.3. Staf Ahli Bidang Sosial, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

c. Biro

- c.1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah,
- c.2. Biro Hukum,
- c.3. Biro Kesejahteraan Rakyat,
- c.4. Biro Perekonomian dan Pembangunan,
- c.5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa,
- c.6. Biro Organisasi,
- c.7. Biro Umum,
- c.8. Biro Administrasi Pimpinan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Dinas Daerah

- 2.1. Dinas Pendidikan,
- 2.2. Dinas Kesehatan,
- 2.3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan,
- 2.4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 2.5. Dinas Sosial,
- 2.6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
- 2.7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
- 2.8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
- 2.9. Dinas Perhubungan,
- 2.10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
- 2.11. Dinas Komunikasi dan Informatika,
- 2.12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- 2.13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
- 2.14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

- 2.15.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga,
- 2.16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,
- 2.17.Dinas Kelautan dan Perikanan,
- 2.18.Dinas Pariwisata,
- 2.19.Dinas Kebudayaan,
- 2.20.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan,
- 2.21.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,
- 2.22.Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran.

3. Inspektorat Daerah.

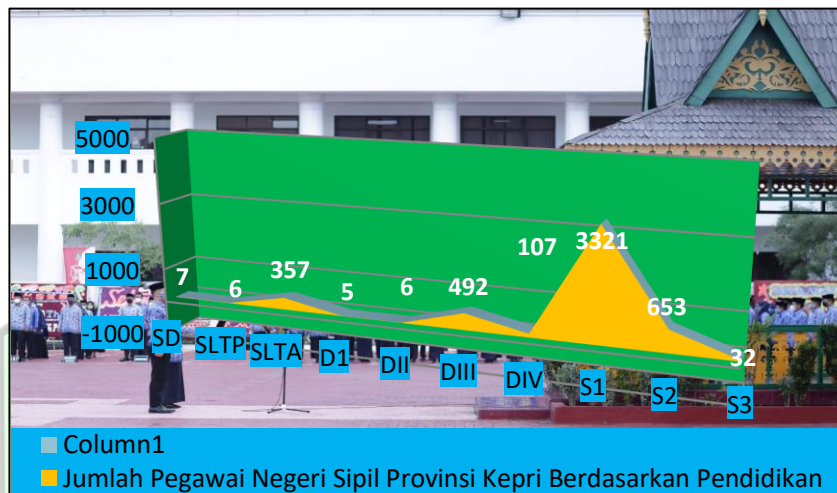
4. Badan Daerah.

- 4.1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan,
- 4.2. Badan Keuangan dan Aset Daerah,
- 4.3. Badan Pendapatan Daerah,
- 4.4. Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI,
- 4.5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
- 4.6. Badan Pengelola Perbatasan Daerah,
- 4.7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
- 4.8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
- 4.9. Badan Penghubung Daerah.

1.6 Kondisi Pegawai

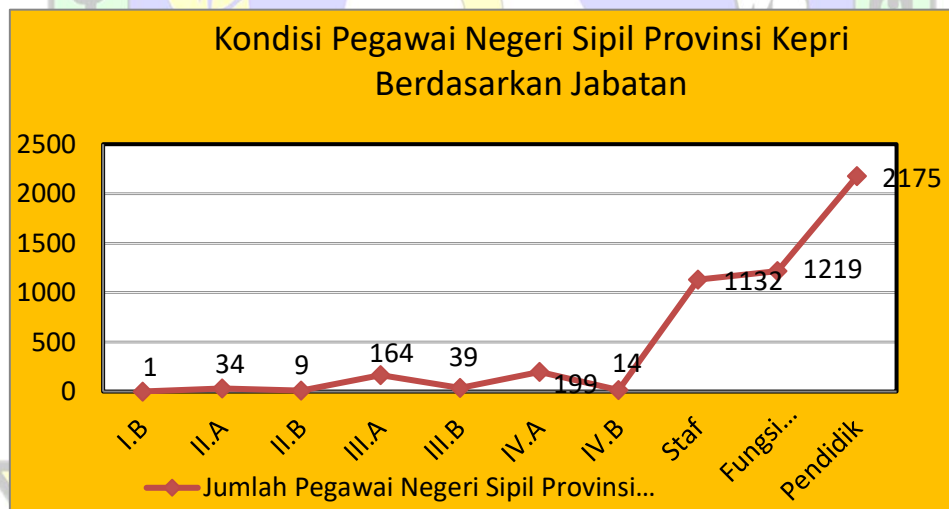
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki Pegawai Negeri Sipil sebanyak 4.986 orang, dimana jumlah tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Adapun kondisi atau jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau pada akhir tahun 2022 sebagai berikut :

Grafik 1.7
Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepri Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022



Sumber: BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Per Desember 2022

Grafik 1.8
Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jabatan



Sumber: BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Per Desember 2022

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan kinerja ini mengungkapkan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Adapun sistematika penulisan laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Dalam bab ini menjelaskan secara ringkas gambaran umum organisasi, profil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan sekilas pengantar lainnya.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Dalam bab ini diuraikan beberapa hal penting dalam perencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Dalam bab ini dijelaskan pencapaian sasaran-sasaran organisasi serta pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja atas Perjanjian Kinerja tahun 2022.

BAB IV Penutup.

Dalam bab ini menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

Lampiran:

Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan daftar penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Provinsi Kepulauan Riau disajikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode 2021 – 2026. Dalam RPJMD tersebut mengandung pernyataan visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disusun untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (ultimate outcome) yang diharapkan.

Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Visi adalah sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Visi Provinsi Kepulauan Riau merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus dibawa dan berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

“ TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA
SAING DAN BERBUDAYA ”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Kepulauan Riau yang makmur : mengandung arti bahwa kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.
- Kepulauan Riau berdaya saing : Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
- Kepulauan Riau berbudaya : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Misi merupakan penjabaran dari visi, untuk mengarahkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Misi juga menggambarkan tugas-tugas yang diemban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai kewenangan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Misi yang ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan seluruh komponen organisasi dan dapat memicu tindakan dan peran serta masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan positif yang mengarah pada pencapaian misi dan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Misi Pertama

Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.

2. Misi Kedua

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

3. Misi Ketiga

Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan taqwa.

4. Misi Keempat

Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

5. Misi Kelima

Mempercepat konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan indikasi kinerja pembangunan yang diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Sementara itu sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan dari hasil pembangunan daerah.

Dalam menetapkan tujuan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi, mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*), menggambarkan hasil yang ingin dicapai, mengakomodasi issue strategis yang dihadapi, mencerminkan *core area* dimana organisasi berperan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.

Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2026 dikelompokkan sesuai dengan Misi sebagai berikut :



1) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi pertama

(1.1) *Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah dan Keberlanjutan Lingkungan.*

Indikator Tujuan :

No	Indikator Tujuan	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	3.297	3.330

Sasaran/Indikator Sasaran :

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Optimalisasi Sektor Perikanan - Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Harga berlaku (miliar rupiah)	3.297	3.330
2	Peningkatan Sektor Pariwisata - Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga berlaku (miliar rupiah)	2.387	3.495
3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	69,73	70,38
4	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari - Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku (miliar rupiah)	27,10	27,50

(1.2) *Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.*

Indikator Tujuan :

No	Indikator Tujuan	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	PDRB per Kapita ADHK (juta rupiah)	80,07	88,27
2	Indeks Gini (Indeks)	0,332	0,318
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,8 - 5,6	5,2-6,3



Sasaran/Indikator Sasaran :

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan - Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB Harga berlaku (miliar rupiah) - Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku (%) - Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap DRBharga berlaku (%) - Laju Peditumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%) - Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%) - Persentase Koperasi yang Berkualitas (%) - Persentase UMKM yang Naik Kelas (%) - Nilai Realisasi Investasi PMA (miliar rupiah) - Nilai Realisasi Investasi PMDN (miliar rupiah)	55.744	71.550
2	Peningkatan PAD - Persentase Peningkatan PAD (%)	5,59	5,91
3	Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan) - Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku (miliar rupiah) - Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	2.177	2.196
		62,80	62,84

2) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kedua

(2.1) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif

Indikator Tujuan :

No	Indikator Tujuan	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Indeks Reformasi Birokrasi	69,77	72,17



Sasaran/Indikator Sasaran :

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi - Indeks SPBE (Indeks)	2,85	3,18
2	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan - Akuntabilitas Kinerja (Nilai Sakip) - Indeks Pelayanan Publik (Indeks) - Opini Laporan Keuangan (Opini)	BB B WTP	BB B WTP
3	Management ASN yang Profesional - Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit) (Indeks)	Baik (286)	Sangat Baik (325)
4	Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana - Indeks Kapasitas Daerah (Indeks)	0,37	0,73
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Indeks)	1,13	1,25

3) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi ketiga

(3.1) Penguatan Jaring Pengaman Sosial

Indikator Tujuan :

No	Indikator Tujuan	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Angka Kemiskinan	6,01	5,57

Sasaran/Indikator Sasaran :

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Menurunnya angka Kemiskinan - Angka Kemiskinan (%) - Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,01 10,10	5,57 7,50



2	Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif - Indeks Desa Membangun (Indeks)	0.6779 (Desa Berkembang)	0.7101 (Desa Berkembang)
---	---	-----------------------------	-----------------------------

(3.2) *Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter*

Indikator Tujuan :

No	Indikator Tujuan	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Indeks Pembangunan Manusia	76,7	78,47

Sasaran/Indikator Sasaran :

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat - Angka Harapan Hidup (Tahun) - Prevalensi Stunting (%)	70,27 15,80	70,85 12,80
2	Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan - Harapan Lama Sekolah (Tahun) - Rata-rata lama Sekolah (Tahun) - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK (%)	12,92 10,14 100	12,96 10,18 100
3	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak - Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks) - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks) - Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	93,20 65,50 75,05	93,60 69,00 79,36
4	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pemuda - Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (Indeks) - SD (Sport Development Index) (Indeks)	0,504 6,84	0,672 7,67

(4) **Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi keempat**

(4.1) *Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya dan Harmoni Masyarakat*

Indikator Tujuan :

No	Indikator Tujuan	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,9	66,9

Sasaran/Indikator Sasaran :

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu - Nilai Ekonomi Budaya (Nilai) - Nilai Warisan Budaya (Nilai) - Nilai Ekspresi Budaya (Nilai) - Nilai Budaya Literasi (Nilai)	28,11 48,84 1,49 72,25	28,27 52,04 1,69 73,50
2	Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama - Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks) - Indeks Ketahanan Nasional (Skor)	74,46 2,81	80,60 2,89

(5) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kelima

(5.1) Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau

Indikator Tujuan :

No	Indikator Tujuan	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Rasio Konektivitas	41,33	65

Sasaran/Indikator Sasaran :

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar - Rasio Elektrifikasi (Rasio) - Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%) - Cakupan Pelayanan Air Limbah (%) - Cakupan Pelayanan Drainase (%) - Cakupan Pelayanan Persampahan (%) - Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	95,50 96,15 91,32 48,1 67,80 145,27	96,60 98,63 100 60,3 72,00 0
2	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir - Persentase Jalan Kondisi Baik (%) - Rasio Konektivitas Angkutan Darat (Rasio) - Rasio Konektivitas Angkutan Penyebrangan (Rasio) - Rasio Konektivitas Angkutan Laut (Rasio)	63,25 18 23,33 31,82	69,25 30 35 50

B. PERJANJIAN KINERJA

Sehubungan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan lembar /dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Tujuan penetapan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan *reward and punishment*.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2022 sebagai tolok ukur evaluasi kinerja sampai dengan akhir tahun 2022. Perjanjian Kinerja Perubahan Provinsi Kepri Tahun 2022 sebagaimana pada tabel berikut :



Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	- Pertumbuhan Ekonomi	4,8-5,6 %
		- Pendapatan Per Kapita	80,07 Juta Rupiah
		- Indeks Gini	0,332 Indeks
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	- Angka Pengangguran	10,10 %
		- Angka Kemiskinan	6,01%
3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69,73 indeks
4	Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	69,77 Indeks
5	Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	76,7 Indeks
6	Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100 %
7	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,20 Indeks
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	15,80 %
9	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	- Rasio Elektrifikasi	95,5 Rasio
		- Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	145,27 Ha
10	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio Konektivitas	41,33 Rasio
11	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Persentase Jalan Kondisi Baik	63,25 %
12	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,9 Indeks

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada publik telah dicapai.

III.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan e-performance adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi atas capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah setiap triwulan secara transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 yang ditargetkan untuk dicapai.

Apabila semakin tinggi realisasi indikator menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Sedangkan semakin tinggi realisasi indikator menunjukkan penacapaian kinerja yang semakin rendah diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{CAPAIAN KINERJA} = \frac{(2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100%	Sangat baik
3	75% sampai 100%	Baik
2	55% sampai 75%	Cukup
1	Kurang dari 55%	Kurang

Berikut sasaran dan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang dilakukan evaluasi kinerjanya sebagaimana pada tabel berikut :



Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,8 – 5,6 %
		Pendapatan Per Kapita	80,07 Juta Rupiah
		Ideks Gini	0,332 indeks
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Pengangguran	10,10 %
		Angka Kemiskinan	6,01 %
3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69,73 indeks
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	69,77 indeks
5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	76,7 indeks
6	Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100 %
7	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,20 indeks
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	15,80 %
9	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi	95,5 Rasio
		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	145,27 Ha
10	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan	Rasio Konektivitas	41,33 Rasio

	Pengintegrasian Antar Pulau		
11	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Persentase Jalan Kondisi Baik	63,25 %
12	Pembinaan Keagamaan , Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indek Pembangunan Kebudayaan	62,9 Indeks

III.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program untuk setiap bidang kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gaps) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Analisis dalam laporan ini dilakukan per indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Kepulauan Tahun 2022 yang ditetapkan pada bulan Januari. Berikut ini disampaikan analisa capaian kinerja organisasi yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 sebagai berikut:

SASARAN. 1

Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Terlepas dari adanya kritik yang meragukan kemampuan indikator ini untuk mengukur tingkat kesejahteraan, namun sejauh ini indikator tersebut masih dianggap sebagai alat ukur yang sederhana dan mudah digunakan. Tujuan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 salah satunya adalah Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, menunjukkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terus tumbuh akan berdampak secara langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya jumlah Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang indikator kinerja nya mencakup pertumbuhan ekonomi, Pendapatan PerKapita dan Indeks Gini tidak lepas dari kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Biro Perekonomian dan Pembangunan sebagai koordinator merangkum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pendukung indikator Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Perkapita dan indeks Gini tersebut , tidak lepas juga dukungan dari semua elemen baik pemerintah daerah, akademisi, industry, komunitas, dan juga media.

➤ ***Pertumbuhan Ekonomi***

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan pada kebijakan RKP tahun 2022. RKP sebagai acuan untuk mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional. Substansi dari dokumen RKP Tahun 2022 yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2022.

Tema RKP Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Adapun 7 prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :



1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Secara keseluruhan tahun 2022, perekonomian Kepulauan Riau mengalami peningkatan didorong oleh meningkatnya mobilitas dan aktivitas usaha seiring terkendalinya kasus COVID-19. Perbaikan ekonomi tersebut diperkirakan ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan peningkatan kinerja ekspor. Perbaikan konsumsi rumah tangga pada tahun ini mulai terlihat pada triwulan II seiring meredanya kasus Covid-19 yang diikuti dengan pelonggaran mobilitas masyarakat terutama pada momentum Ramadhan dan Idul Fitri serta relaksasi aturan kunjungan untuk wisatawan.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Mulai tahun 2014 perhitungan PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Kepulauan Riau menggunakan tahun dasar tahun 2010. Berikut data PDRB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2022:



Tabel 3.2
PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan IV-2021, Triwulan III-2022 dan Triwulan IV-2022 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		Triw IV-2021*	Triw III-2022*	Triw IV-2022*	Triw IV-2021*	Triw III-2022*	Triw IV-2022*
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.215,60	2.379,50	2.476,49	1.368,72	1.400,74	1.439,81
B.	Pertambangan dan Penggalian	9.615,74	9.699,36	8.546,41	6.663,97	5.498,53	5.138,69
C.	Industri Pengolahan	30.714,37	31.434,40	34.324,18	19.941,70	19.645,41	21.283,19
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	724,29	829,65	884,29	433,74	487,71	513,31
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	69,65	84,62	76,83	54,45	65,74	59,52
F.	Konstruksi	13.706,28	14.813,79	17.190,05	8.436,74	8.660,72	9.950,77
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.923,31	6.787,61	6.912,16	3.564,24	3.770,69	3.812,82
H.	Transportasi dan Pergudangan	1.123,40	1.584,11	1.751,44	747,26	903,12	979,71
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	981,18	1.254,89	1.620,55	727,20	903,38	1.165,60
J.	Informasi dan Komunikasi	1.828,21	2.076,25	2.269,27	1.526,99	1.728,68	1.887,11
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.793,96	2.040,71	2.106,45	1.187,78	1.285,79	1.312,39
L.	Real Estat	793,65	848,86	903,43	569,83	588,50	622,55
M,N.	Jasa Perusahaan	1,85	2,16	2,60	1,57	1,62	1,86
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.838,08	1.654,78	1.951,10	1.116,99	937,39	1.105,20
P.	Jasa Pendidikan	997,86	1.058,44	1.106,27	553,46	567,66	585,87
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	638,76	728,83	709,58	471,04	514,44	500,00
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	114,78	186,65	202,54	73,60	107,95	116,98
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		73.080,95	77.464,62	83.033,66	47.439,27	47.068,06	50.475,37
PDRB Tahun 2021 Harga Berlaku					275.622,85		
PDRB Tahun 2021 Harga Konstan					180.952,44		
PDRB Tahun 2022 Harga Berlaku					308.842,68		
PDRB Tahun 2022 Harga Konstan					190.163,70		

*Angka Sementara

Perekonomian Kepulauan Riau tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp308,84 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp190,16 triliun. PDRB per kapita Kepulauan Riau pada tahun 2022 mencapai 141,68 juta.



Capaian kinerja dari indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,8 – 5,6%	5.09	106

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Perekonomian Kepulauan Riau triwulan IV-2022 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,09 persen, tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan triwulan IV-2021 (*c-to-c*) yang tumbuh sebesar 3,43 persen. Pertumbuhan tertinggi *c-to-c* pada triwulan IV-2022 dicapai oleh kategori Jasa Lainnya sebesar 69,97 persen; diikuti kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 49,71 persen; dan kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 38,37 persen.

Analisis terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kinerja pertumbuhan ekonomi dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 4.8-5.6% pada tahun 2022 dengan capaian realisasi sebesar 5.09% dan capaian kinerja sebesar 106% atau dalam **Kategori Sangat Baik**.

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau terutama terjadi pada komponen konsumsi rumah tangga, net ekspor dan investasi. Perbaikan tersebut didorong peningkatan permintaan masyarakat seiring relaksasi aturan perjalanan yang mendorong masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas ekonomi di luar rumah dan meningkatnya permintaan dari negara mitra dagang utama. Dari sisi Lapangan Usaha, peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri utamanya didorong oleh meningkatnya kinerja pada Lapangan Usaha Perdagangan besar dan eceran, serta Lapangan Usaha Pertambangan dan penggalian. Namun demikian, perlambatan pada pengolahan dan konstruksi menahan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Berikut disampaikan perbandingan capaian indikator Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2022:

Tabel 3.4

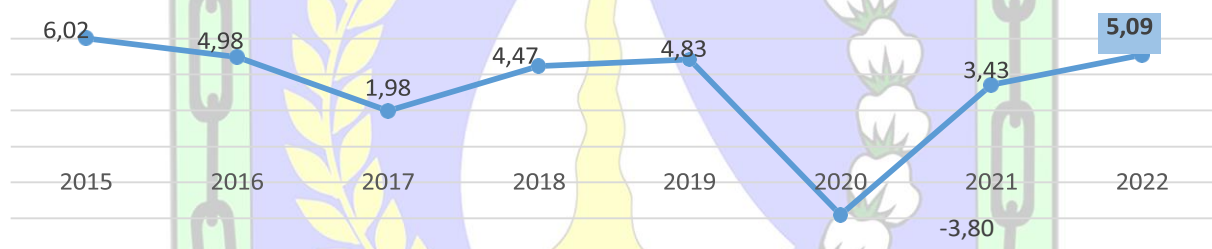
Perbandingan Realisasi Indikator Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 -2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2021	2022*
1.	Pertumbuhan Ekonomi	3,43	5,09

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Ekonomi Kepulauan Riau pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,09 persen, tumbuh lebih cepat dibanding tahun 2021 sebesar 3,43 persen.

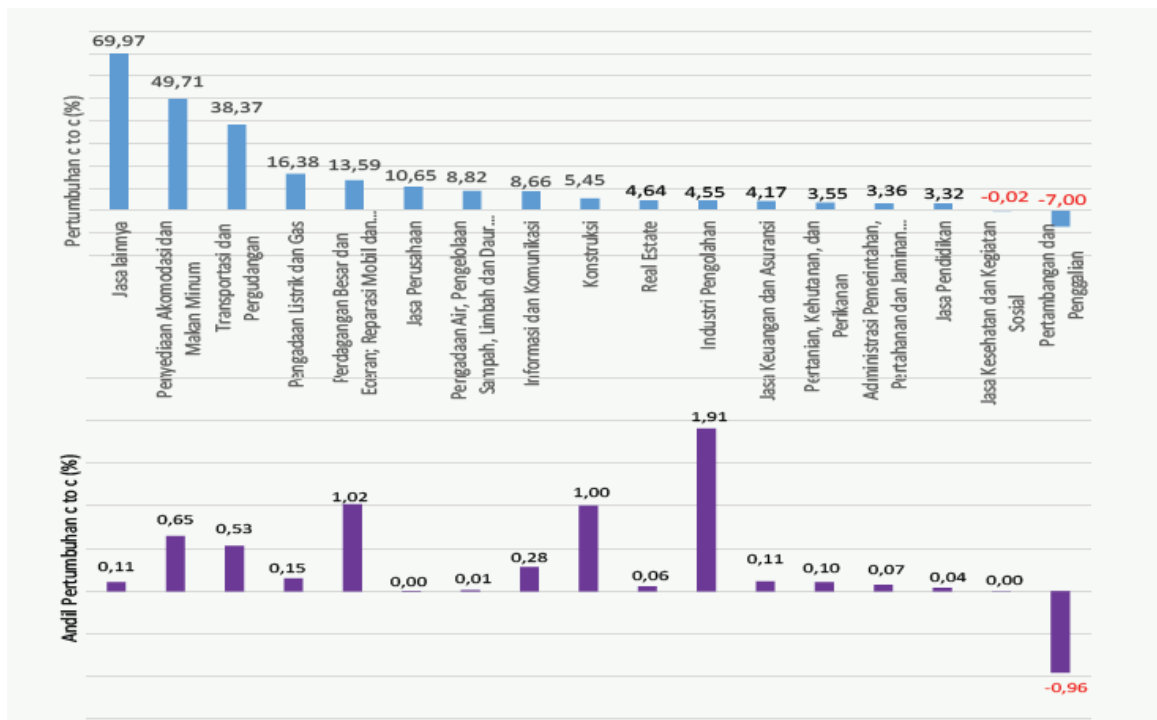
Gambar 3.1 Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan IV- 2015-2022 (c-to-c) (persen)



Perekonomian Kepulauan Riau triwulan IV-2022 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,09 persen, tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan triwulan IV-2021 (c-to-c) yang tumbuh sebesar 3,43 persen. Pertumbuhan tertinggi c-to-c pada triwulan IV-2022 dicapai oleh kategori Jasa Lainnya sebesar 69,97 persen; diikuti kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 49,71 persen; dan kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 38,37 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau triwulan IV-2022 secara c-to-c, Industri Pengolahan memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 1,91 persen.

Gambar 3.2 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan IV-2022 (c-to-c) (persen).



Berikut disampaikan perbandingan capaian indikator Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun Tahun 2022 berdasarkan Target RPJMD:

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Target RPJMD Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,8 – 5,6%	5,09	106

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Capaian pada indikator Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan target RPJMD maka diperoleh capaian kinerja sebesar 106% dengan target RPJMD sebesar 4,8-5,6% dan realisasi sebesar 5,09%.

Beberapa point hal-hal yang menyebabkan target pertumbuhan ekonomi Provinsi kepulauan riau data tercapai diantaranya:



- gaji ke-13 bagi (ASN) dan pensiunan cair mulai 1 Juli 2022
- Idul Adha
- Tahun Ajaran baru
- Kepri Mengadakan MTQ ke-IX Tingkat Provinsi Kepri di Anambas
- Mulai 7 Juli 2022, Agen Pelayaran Internasional PT Putramaju (Global Indonesia), Membuka Rute Pelayaran Batam Tujuan Malaysia

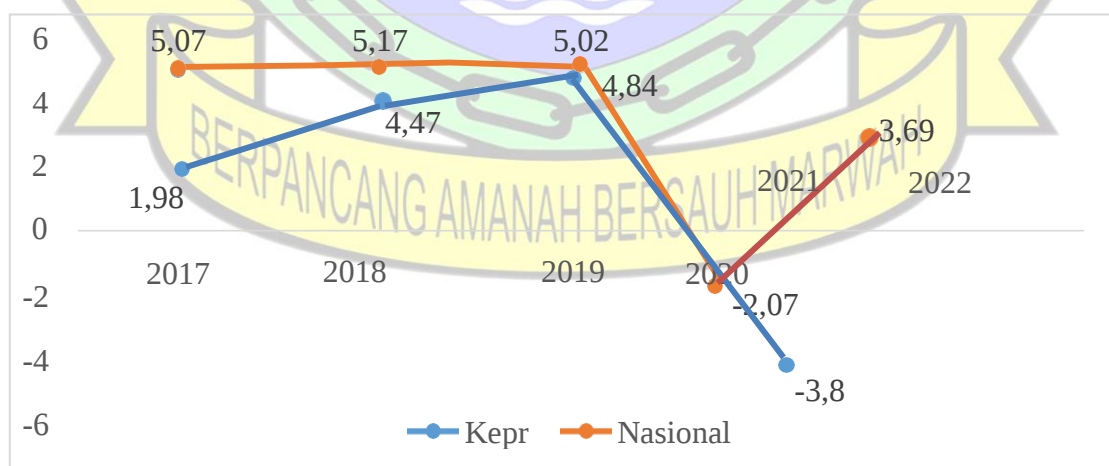
- Harga BBM Naik Mulai 3 September 2022
- Tarif kapal feri di Kepri resmi naik mulai Jumat, 9 September 2022.
- Ulang tahun Kepri ke-20
- Kapal tol Laut KM Logistik Nusantara 4 milik PT Pelni Kembali layani pelayaran di bintan setelah vakum 2 tahun, hal ini dapat menekan biaya transportasi pengiriman barang-barang ke Kepri
- Penyaluran BLT BBM di Kepri Nyaris 100 Persen



Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Dari gambar dibawah ini terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir selalu berada dibawah laju pertumbuhan nasional.

Gambar 3.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2017-2022



Dalam rangka mendorong ekonomi daerah, kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 diarahkan pada Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui:

- 1) Mendorong pemulihan aspek kesehatan masyarakat dari penyebaran Covid-19 yang seimbang dengan upaya mendorong pemulihan ekonomi.
- 2) Melakukan realisasi belanja pemerintah lebih awal terutama belanja modal infrastruktur untuk menghasilkan dampak lebih optimal bagi perekonomian daerah.
- 3) Mendorong kelancaran implementasi program pemulihan ekonomi nasional di daerah
- 4) Mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus Nongsa digital park dan KEK maintenance, repair and overhoul (MRO) Batam Aero Technic dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja.
- 5) Mendorong pemulihan pariwisata dengan mendorong kesiapan penerapan protokol kesehatan CHSE pada daerah tujuan wisata tertentu, mendorong pembukaan wisata secara bertahap dan mendorong penggunaan transaksi elektronik non tunai, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata.
- 6) Mendorong perekonomian dan keuangan yang inklusif dengan cara: mendorong industri eksisting untuk meningkatkan pangsa penggunaan bahan baku berbasis potensi sumberdaya lokal; memprioritaskan investasi dalam pengembangan agroindustri berbasis potensi SDA di Kepri seperti hasil pertanian dan perikanan; mendorong penguatan dan kemitraan serta menjaga daya saing dan kinerja UMKM melalui digitalisasi UMKM, serta meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung (transportasi jalan, jembatan, bandara, pelabuhan) untuk menekan biaya logistik dan konektivitas.

Identifikasi program pembangunan daerah, dilakukan dengan cara menganalisis tujuan, sasaran, dan strategi yang telah dirumuskan, kemudian dijabarkan program pembangunan Daerah sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dengan demikian akan terlihat alur keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dengan program pembangunan daerah.

Berikut ini adalah daftar program pembangunan Daerah yang mendukung secara langsung dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau



tahun 2021-2026. Program pembangunan tersebut dikelompokkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat. Program pembangunan Daerah pada misi ini ialah:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- d. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. Program Pemasaran Pariwisata;
- g. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- h. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- i. i. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan
- j. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- k. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- l. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- m. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- n. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- o. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- p. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- q. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- r. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- s. Program Pengelolaan Persampahan;
- t. Program Pengelolaan Hutan;
- u. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan
- v. Masyarakat di Bidang Kehutanan;
- w. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- x. Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- y. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);



- z. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- aa. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
- bb. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
- cc. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- dd. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- ee. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
- ff. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
- gg. Program Pengembangan Ekspor;
- hh. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- ii. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- jj. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- kk. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- ll. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- mm. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- nn. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- oo. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- pp. Program Promosi Penanaman Modal;
- qq. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- rr. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- ss. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- tt. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- uu. Program Perekonomian dan Pembangunan;
- vv. Program Pengelolaan Pelayanan;
- ww. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- xx. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- yy. Program Penyuluhan Pertanian;
- zz. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- aaa. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- bbb. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- ccc. Program Pengawasan Keamanan Pangan; dan
- ddd. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat

eee. Veteriner.

Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan:

1. Anggaran

Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dasar atas pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Target kinerja urusan bidang perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau, Alokasi belanja pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia/personil pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau belum cukup memadai dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan.

Program/kegiatan yang dilakukan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro anggaran Rp. 81.299.340 realisasi anggaran Rp. 60.690.180 (74.65%) . Pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain sbb :

a. Tujuan kebijakan ekonomi makro adalah untuk mengatasi masalah perekonomian diatas, seperti :

- Mengontrol laju inflasi
- Meningkatkan pendapatan daerah
- Menjaga stabilitas perekonomian daerah
- Membantu pemerataan distribusi pendapatan daerah
- Membantu meningkatkan kapasitas produksi daerah
- Meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan di masyarakat.
- Membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

b. Susunan keanggotaan TPID Provinsi berdasarkan lampiran III huruf a Keputusan Mendagri RI No.500.05-8135 Tahun 2017, terdiri atas :

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Ketua | : Gubernur |
| 2. Pelaksana Harian Tugas | : Sekretaris Daerah Provinsi |



3. Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi
 4. Sekretaris : Kepala Biro yang membidangi Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi
 5. Anggota : Kepala Perangkat Daerah di Provinsi yang membidangi urusan perdagangan, pertanian, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, perencanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, statistik dan perangkat daerah lainnya yang dianggap perlu.
- c. TPID ini dibentuk dengan tugas dan kewajiban :
1. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat provinsi;
 2. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
 3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
 4. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten / Kota; dan/atau
 5. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara tertulis setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat:
 - a) Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
 - b) Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
 - c) Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
 - d) Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
 - e) Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
 7. Menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan menyampaikannya kepada

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui Forum Rapat Koordinasi Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID.

d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan arahan kebijakan pengendalian inflasi daerah kepada TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut disampaikan capaian penyerapan anggaran indikator Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun Tahun 2022:

Tabel 3.6
Tingkat Efisiensi dari capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran yang dipergunakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran	Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,8 – 5,6%	5.09	81.299.340	60.690.180	74.65%

➤ **Pendapatan Per Kapita**

PDRB per kapita tidak semata-mata mengindikasikan kemakmuran wilayah karena pada kenyataannya distribusi pendapatan suatu wilayah masih belum merata. Ada kelompok masyarakat yang memperoleh pendapatan tinggi, tetapi ada pula yang pendapatannya masih rendah. Meskipun PDRB per kapita suatu wilayah tinggi, tetapi bila tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk juga masih tinggi maka wilayah tersebut belum dapat dikatakan mengalami makmur atau sejahtera. Sehingga, untuk memaknai data PDRB per kapita tidak terlepas dari data dasarnya. Oleh karena itu angka PDRB per kapita dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan data total PDRB. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita mengindikasikan rata-rata nilai

tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap penduduknya. PDRB per kapita sering digunakan sebagai pendekatan pendapatan per kapita penduduk karena ukuran pendapatan per kapita sulit diperoleh.

Data PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara :

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya;
2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.
5. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang.

Tabel 3.7

PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan IV-2021, Triwulan III-2022 dan Triwulan IV-2022 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw IV-2021*	Triw III-2022*	Triw IV-2022*	Triw IV-2021*	Triw III-2022*	Triw IV-2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.215,60	2.379,50	2.476,49	1.368,72	1.400,74	1.439,81
B. Pertambangan dan Penggalian	9.615,74	9.699,36	8.546,41	6.663,97	5.498,53	5.138,69
C. Industri Pengolahan	30.714,37	31.434,40	34.324,18	19.941,70	19.645,41	21.283,19
D. Pengadaan Listrik dan Gas	724,29	829,65	884,29	433,74	487,71	513,31
F. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	69,65	84,62	76,83	54,45	65,74	59,52
F. Konstruksi	13.706,28	14.813,79	17.190,05	8.436,74	8.660,72	9.950,77



G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Rep- arasi Mobil dan Sepeda Motor	5.923,31	6.787,61	6.912,16	3.564,24	3.770,69	3.812,82
H.	Transportasi dan Pergudangan	1.123,40	1.584,11	1.751,44	747,26	903,12	979,71
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	981,18	1.254,89	1.620,55	727,20	903,38	1.165,60
J.	Informasi dan Komunikasi	1.828,21	2.076,25	2.269,27	1.526,99	1.728,68	1.887,11
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.793,96	2.040,71	2.106,45	1.187,78	1.285,79	1.312,39
L.	Real Estat	793,65	848,86	903,43	569,83	588,50	622,55
M,N.	Jasa Perusahaan	1,85	2,16	2,60	1,57	1,62	1,86
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertah- aan dan Jaminan Sosial Wajib	1.838,08	1.654,78	1.951,10	1.116,99	937,39	1.105,20
P.	Jasa Pendidikan	997,86	1.058,44	1.106,27	553,46	567,66	585,87
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	638,76	728,83	709,58	471,04	514,44	500,00
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	114,78	186,65	202,54	73,60	107,95	116,98
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		73.080,95	77.464,62	83.033,66	47.439,27	47.068,06	50.475,37
PDRB Tahun 2021 Harga Berlaku		275.622,85					
PDRB Tahun 2021 Harga Konstan		180.952,44					
PDRB Tahun 2022 Harga Berlaku		308.842,68					
PDRB Tahun 2022 Harga Konstan		190.163,70					

*Angka Sementara

Capaian kinerja dari indikator Pendapatan Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja indikator Pendapatan Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pendapatan Per Kapita	80,07 Juta Rupiah	87,24 Juta Rupiah	109

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisis terhadap pendapatan perkapita berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kinerja pendapatan perkapita dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 80,07 juta pada tahun 2022 dengan capaian realisasi sebesar 87,24 juta dan capaian kinerja sebesar 109% atau dalam **Kategori Sangat Baik**.



Berikut disampaikan perbandingan capaian indikator Pendapatan perkapita Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2022:

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Indikator Pendapatan Per Kapita Tahun 2021 -2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2021	2022*
1.	PDRB Perkapita (PDRB atas Harga Konstan dalam juta rupiah)	85,43 juta rupiah	87,24 Juta rupiah
2.	(PDRB PerKapita atas Harga Berlaku dalam juta rupiah)	130,12 juta rupiah	141,68 Juta Rupiah

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kepulauan Riau PDRB Perkapita (PDRB atas Harga Konstan dalam juta rupiah) tahun 2022 sebesar 87,24 juta rupiah meningkat 1,881 juta rupiah dari tahun 2021. Kemudian PDRB PerKapita atas Harga Berlaku dalam juta rupiah Tahun 2022 sebesar 141,68 juta rupiah juga meningkat 11,56 juta rupiah dari tahun 2021.

Berikut disampaikan perbandingan capaian indikator Pendapatan perkapita Provinsi Kepulauan Riau tahun Tahun 2022 berdasarkan Target RPJMD:

Tabel 3.10

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Pendapatan Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau dengan Target RPJMD Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pendapatan Per Kapita ADHK	80,07 Juta Rupiah	87,24 Juta Rupiah	109

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisis terhadap pendapatan perkapita dibandingkan dengan target RPJMD berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kinerja pendapatan perkapita dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 80,07 juta pada tahun 2022 dengan capaian realisasi sebesar 87,24 juta dan capaian kinerja sebesar 109%.



Berikut disampaikan PDRB perkapita Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2019-2021 :

Tabel 3.11

Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan (Ribu Rupiah), 2019-2021

kab/kota	PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan (Ribu Rupiah)		
	2019	2020	2021
Karimun	40306.70	36056.42	35971.09
Bintan	90019.69	87223.78	85712.39
Natuna	194149.33	180061.12	175680.15
Lingga	32576.60	29589.22	29520.34
Kepulauan Anambas	282934.38	235179.04	227927.17
Batam	76586.31	88970.46	90292.84
Tanjungpinang	67574.41	61397.32	60077.95

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berikut disampaikan perbandingan PDRB perkapita Kepulauan Riau dengan capaian PDRB Nasional:

Tabel 3.12

Perbandingan PDRB Perkapita Kepulauan Riau dan Nasional 2020-2022

Komponen (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)
PDB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Nasional			
- PDB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Nasional	57,3	62,3	71,0
- PDRB Per Kapita Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	123,46	130,12	141,68
- PDRB Per Kapita Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	85,01	85,43	87,24

PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebesar 87,24 Juta rupiah lebih meningkat sebesar 16,24 juta rupiah dari capaian PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku secara nasional.

Identifikasi program pembangunan daerah, dilakukan dengan cara menganalisis tujuan, sasaran, dan strategi yang telah dirumuskan, kemudian dijabarkan program pembangunan Daerah sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan dan sasaran



tersebut. Dengan demikian akan terlihat alur keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dengan program pembangunan daerah.

Berikut ini adalah daftar program pembangunan Daerah yang mendukung secara langsung dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Program pembangunan tersebut dikelompokkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat. Program pembangunan Daerah pada misi ini ialah:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- d. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. Program Pemasaran Pariwisata;
- g. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- h. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- i. i. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan
- j. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- k. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- l. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- m. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- n. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- o. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- p. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- q. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- r. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- s. Program Pengelolaan Persampahan;
- t. Program Pengelolaan Hutan;
- u. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan



- v. Masyarakat di Bidang Kehutanan;
- w. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- x. Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- y. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- z. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- aa. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
- bb. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
- cc. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- dd. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- ee. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
- ff. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
- gg. Program Pengembangan Ekspor;
- hh. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- ii. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- jj. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- kk. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- ll. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- mm. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- nn. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- oo. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- pp. Program Promosi Penanaman Modal;
- qq. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- rr. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- ss. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- tt. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- uu. Program Perekonomian dan Pembangunan;
- vv. Program Pengelolaan Pelayaran;
- ww. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- xx. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- yy. Program Penyuluhan Pertanian;
- zz. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;



- aaa. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- bbb. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- ccc. Program Pengawasan Keamanan Pangan; dan
- ddd. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
- eee. Veteriner.

Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan :

1. Anggaran

Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dasar atas pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Target kinerja urusan bidang perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau, Alokasi belanja pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia/personil pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau belum cukup memadai dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan.

Program/kegiatan yang dilakukan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut:

- a. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro anggaran Rp. 81.299.340 realisasi anggaran Rp. 60.690.180 (74.65%) . Pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain sbb :
 - Mengontrol laju inflasi
 - Meningkatkan pendapatan daerah
 - Menjaga stabilitas perekonomian daerah
 - Membantu pemerataan distribusi pendapatan daerah
 - Membantu meningkatkan kapasitas produksi daerah
 - Meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan di masyarakat.
 - Membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- b. Tujuan kebijakan ekonomi makro adalah untuk mengatasi masalah perekonomian diatas, seperti :



c. Susunan keanggotaan TPID Provinsi berdasarkan lampiran III huruf a Keputusan Mendagri RI No.500.05-8135 Tahun 2017, terdiri atas :

1. Ketua : Gubernur
2. Pelaksana Harian Tugas : Sekretaris Daerah Provinsi
3. Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi
4. Sekretaris : Kepala Biro yang membidangi Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi
5. Anggota:Kepala Perangkat Daerah di Provinsi yang membidangi urusan perdagangan, pertanian, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, perencanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, statistik dan perangkat daerah lainnya yang dianggap perlu.

d. TPID ini dibentuk dengan tugas dan kewajiban :

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat provinsi;
2. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
4. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten / Kota; dan/atau
5. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara tertulis setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat:
 - a) Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
 - b) Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
 - c) Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
 - d) Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
 - e) Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

7. Menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan menyampaikannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui Forum Rapat Koordinasi Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan arahan kebijakan pengendalian inflasi daerah kepada TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut disampaikan capaian penyerapan anggaran indikator Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun Tahun 2022:

Tabel 3.13
Tingkat Efisiensi dari capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran yang dipergunakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran	Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Per Kapita	80,07 Juta Rupiah	87,24 Juta Rupiah	81.299.340	60.690.180	74.65%

➤ **Indeks Gini**

Indeks Gini, Rasio Gini, atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan oleh statistik Italia bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 (International NGO Forum on Indonesia Development, 2018). Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan pulau yang memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau juga merupakan salah satu Provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum diikuti oleh pemerataan pendapatan masyarakatnya. Salah satu alat ukur yang digunakan dalam mengukur ketimpangan pendapatan yaitu menggunakan indeks Gini.

Semakin mendekati 1 maka nilai ketimpangan semakin besar, sebaliknya semakin mendekati 0 maka nilai ketimpangan semakin kecil. Indeks Gini mengukur ketimpangan pendapatan melalui hubungan antara presentase penduduk dengan presentase pendapatan.

Capaian kinerja dari indikator Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.14
Capaian Kinerja indikator Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

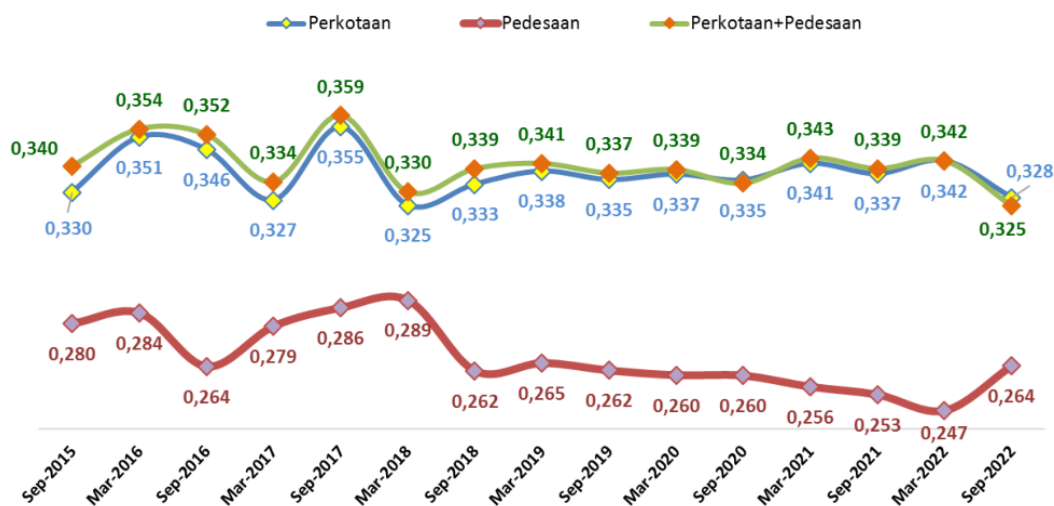
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Gini	0,332 indeks	0,325 indeks	102%

Pada September 2022 Gini Ratio tercatat sebesar 0,325, turun 0,017 poin dibandingkan dengan Gini Ratio pada Maret 2022 yang sebesar 0,342. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi sedikit peningkatan pemerataan pengeluaran di Kepulauan Riau selama periode Maret 2022-September 2022. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan "Rendah" bila Indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan "Sedang" bila Indeks Gini antara $> 0,3 - 0,4$; dan Ketimpangan "Tinggi" bila Indeks Gini di atas 0,4. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan sebesar 0,325 September 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,253. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori Sedang.

Analisis terhadap capaian kinerja berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Indeks Gini Kepulauan Riau dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 0,332 pada tahun 2022 dengan capaian realisasi sebesar 0,325 dan capaian kinerja sebesar 102% atau dalam **Kategori Sangat Baik**.

Berdasarkan gambar 2.2 dapat dilihat tren Indeks Gini di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022-September 2022 Gini Ratio di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,014 poin yaitu dari 0,342 pada Maret 2022 menjadi 0,328 pada September 2022. Berbeda halnya dengan daerah perkotaan, di daerah perdesaan nilai Gini Ratio mengalami kenaikan pada periode Maret 2022-September 2022 yaitu sebesar 0,017 poin.

Gambar 3.4



Berikut disampaikan perbandingan capaian indikator Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2022:

Tabel 3.15

Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Gini Tahun 2021 -2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2021	2022*
1.	Indeks Gini	0,339	0,325

Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kepulauan Riau yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,325. Angka ini meningkat 0,014 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2021 yang sebesar 0,339.

Pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kepulauan Riau yang diukur oleh Gini Ratio sebesar 0,325. Angka ini turun sebesar 0,017 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,342. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,328, turun 0,014 poin dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,342. Gini Ratio di daerah pedesaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,264, naik 0,017 poin dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,247.

Selama periode Maret 2022-September 2022, distribusi pengeluaran dari kelompok penduduk 40 persen terbawah mengindikasikan kenaikan, yaitu dari 20,02 persen pada Maret 2022 menjadi 20,53 persen pada September 2022. Berdasarkan

daerah, distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada periode Maret 2022-September 2022 mengalami kenaikan yaitu dari 19,94 persen pada Maret 2022 menjadi 20,39 persen pada September 2022. Kondisi yang berbeda terjadi di daerah perdesaan, dimana distribusi pengeluaran penduduk 40 persen terbawah menurun dari 24,82 persen menjadi 23,02 persen pada periode tersebut. Realisasi Tahun 2022 sebesar 0,325 menurun 0,014 point dari tahun sebelumnya sebesar 0,339.

Berikut disampaikan perbandingan capaian indikator Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 berdasarkan Target RPJMD:

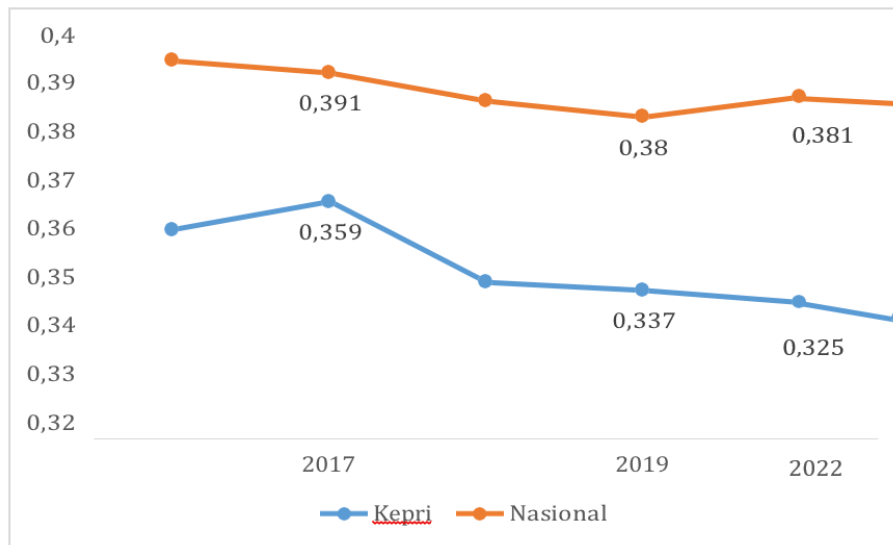
Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja indikator Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Target RPJMD Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Gini	0,332 indeks	0,325 indeks	102%

Gini Ratio Provinsi Kepri pada September 2022 tercatat sebesar 0,325, target RPJMD Tahun 2022 sebesar 0,332 lebih besar dibandingkan realisasi sebesar 0,007 point. Penurunan Indeks Gini mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Kepri sedikit menyempit pada periode Maret 2021 – Maret 2022 dengan capaian di tahun 2022 sebesar 102%.

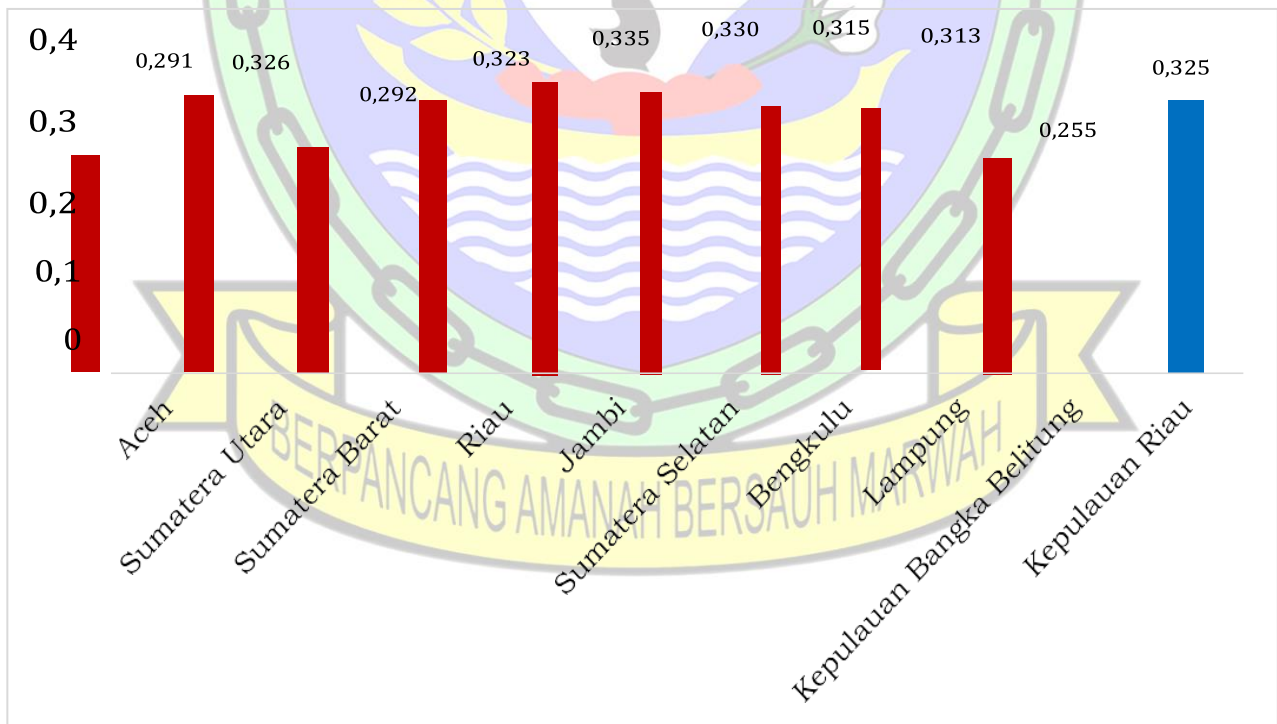
Jika dibandingkan dengan kondisi nasional, Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau jauh lebih baik, dimana indeks gini nasional pada tahun 2022 sebesar 0,381 sedangkan indeks gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebesar 0,325 lebih besar 0,056 dari kondisi nasional. Kondisi ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 3.5 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2022 September**



Dibandingkan provinsi lain di Wilayah Sumatera tahun 2022, Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,325 pada September 2022 berada pada posisi ketujuh setelah Provinsi Riau, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.6



Identifikasi program pembangunan daerah, dilakukan dengan cara menganalisis tujuan, sasaran, dan strategi yang telah dirumuskan, kemudian dijabarkan program pembangunan Daerah sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dengan demikian akan terlihat alur keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dengan program pembangunan daerah.

Berikut ini adalah daftar program pembangunan Daerah yang mendukung secara langsung dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Program pembangunan tersebut dikelompokkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat. Program pembangunan Daerah pada misi ini ialah:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- d. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. Program Pemasaran Pariwisata;
- g. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- h. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- i. i. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan
- j. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- k. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- l. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- m. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- n. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- o. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- p. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- q. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- r. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;



- s. Program Pengelolaan Persampahan;
- t. Program Pengelolaan Hutan;
- u. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan
- v. Masyarakat di Bidang Kehutanan;
- w. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- x. Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- y. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- z. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- aa. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
- bb. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
- cc. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- dd. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- ee. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
- ff. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
- gg. Program Pengembangan Ekspor;
- hh. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- ii. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- jj. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- kk. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- ll. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- mm. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- nn. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- oo. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- pp. Program Promosi Penanaman Modal;
- qq. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- rr. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- ss. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- tt. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- uu. Program Perekonomian dan Pembangunan;
- vv. Program Pengelolaan Pelayaran;
- ww. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;

- xx. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- yy. Program Penyuluhan Pertanian;
- zz. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- aaa. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- bbb. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- ccc. Program Pengawasan Keamanan Pangan; dan
- ddd. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
- eee. Veteriner.

Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan:

1. Anggaran

Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dasar atas pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Target kinerja urusan bidang perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau, Alokasi belanja pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia/personil pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau belum cukup memadai dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan.

Program/kegiatan yang dilakukan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut:

4. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro anggaran Rp. 81.299.340 realisasi anggaran Rp. 60.690.180 (74.65%) . Pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain sbb :

- a. Tujuan kebijakan ekonomi makro adalah untuk mengatasi masalah perekonomian diatas, seperti :
 - Mengontrol laju inflasi
 - Meningkatkan pendapatan daerah
 - Menjaga stabilitas perekonomian daerah
 - Membantu pemerataan distribusi pendapatan daerah
 - Membantu meningkatkan kapasitas produksi daerah
 - Meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan di masyarakat.
 - Membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



b. Susunan keanggotaan TPID Provinsi berdasarkan lampiran III huruf a Keputusan Mendagri RI No.500.05-8135 Tahun 2017, terdiri atas :

1. Ketua : Gubernur
2. Pelaksana Harian Tugas : Sekretaris Daerah Provinsi
3. Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi
4. Sekretaris : Kepala Biro yang membidangi Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi
5. Anggota:Kepala Perangkat Daerah di Provinsi yang membidangi urusan perdagangan, pertanian, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, perencanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, statistik dan perangkat daerah lainnya yang dianggap perlu.

c. TPID ini dibentuk dengan tugas dan kewajiban :

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat provinsi;
2. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
4. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten / Kota; dan/atau
5. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara tertulis setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat:
 - a) Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
 - b) Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
 - c) Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
 - d) Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
 - e) Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

7. Menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan menyampaikannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui Forum Rapat Koordinasi Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan arahan kebijakan pengendalian inflasi daerah kepada TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut disampaikan capaian penyerapan anggaran indikator indeks gini Provinsi Kepulauan Riau tahun Tahun 2022:

Tabel 3.17
Tingkat Efisiensi dari capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran yang dipergunakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran	Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Gini	0,332 indeks	0,325 indeks	81.299.340	60.690.180	74.65%

SASARAN. 2
Menurunnya Angka Kemiskinan**➤ Angka Pengangguran**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), atau yang sering dikenal sebagai angka pengangguran. Angka inilah yang seringkali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan, sehingga perkembangan TPT dari tahun ke tahun di suatu wilayah akan menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah daerah. Untuk mencapai sasaran Menurunnya angka kemiskinan ditetapkan indikator kinerja yaitu angka pengangguran/ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dengan evaluasi capaian sebagai berikut

Tabel 3.18**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya angka Kemiskinan Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka Pengangguran / Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10.1	8,23	118,51

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 8,23 persen. Tingkat pengangguran terbuka merupakan rasio antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. TPT menjelaskan seberapa banyak jumlah pengangguran dalam setiap 100 angkatan kerja.

Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 1.259.712 orang, naik 52.698 orang dibanding Agustus 2021. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,67 persen poin.

Adapun evaluasi tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau mulai Tahun 2011-2022 adalah sebagai berikut Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja.

Kriteria Penganggur Terbuka terdiri dari :

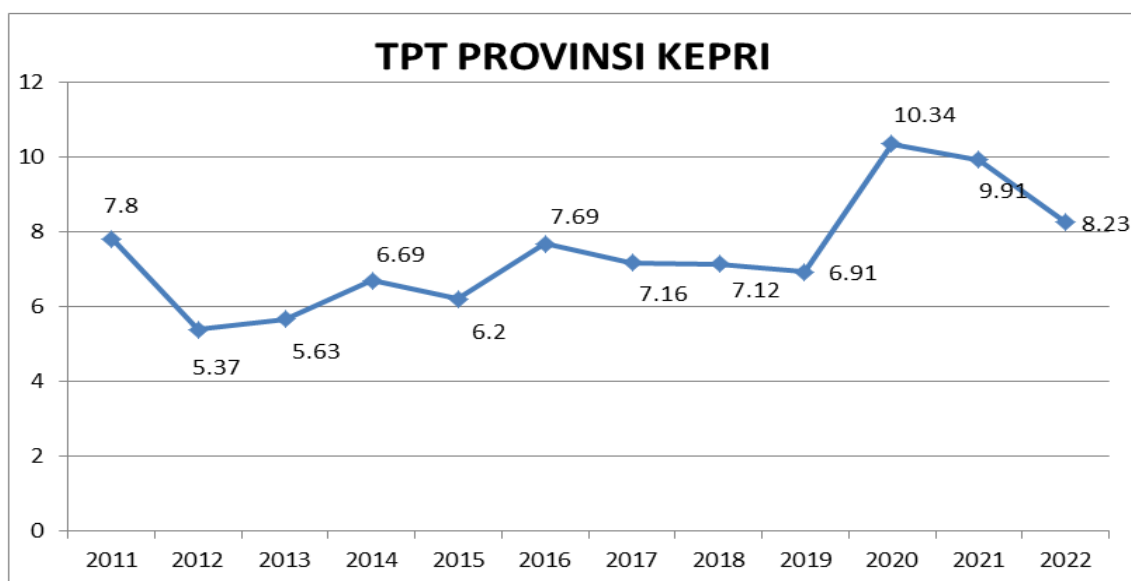
1. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan
2. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan pekerjaan
3. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Analisis indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka merupakan rasio dari jumlah penganggur terbuka yakni 103.715 orang dengan jumlah angkatan kerja yakni 1.259.712 sehingga Tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 8,23%.

Hasil analisis indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat diketahui bahwa dari target yang telah ditetapkan yakni 10,1 dan terealisasi sebesar 8,23 (**angka TPT semakin rendah semakin baik**) sehingga capaian kinerja adalah sebesar **118,51%** termasuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik**

Adapun evaluasi tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau mulai Tahun 2011-2021 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.1
Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2011-2022



Sumber: BPS Tahun 2022, Diolah



Dalam Dua Belas tahun terakhir, TPT di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Dari periode tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 3,43 poin persen, dari tahun 2020 ke 2022 terjadi penurunan sebesar 2,11 poin persen, dari tahun 2021 sampai 2022 TPT Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan sebesar 1,68 poin. Pada tahun 2018 tercatat TPT Provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,12 persen. Dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,21. Adanya Pengaruh Covid -19 diberbagai sektor menyebabkan angka TPT Tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 8,23 persen, turun 1,68 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021.

Pada tahun 2022 masih terdapat sebanyak 29.557 orang (1,61 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (2.040 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 ((3.437 orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (1966 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (22.114 orang)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Jika dilihat Berdasarkan tipe daerah, TPT wilayah perkotaan cenderung berfluktuatif pada periode Tahun 2019-2022 dimana TPT perkotaan sebesar 7,79 persen sedang di pedesaan sebesar 4,51 persen. Tahun 2020 dengan kondisi Covid-19 TPT Perkotaan maupun pedesaan mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 10.89 untuk perkotaan (naik sebesar 3.1 persen poin) dan TPT Pedesaan sebesar 5,41 (naik sebesar 0.91 persen poin) dari periode Agustus 2019. Pada Periode Agustus 2021, TPT perkotaan (10,45 persen) lebih tinggi hampir dua kali TPT di daerah pedesaan (4,43 persen). Tahun 2022 TPT perkotaan (8,52 persen) jauh lebih tinggi dari TPT di daerah pedesaan (5,88 persen). TPT daerah perkotaan menurun sebesar -1,93 persen poin, sementara itu TPT daerah pedesaan meningkat sebesar 1,45 persen poin.

Gambar 3.7



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS, 2022

Dibandingkan Agustus 2020, TPT tahun 2022 perkotaan turun sebesar -2,37 persen poin dan TPT pedesaan naik sebesar 0,47 persen poin. Namun jika dibandingkan Agustus 2021, TPT Tahun 2022 pada perkotaan dan pedesaan mengalami penurunan dan kenaikan menjadi sebesar 8,52 persen poin dan 5,88 persen poin.

Tabel 3.19

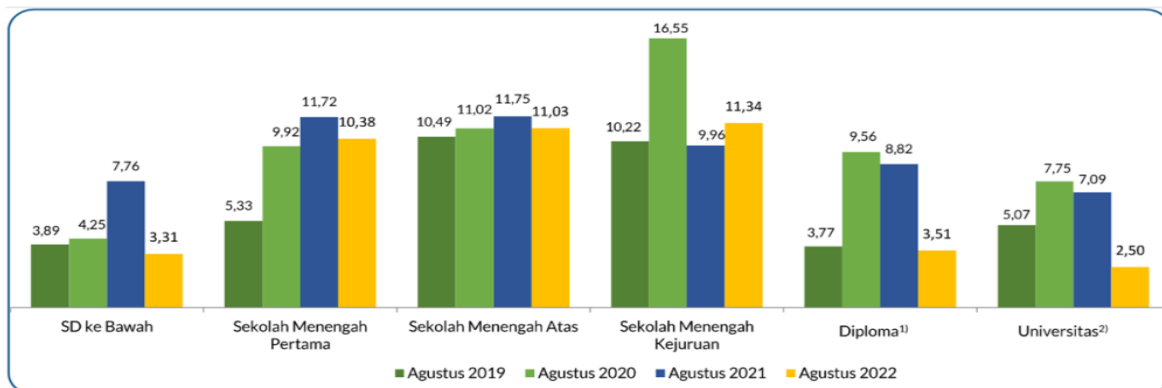
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah di Provinsi Kepulauan Riau, 2011-2022

DAERAH	TAHUN											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perkotaan	8.28	5.73	5.97	7.03	6.31	8.18	7.41	7.69	7.21	10.89	10.45	8,52
Perdesaan	5.46	3.49	3.71	4.76	5.58	4.54	5.39	2.77	3.93	5.41	4.43	5,88
TPT	7.80	5.37	5.63	6.69	6.20	7.69	7.16	7.12	6.91	10.34	9.91	8,23
JENIS KELAMIN												
Laki-Laki	6.61	5.30	3.64	5.60	6.10	7.54	7.14	7.98	7.78	10.87	9.42	7,78
Perempuan	10.07	5.51	9.67	8.87	6.41	7.97	7.19	5.54	5.90	9.38	10.72	9.03
TPT	7.80	5.37	5.63	6.69	6.20	7.69	7.16	7.12	6.91	10.34	9.91	8,23

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2022

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Tahun 2022, Pada Agustus TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 11,34 persen.

Grafikl 3.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut tingkat Pendidikan
Tahun 2019-2022



Keterangan: ¹⁾ Diploma mencakup Diploma I/II/III
²⁾ Universitas mencakup Diploma IV, S1, S2, S3

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2022

Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan universitas yaitu sebesar 2,50 persen. Dibandingkan Agustus 2021, penurunan TPT pada Tahun 2022 terjadi pada hampir semua kategori pendidikan, dengan penurunan terbesar pada kategori tamatan universitas yaitu sebesar 4,59 persen poin. Sementara peningkatan TPT terjadi pada kategori tamatan Sekolah Menengah Kejuruan yaitu sebesar 1,38 persen poin.

TPT tertinggi kedua terdapat pada Sekolah menengah Atas (SMA) sebesar 11,03 persen, Dan tamanan SMP sebesar 10,38 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang kurang terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK, SMA dan SMP. Namun begitu, berdasarkan tren karakteristik penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan terdapat penyerapan tenaga kerja berpendidikan SD dan SMA dan Diploma Pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari Tahun 2021 yaitu sebesar 23,44 poin, 7,78 persen, 1,45 persen. Dan selama proses pemulihan ekonomi akibat dampak covid-19 berdasarkan data karakteristik penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan, dimana tingkat pendidikan kategori tamatan SMP jauh mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 18,38 menjadi 12,24, atau turun sebesar 6,14 persen poin dari tahun 2021. Berikut rincian TPT pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 :



Tabel 3.20
Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Kabupaten/Kota
se Provinsi Kepri Tahun 2022

No	Kab/ Kota	Realisasi 2022		
		Jumlah Penganggur Terbuka (Orang)	Angkatan Kerja	TPT
1	Tanjungpinang	5.829	110.559	5,27
2	Bintan	5.677	82,163	6,91
3	Batam	81.121	848.628	9,56
4	Karimun	7,496	109,039	6,87
5	Lingga	1,406	45,509	3,09
6	Natuna	1,685	40,612	4,15
7	Anambas	499	23,202	2,15
Total		103.715	1.259.712	8,23

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2022

Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa TPT tertinggi pada Tahun 2021 terjadi di Kota Batam sebesar 11,64% dan yang paling rendah adalah Kabupaten Anambas sebesar 1,27%.

Adapun Evaluasi tingkat pengangguran terbuka pada setiap Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2022 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.21
Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Kabupaten/Kota
se Provinsi Kepri Tahun 2021-2022

No	Kab/ Kota	TPT		
		2021	2022	Perubahan 1 Tahun
1	Tanjungpinang	6,31	5,27	-1.04
2	Bintan	8,62	6,91	-1.71
3	Batam	11,64	9,56	-2,08
4	Karimun	7,20	6,87	-0,32

5	Lingga	4,23	3,09	-1.14
6	Natuna	5,15	4,15	-1.00
7	Anambas	1,27	2,15	0,88
Total		9.91	8.23	-1,68

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2022 maka Provinsi Kepulauan Riau masih jauh dari target RPJMD, di mana pada target RPJMD jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,5%, sedangkan realisasi sebesar 8,23%, sehingga telah mencapai 91,13%. Perbandingan target RPJMD dengan capaian tahun 2022 disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.22
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2022	Target akhir RPJMD (2026)	%
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8.23	7,50	91.13

Secara Nasional diketahui bahwa bila dibandingkan dengan 10 Provinsi lain di Sumatera, maka tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau termasuk tertinggi. Hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan TPT Nasional yakni 5,86%.

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23
TPT Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan TPT se-Indonesia Tahun 2022

Provinsi	Agustus 2020 (persen)	Agustus 2021 (persen)	Agustus 2022 (persen)	Perubahan Agt 2020-Agt 2021 (persen poin)	Perubahan Agt 2021-Agt 2022 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	6,59	6,30	6,17	-0,29	-0,13
Sumatera Utara	6,91	6,33	6,16	-0,58	-0,17
Sumatera Barat	6,88	6,52	6,28	-0,36	-0,24
Riau	6,32	4,42	4,37	-1,90	-0,05
Jambi	5,13	5,09	4,59	-0,04	-0,50
Sumatera Selatan	5,51	4,98	4,63	-0,53	-0,35
Bengkulu	4,07	3,65	3,59	-0,42	-0,06
Lampung	4,67	4,69	4,52	0,02	-0,17
Kepulauan Bangka Belitung	5,25	5,03	4,77	-0,22	-0,26
Kepulauan Riau	10,34	9,91	8,23	-0,43	-1,68
DKI Jakarta	10,95	8,50	7,18	-2,45	-1,32
Jawa Barat	10,46	9,82	8,31	-0,64	-1,51
Jawa Tengah	6,48	5,95	5,57	-0,53	-0,38
D.I. Yogyakarta	4,57	4,56	4,06	-0,01	-0,50
Jawa Timur	5,84	5,74	5,49	-0,10	-0,25
Banten	10,64	8,98	8,09	-1,66	-0,89
Bali	5,63	5,37	4,80	-0,26	-0,57
Nusa Tenggara Barat	4,22	3,01	2,89	-1,21	-0,12
Nusa Tenggara Timur	4,28	3,77	3,54	-0,51	-0,23
Kalimantan Barat	5,81	5,82	5,11	0,01	-0,71
Kalimantan Tengah	4,58	4,53	4,26	-0,05	-0,27
Kalimantan Selatan	4,74	4,95	4,74	0,21	-0,21
Kalimantan Timur	6,87	6,83	5,71	-0,04	-1,12
Kalimantan Utara	4,97	4,58	4,33	-0,39	-0,25
Sulawesi Utara	7,37	7,06	6,61	-0,31	-0,45
Sulawesi Tengah	3,77	3,75	3,00	-0,02	-0,75
Sulawesi Selatan	6,31	5,72	4,51	-0,59	-1,21
Sulawesi Tenggara	4,58	3,92	3,36	-0,66	-0,56
Gorontalo	4,28	3,01	2,58	-1,27	-0,43
Sulawesi Barat	3,32	3,13	2,34	-0,19	-0,79
Maluku	7,57	6,93	6,88	-0,64	-0,05
Maluku Utara	5,15	4,71	3,98	-0,44	-0,73
Papua Barat	6,80	5,84	5,37	-0,96	-0,47
Papua	4,28	3,33	2,83	-0,95	-0,50
Indonesia	7,07	6,49	5,86	-0,58	-0,63

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2022

Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berbagai kebijakan pemerintah dan usaha terkait penciptaan lapangan kerja tampaknya masih perlu dioptimalkan. Secara absolut, jumlah pengangguran di Kota Batam turun sekitar 81.121 orang. Sehingga, angka TPT Kota Batam menurun dari Agustus 2020 menjadi 11,64 persen pada Agustus 2021. Dari Tabel diatas dapat diketahui tingkat pengangguran terbuka Tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka paling tinggi adalah di Kota Batam sebesar 11,64 dan yang paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yakni 2,15 %. Namun secara keseluruhan



dapat tergambar bahwa terjadi penurunan TPT di hampir kerseluruhan kabapten/kota kecuali kepulauan Anambas yang sedikit mengalami kenaikan dari 1,27 menjadi 2.15. pada Tahun 2022.

Pada Tahun 2022 Penduduk bekerja naik sebanyak 68.578 orang dan pengangguran turun sebanyak 15.880 orang. Meskipun Jumlah Angkatan Kerja beserta komponennya secara absolut mengalami kenaikan, namun secara kualitas indikator ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau justru menunjukkan perbaikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2022 sebesar 68,94 persen mengalami kenaikan 0,67 persen poin dibandingkan Agustus 2021. Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk usia kerja maupun sebagai penganggur. Peningkatan nilai TPAK diikuti dengan naiknya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Demikian juga TPT berdasarkan Jenis kelamin Pada Agustus 2022, TPT laki-laki sebesar 7,78 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 9,03 persen. TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2021 , yaitu berturut-turut sebesar 1,64 persen poin dan 1,69 persen poin. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (8,52 persen) jauh lebih tinggi dari TPT di daerah perdesaan (5,88 persen). TPT daerah perkotaan menurun sebesar 1,93 persen poin, sementara itu TPT daerah perdesaan meningkat sebesar 1,45 persen poin.

Adapun target yang ditetapkan dapat tercapai dikarenakan adanya kondisi perekonomian yang semakin membaik paska berkurangnya dampak eksternal yaitu covid-19 yang secara internasional dan nasional sangat berdampak kepada perekonomian sehingga sangat berpengaruh kepada kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data BPS Tahun 2022 secara umum permasalahan yang dihadapi perusahaan selama pandemic covid-19 berangsur membaik dimana adanya penurunan angka pengangguran yang disebabkan oleh dampak covid-19, Sementara Tidak Bekerja, karena COVID-19, Penduduk Bekerja Mengalami Pengurangan Jam Kerja karena COVID-19.

TPT di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 mengalami Penurunan jika dibandingkan dengan TPT tahun 2021, hal ini dipengaruhi oleh:

1. Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2022 sebanyak 29.557 orang, mengalami penurunan sebanyak 179.949 orang atau sebesar 85,89 persen dibandingkan dengan Agustus 2021. Komposisi penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 terdiri dari orang pengangguran karena COVID-19; 2.040



orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19; 3.437 orang, sementara tidak bekerja karena COVID-19; 1.966 orang dan 22.114 penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Keempat komponen tersebut mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2021. Penurunan terbesar adalah komponen penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 128.530 orang.

2. Berdasarkan data BPS Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu a) Penganggur; b) Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020; c) Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja; dan d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 bagi mereka yang berhenti bekerja. Berdasarkan table **Dampak Covid-19 terhadap penduduk Usia Kerja** penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2022 sebanyak 29.557 orang, mengalami penurunan sebanyak 179.949 orang atau sebesar 85,89 persen dibandingkan dengan Agustus 2021. Apabila dilihat dari komponen dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja, sebanyak 2.040 orang merupakan pengangguran karena COVID-19; 3.437 orang bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19; 1.966 orang sementara tidak bekerja karena COVID-19; dan 22.114 orang penduduk bekerja mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19.

Tabel 3.24
Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Berdasarkan Tahun di Provinsi Kepulauan Riau, Agustus 2022

Status Keadaan ketenagakerjaan	2021		2022		Persen poin
	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubaha n 2021 - 2022	
a. Pengangguran Karena Covid-19	42.210	41275	2040	-39.235	-95,06
b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19	8.587	5889	3437	-2.452	-41,64
c. Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-	12.586	11.698	1966	-9732	- 83,19

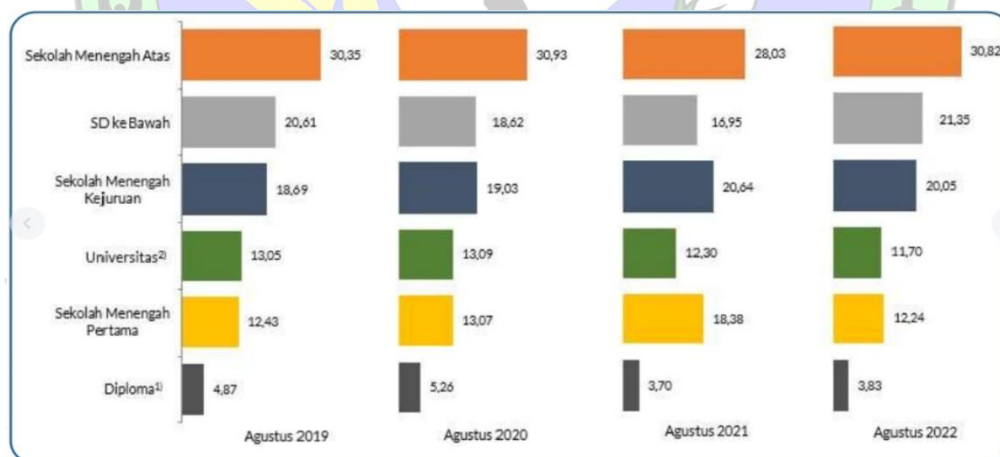


19					
d. Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	225.184	150.644	22.114	-128.530	- 85,32
Total					
Penduduk Usia Kerja (PUK) terdampak covid	288.567	209.506	29.557	-179.949	-85,89
Total	1.710.594	1.767.979	1.827.295	-59.316	3,36
Persentase terhadap PUK	16,87	11,85	1,62	-10,23	1,61

Sumber : Diolah dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022

3. Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2022 didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas Umum sebanyak 356,312 orang (30,82 persen) dan Sekolah Dasar sebanyak 246,846 orang (21,35 persen). Kemudian disusul tamatan sekolah Menengah kejuruan sebesar 20,05 persen Dalam tahun terakhir, Penduduk yang bekerja sebanyak 1.155 997 orang, meningkat sebanyak 68.578 orang dari Agustus 2021.

Grafik 3.3
Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2019 - 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik prov. Kepri, Tahun 2022

4. Adanya perubahan kondisi tenaga kerja selama Tahun 2022 tidak terlepas dari hal-hal sebagai berikut
- a. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Agustus 2022 masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 25,01 persen dan sektor Perdagangan sebesar 17,61 persen. berdasarkan tren lapangan pekerjaan selama Agustus 2021 - Agustus 2022, lapangan pekerjaan yang



mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (43,71 persen poin) dan Jasa Pendidikan (26,70 persen poin). Sedangkan lapangan pekerjaan yang mengalami kenaikan utamanya pada Informasi dan Komunikasi, L Real, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (43,71) Estat (49.03persen poin) dan jasa lainnya (34,38 persen poin).

Tabel 3.25
Karakteristik Penduduk Bekerja Provinsi Kepulauan Riau
menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020 –2022

Karakteristik Penduduk Bekerja	Agustus 2020		Agustus 2021		Agustus 2022		Perubahan Ags 2020–Ags 2022		Perubahan Ags 2021–Ags 2022	
	orang	persen (%)	orang	persen (%)	orang	persen (%)	orang	persen poin ¹⁾	orang	persen poin ¹⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Lapangan Pekerjaan Utama										
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	91014	8,95	97868	900	97868	900	-894	-0,98	-7748	-7,92
B. Pertambangan dan Penggalian, D. Pengadaan Listrik dan Gas, E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	23770	2,34	19905	1,83	19905	1,83	-8472	-35,64	-4607	-23,14
C. Industri Pengolahan	231405	22,76	271944	25,01	271944	25,01	66447	28,71	25908	9,53
F. Konstruksi	69780	6,86	72193	6,64	72193	6,64	12794	18,33	10381	14,38
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	176060	17,32	192183	17,67	192183	17,67	25149	14,28	9026	4,70
H. Transportasi dan Pergudangan	69674	6,85	65834	6,05	65834	6,05	3565	5,12	7405	11,25
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	80509	7,92	81992	7,54	81992	7,54	37323	46,36	35840	43,71
J. Informasi dan Komunikasi, L Real Estat	12759	1,26	16053	1,48	16053	1,48	11165	87,51	7871	49,03
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	17523	1,72	18051	1,66	18051	1,66	-274	-1,56	-802	-4,44
M,N. Jasa Perusahaan	23945	2,36	28141	2,59	28141	2,59	7046	29,43	2850	10,13
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	62793	6,18	65463	6,02	65463	6,02	-3144	-5,01	-5814	-8,88
P. Jasa Pendidikan	65819	6,47	72063	6,63	72063	6,63	-12998	-19,75	-19242	-26,70
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	24791	2,44	30449	2,80	30449	2,80	-5838	-23,55	-11496	-37,75
R,S,T,U. Jasa Lainnya	66758	6,57	55280	5,08	55280	5,08	7528	11,28	19006	34,38
Jumlah	1016600	100,00	1087419	100,00	1155997	100,00	133397	—	68578	—

Sumber: Badan Pusat Statistik prov. Kepri, Tahun 2022

- b. Kondisi ketenagakerjaan di beberapa kabupaten/kota selama pandemi covid menunjukkan kurang terserapnya tenaga kerja akibat minimnya kesempatan kerja. Seperti Kota Batam pada Tahun 2022 masih merupakan pusat aktifitas perekonomian di Kepulauan Riau. Dimana menunjukan penurunan angka pengangguran yang cukup signifikan sebesar 2,08 persen dari tahun 2021. Kondisi ini disebabkan beberapa peningkatan produktifitas disektor formal dan informal. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja seiring dengan meningkatnya penduduk yang bekerja disektor formal dan sektor informal dimana pada tahun 2022 pekerja di sektor formal bertambah sebesar 31.580 orang atau perubahan sebesar 4.48 persen dan sektor informal kenaikan sebesar 9,66 persen atau bertambah sebesar 36.998 dari tahun 2021.

- c. Indikator lain yang lebih mendalam menyangkut angkatan kerja adalah pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Indikator ini mampu menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, hal ini diindikasikan dari jam kerja rendah. Pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua kelompok yaitu pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Penduduk yang dianggap sebagai pekerja penuh waktu (full time worker), yaitu penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas per minggu, pada Agustus 2022 jumlahnya mencapai 916.885 (79,32 persen). Dibandingkan dengan Agustus 2021 mengalami kenaikan sebesar 10,64 persen poin. Sementara itu dalam setahun terakhir, pekerja tidak penuh (jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) berkurang sebanyak 19.628 orang (-7,59 persen) yaitu dari 258.740 orang pada Agustus 2021 menjadi 239.112 (20,68 %) orang pada Agustus 2022. DAPAT dilihat table berikut :

Tabel 3.26
Karakteristik Penduduk Bekerja
Berdasarkan Pekerjaan Penuh/Tidak Penuh Tahun 2021-2022

NO	Karakteristik	2021 (org)	2022 (org)	Perubahan 2021-2022	persen
1	Pekerja Penuh > 35 Jam	828.679	916.885	88.206	10,64
2	Pekerja Tidak Penuh (1-34 Jam)	258.740	239.112	- 19.628	-7,59

Sumber, Bursa Resmi Statistik Tahun 2022

A. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk mengatasi TPT (Tingkat pengangguran terbuka), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan program dan kegiatan pelatihan berbasis inkubasi bisnis dan juga wirausaha baru berbasis ekonomi digital yang diberdayakan serta mengembangkan model pelatihan yang ada ke arah membangun jiwa wirausaha. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mengadakan pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan mendorong siswa SMK yang mengikuti pemagangan, sehingga ketika lulus nanti mereka siap bekerja. Diharapkan nantinya lulusan SMK maupun BLK mampu mengisi pasar kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pada tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan melakukan kerja sama dengan perusahaan atas kebutuhan komposisi kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, sehingga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan atas dasar permintaan, bukan penawaran. Di samping itu, untuk meningkatkan tingkat partisipasi

angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi ibu rumah tangga untuk menjadi pelaku ekonomi
2. Meningkatkan pelatihan-pelatihan berbasis masyarakat.
3. Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha dan dinas terkait.

Adapun program yang dilaksanakan di Tahun 2022 untuk mendukung kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ada 2, yaitu:

1. Program Penempatan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan dan Produktivitas

Tabel 3.27
Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pendukung Target Indikator Angka Pengangguran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN			
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Efesiesi	Ket
1	Menurunnya angka Kemiskinan	Angka Pengangguran	10,1	8,23	118,51	5,247,503,800	5,096,582,817	97,12%	Efisien

Hasil analisis Sasaran Strategis menurunnya angka kemiskinan dengan indikator Angka Pengangguran Terbuka (TPT) diketahui dari target yang telah ditetapkan yakni 10,1 terealisasi sebesar 8,23 (angka TPT semakin rendah semakin baik) sehingga capaian kinerja adalah sebesar 81,48% Kinerja dalam hal ini termasuk dalam **kategori kinerja Baik**. Demikian juga realisasi anggaran yang mendukung indikator angka Pengangguran adalah **Pertama Program Pelatihan dan Produktivitas** dengan anggaran sebesar Rp. 5.182.342.800 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.045.297.449 (97,35 persen). **Kedua Program Penempatan Tenaga Kerja** Rp. 65.161.000 dengan realisasi sebesar Rp. 51,285,368 (98,71 persen). Untuk kedua program tersebut dalam pencapaian target indikator angka pengangguran sebesar Rp. 5.247.503.800 dengan realisasi Rp. 5,096,582,817 atau sebesar 97,12 persen. Realisasi anggaran tersebut termasuk kategori **Sangat Tinggi (ST)**.

2. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Pembangunan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi di Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari kondisi perekonomian makro, dimana pertumbuhan tersebut

belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan utama di bidang ketenagakerjaan baik menyangkut optimalisasi pendayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja.

Masalah pokok penyelenggaraan urusan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi adalah:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup tinggi.
2. Rendahnya kesesuaian kompetensi antara pencari kerja dengan kebutuhan industri.

Sedangkan masalah yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah:

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang tenaga kerja.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- c. Belum terpenuhinya dukungan anggaran dalam mengoptimalkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan

Sedangkan permasalahan masing-masing bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya yaitu :

- ✓ Masih terbatasnya tempat uji kompetensi (TUK) beserta sumber daya pendukungnya.
- ✓ Belum optimalnya produktifitas kerja kepada masyarakat maupun perusahaan.
- ✓ Terbatasnya alokasi dana pelatihan kerja dan produktivitas dibandingkan jumlah kebutuhan.
- ✓ Minimnya SDM fungsional pengantar kerja sehingga pelayanan penempatan tenaga kerja belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- ✓ Sistem, mekanisme, dan sarpras informasi kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal dan efektif.
- ✓ Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda dan berpendidikan kurang tertarik di sektor informal.
- ✓ Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja

formal dan informal belum optimal.

- ✓ Minimnya kualitas dan kuantitas instruktur dan sumber daya manusia (SDM) pengelola pelatihan sehingga berdampak terhadap pemasaran program pelatihan kepada masyarakat, dunia usaha/industri dan dunia pendidikan.
- ✓ Masih terbatasnya modul dan standar-standar pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan.
- ✓ Masih belum berfungsinya BLK secara maksimal.
- ✓ Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelatihan sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang sehingga kebutuhan dunia usaha terhadap lulusan BLK belum optimal terpenuhi
- ✓ Terbatasnya alokasi dana pelayanan perluasan kesempatan kerja dibandingkan dengan jumlah penganggur yang ada

➤ **Angka Kemiskinan**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Persentase penduduk miskin merupakan perbandingan jumlah penduduk miskin provinsi dengan jumlah penduduk provinsi. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin provinsi dibagi dengan jumlah penduduk provinsi, dikali seratus. Angka Kemiskinan dikatakan menurun jika persentase penduduk miskin pada saat dievaluasi lebih rendah daripada persentase penduduk miskin pada tahun atau bulan yang dijadikan perbandingan. Dalam hal ini, persentase penduduk miskin pada tahun 2022 akan dibandingkan dengan tahun 2021.

Tabel 3.28
Evaluasi Capaian Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kemiskinan	6,01%	6,03%	99,67%

Evaluasi terhadap Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022 dapat digambarkan dari jumlah penduduk miskin provinsi (148.890 orang) dibagi dengan jumlah penduduk provinsi (2.469.154 orang) dengan nilai persentase 6,03%.



Hasil Evaluasi Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022 dengan target 6,01% dapat tercapai sebesar 6,03% sehingga capaian kinerja sebesar 99,67% atau dalam kategori kinerja relatif **sangat baik**.

Capaian indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.29
Program/Kegiatan Pendukung Capaian Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		Program (outcome)				
		Kegiatan (output)				
A	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%	0,17	0,42	250,00%
		Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	0,79	9,20	1163,80%
		Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	31,63	36,92	116,73%
1	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	KK	150	465	310,00%
		Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	KK	60	60	100,00%
		Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	KK	1.000	11.638	1163,80%



No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		Program (outcome)				
		Kegiatan (output)				
		Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	KK	39.996	46.686	116,73%
		Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan	dok	1	1	100,00%
a	Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	KK	400	5.917	1479,25%
		Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	KK	300	3.921	1307,00%
		Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	KK	300	1.800	600,00%
		Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	KK	39,996	46.686	116,73%
		Terevaluasinya pendistribusian raskin/rastra	lok	7	7	100,00%
b	Subkegiatan Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan	dok	1	1	100,00%



No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		Program (outcome)				
		Kegiatan (output)				
c	Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	KK	50	190	380,00%
		Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	KK	50	125	250,00%
		Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	KK	50	150	300,00%
		Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme Kube	KK	20	20	100,00%
		Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme Kube	KK	20	0	0,00%
		Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme Kube	KK	20	40	200,00%

Berikut Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin dari tahun 2021-2022 dan Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah:

Tabel 3.30
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Penduduk Miskin Dari Tahun 2021-2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Persentase Penduduk Miskin	5,75% (137.750 org)	6,03% (148.890 org)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan persentase penduduk miskin dari tahun 2021 ke tahun 2022, yaitu bertambah 11.140 orang atau (0,28%).

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Kenaikan angka kemiskinan ini kemungkinan dipengaruhi oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada awal September 2022 lalu. Karena harga BBM naik, ongkos produksi naik, harga barang naik, pengeluaran masyarakat naik. Kenaikan harga paling terasa pada beberapa bahan pokok, antara lain beras, daging ayam, telur ayam, cabai merah hingga minyak goreng.

Selain faktor kenaikan BBM, kenaikan angka kemiskinan kemungkinan juga dipengaruhi oleh faktor situasi pasca pandemi Covid-19 sehingga kegiatan perekonomian belum berjalan seperti sebelumnya. Dengan demikian, penurunan pendapatan dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat pada lapisan bawah.

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Memperbarui data penduduk miskin.
2. Integrasi penyaluran bansos

Di banyak tempat, berbagai bentuk Bantuan Sosial yang berbeda-beda jenis dan jumlahnya telah menimbulkan ketegangan sosial di sejumlah daerah. Hal ini diperparah dengan basis data Bantuan Sosial, khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang digunakan oleh pemerintah daerah yang belum mencakup masyarakat yang sebelumnya tidak terdata namun kondisi ekonominya memburuk akibat kenaikan BBM dan situasi pascapandemi Covid-19. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh pemerintah ialah menggandeng bank-bank pemerintah dan PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan bantuan sosial kepada penerima bantuan.

3. Meningkatkan anggaran bantuan sosial dan memperluas jumlah penerima bantuan kepada penduduk yang jatuh miskin akibat kenaikan BBM dan dampak situasi pasca pandemi Covid-19.
4. Meningkatkan anggaran bantuan modal usaha bagi penduduk miskin secara umum untuk meningkatkan kemandiriannya.



Akuntabilitas Keuangan Dinas Sosial Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Program (outcome)							
		Kegiatan (output)							
A	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%	0,17	0,42	250,00%	5.643.752.928	5.596.350.933	99,16%
		Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	0,79	9,20	1163,80%			
		Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	31,63	36,92	116,73%			
1	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	KK	150	465	310,00%	5.643.752.928	5.596.350.933	99,16%
		Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	KK	60	60	100,00%			
		Jumlah keluarga miskin yang menerima	KK	1.000	11.638	1163,80%			



No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Program (outcome)							
		Kegiatan (output)							
		bantuan kesejahteraan sosial lainnya							
		Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	KK	39.996	46.686	116,73%			
		Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan	dok	1	1	100,00%			
a	Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	KK	400	5.917	1479,25%	2.852.554.883	2.815.991.474	98,72%
		Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	KK	300	3.921	1307,00%			
		Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	KK	300	1.800	600,00%			



No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Program (outcome)							
		Kegiatan (output)							
		Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	KK	39,996	46.686	116,73%			
		Terevaluasinya pendistribusian raskin/rastra	lok	7	7	100,00%			
b	Subkegiatan Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan	dok	1	1	100,00%	277.655.103	272.322.014	98,08%
c	Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	KK	50	190	380,00%	2.513.542.942	2.508.037.445	99,78%
		Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	KK	50	125	250,00%			
		Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	KK	50	150	300,00%			



No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Program (outcome)							
		Kegiatan (output)							
		Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme Kube	KK	20	20	100,00%			
		Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme Kube	KK	20	0	0,00%			
		Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme Kube	KK	20	40	200,00%			



A. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas *efisiensi sumber daya biaya* dan *sumber daya manusia*. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.5.596.350.933,00 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp.5.643.752.928,00 Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 0,84%. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2022 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya, sama halnya pada level kegiatan, efisiensi penggunaan sumber daya hanya 0,84%.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping PKH sebagai pendamping program untuk memastikan program berjalan dengan baik.

B. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 1 program, 1 kegiatan dan 3 Sub kegiatan. Adapun pencapaian program/kegiatan tersebut diuraikan di bawah ini :

➤ **Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.5,643,752,928,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5,596,350,933,- dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 99,16%, yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.



Keluaran yang dicapai :

- Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 465 KK.
- Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 60 KK.
- Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya sebanyak 11.638 KK.
- Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial sebanyak 46.686 KK.

Kenaikan angka kemiskinan ini kemungkinan dipengaruhi oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada awal September 2022 lalu. Karena harga BBM naik, ongkos produksi naik, harga barang naik, pengeluaran masyarakat naik. Kenaikan harga paling terasa pada beberapa bahan pokok, antara lain beras, daging ayam, telur ayam, cabai merah hingga minyak goreng.

Selain faktor kenaikan BBM, kenaikan angka kemiskinan kemungkinan juga dipengaruhi oleh faktor situasi pascapandemi Covid-19 sehingga kegiatan perekonomian belum berjalan seperti sebelumnya. Dengan demikian, penurunan pendapatan dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat pada lapisan bawah.

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Memperbarui data penduduk miskin.
2. Integrasi penyaluran bansos

Di banyak tempat, berbagai bentuk Bantuan Sosial yang berbeda-beda jenis dan jumlahnya telah menimbulkan ketegangan sosial di sejumlah daerah. Hal ini diperparah dengan basis data Bantuan Sosial, khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang digunakan oleh pemerintah daerah yang belum mencakup masyarakat yang sebelumnya tidak terdata namun kondisi ekonominya memburuk akibat kenaikan BBM dan situasi



pascapandemi Covid-19. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh pemerintah ialah menggandeng bank-bank pemerintah dan PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan bantuan sosial kepada penerima bantuan.

3. Meningkatkan anggaran bantuan sosial dan memperluas jumlah penerima bantuan kepada penduduk yang jatuh miskin akibat kenaikan BBM dan dampak situasi pascapandemi Covid-19.
4. Meningkatkan anggaran bantuan modal usaha bagi penduduk miskin secara umum untuk meningkatkan kemandiriannya.

Tabel 3.31
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022
dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022
1	Persentase Penduduk Miskin	6,01%	6,03%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian target RPJMD 2021 s.d 2026, terdapat ketidapencapaian target penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Kepri sebesar 0,02%.

Tabel 3.32
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Kategori Perkotaan dan Perdesaan
September 2021 - September 2022

Daerah/ Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
<u>Perkotaan</u>		
September 2021	119.310	5,37
Maret 2022	122.600	5,68
September 2022	119.520	5,46
<u>Perdesaan</u>		
September 2021	18.440	10,45
Maret 2022	29.080	10,68



September 2022	29.370	10,63
Total		
September 2021	137.750	5,75
Maret 2022	151.680	6,24
September 2022	148.890	6,03

Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode September 2021 – September 2022, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan selalu mengalami kenaikan, sedangkan di daerah perkotaan mengalami kenaikan pada Maret 2022 dan kembali menurun pada September 2022. Meskipun jumlah penduduk miskin di perdesaan selalu mengalami kenaikan pada periode September 2021 – September 2022, namun persentasenya turun 0,05 persen bila dibandingkan Maret 2022.

Adapun Persentase Penduduk Miskin pada setiap Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.33
Persentase Penduduk Miskin Per Kabupaten/Kota
Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	P0	P1	P2	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Karimun	6,87	0,78	0,13	16.440	239.301
2	Bintan	6,44	0,91	0,16	10.670	165.683
3	Natuna	5,32	1,06	0,25	4.320	81.203
4	Lingga	14,05	2,53	0,64	12.700	90.391
5	Kepulauan Anambas	7,51	0,92	0,22	3.290	43.808
6	Kota Batam	5,19	0,76	0,17	82.590	1.591.329
7	Kota Tanjungpinang	9,85	1,64	0,44	21.670	220.000
Kepulauan Riau		6,03	0,886	0,186	148.890	2.469.154

Keterangan :

P0 = Persentase Kemiskinan

P1 = Indeks Kedalaman Kemiskinan

P2 = Indeks Keparahan Kemiskinan



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022 paling besar adalah di Kabupaten Lingga (14,05%) dan yang paling sedikit di Kota Batam (5,19%). Sedangkan jumlah penduduk miskin Tahun 2022 paling besar adalah di Kota Batam (82.590 Jiwa) dan yang paling sedikit di Kabupaten di Kepulauan Anambas (3.290 Jiwa). Di samping itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2022 paling besar adalah di Kabupaten Lingga (2,53%) dan yang paling sedikit di Kota Batam (0,76%). Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2022, yakni paling besar adalah di Kabupaten Lingga (0,64%) dan yang paling sedikit di Kabupaten Karimun (0,13%).

Tabel 3.34
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin
Se-Indonesia Semester II
Tahun 2022

No	PROVINSI	SEMESTER 2 (SEPTEMBER)
1	BALI	4,53
2	KEP. BANGKA BELITUNG	4,61
3	DKI JAKARTA	4,61
4	KALIMANTAN SELATAN	4,61
5	KALIMANTAN TENGAH	5,22
6	KEP. RIAU	6,03
7	SUMATERA BARAT	6,04
8	BANTEN	6,24
9	MALUKU UTARA	6,37
10	KALIMANTAN TIMUR	6,44
11	KALIMANTAN BARAT	6,81
12	RIAU	6,84
13	KALIMANTAN UTARA	6,86
14	SULAWESI UTARA	7,34
15	JAMBI	7,70
16	JAWA BARAT	7,98



No	PROVINSI	SEMESTER 2 (SEPTEMBER)
17	SUMATERA UTARA	8,33
18	SULAWESI SELATAN	8,66
19	JAWA TIMUR	10,49
20	JAWA TENGAH	10,98
21	SULAWESI TENGGARA	11,27
22	LAMPUNG	11,44
23	DI YOGYAKARTA	11,49
24	SULAWESI BARAT	11,92
25	SUMATERA SELATAN	11,95
26	SULAWESI TENGAH	12,30
27	NUSA TENGGARA BARAT	13,82
28	BENGKULU	14,34
29	ACEH	14,75
30	GORONTALO	15,51
31	MALUKU	16,23
32	NUSA TENGGARA TIMUR	20,23
33	PAPUA BARAT	21,43
34	PAPUA	26,80
INDONESIA		9,57

Sumber: <https://kepri.bps.go.id>

Berdasarkan Persentase Kemiskinan *Update* per September 2022, Provinsi Kepulauan Riau berada di peringkat terendah ke-6 se-Indonesia (6,03%).



SASARAN. 3

Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan kondisi lingkungan hidup Indonesia. IKLH dapat digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. IKLH difokuskan pada media lingkungan air, udara dan tutupan lahan. Dokumen ini menggambarkan kondisi kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan pada 34 provinsi termasuk Provinsi Kepulauan Riau yang pengukurannya dilakukan pada tahun 2022. Kualitas air diukur pada sungai prioritas nasional di 34 provinsi, kualitas udara diukur pada kawasan-kawasan perumahan, transportasi, industri, dan perkantoran di kabupaten/ kota, sedangkan kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan indeks tutupan lahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Dengan cara mengetahui media lingkungan yang masih kurang baik, sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara lebih tepat sehingga akan lebih efektif dan efisien. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi oleh Kementerian Lingkungan Hidup adalah pengembangan dari konsep yang dikembangkan oleh Virginia Commonwealth University (VCU) dan BPS dengan menggunakan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan sebagai indikator. Penggabungan parameter ini dimungkinkan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemaran Udara.



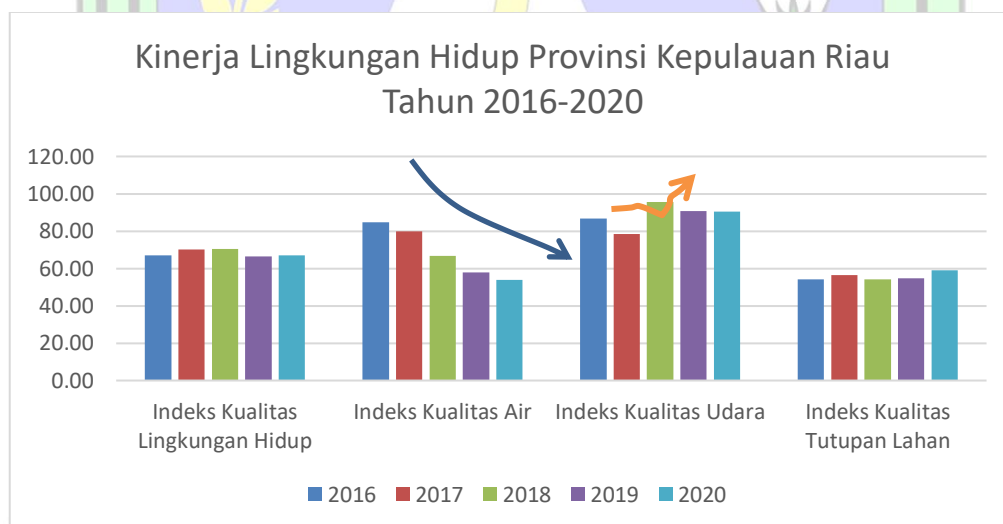
Lingkungan hidup berkaitan dengan menjaga kualitas lingkungan untuk kelestarian pembangunan. Selama 5 tahun belakangan kondisi lingkungan hidup di Kepulauan Riau terus menunjukkan penurunan kualitas. Ukuran kualitas lingkungan hidup menunjukkan angka yang terus menurun, baik dari air, udara maupun dari tutupan lahan. Berikut disajikan kinerja urusan lingkungan hidup.

Tabel 3.35

Kinerja Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,97	70.19	70.34	66.50	67,00
2.	Indeks Kualitas Air	84.67	80.00	66.67	57.85	54,00
3.	Indeks Kualitas Udara	86.61	78.60	95.47	90.83	90,59
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54.31	56.53	54.24	54.75	59,06

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau 2021



Grafik 3.4 Kinerja Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Tabel 3.35. menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara keseluruhan mengalami tren yang cenderung bergerak turun setiap tahunnya. Meskipun pada tahun 2020 kembali menguat secara komposit. Namun demikian, Indeks kualitas air secara konsisten mengalami penurunan sejak tahun 2016-2020 meskipun di saat yang bersamaan indeks kualitas udara juga ikut terus naik secara signifikan.

Kecenderungan penurunan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh beberapa hal yaitu :



- 1) Adanya pencemaran limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/*sludge oil* di wilayah pesisir Kota Batam dan Kabupaten Bintan.
- 2) Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha/kegiatan dalam hal pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- 3) Belum optimalnya penanganan limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/*sludge oil* yang mencemari di wilayah pesisir khususnya wilayah pantai Kota Batam dan Kabupaten Bintan dikarenakan keterbatasan anggaran.
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan amanat Gubernur Kepulauan Riau melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 742 Tahun 2018 Tentang Tim Daerah Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan tidak mendapat anggaran.
- 5) Minimnya penanganan dan sarana/prasarana/fasilitas pengelolaan limbah B3 (limbah medis yang bersumber dari Fasyankes) di Provinsi Kepulauan Riau.
- 6) Rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga banyak sampah rumah tangga dan sejenisnya yang mencemari laut, khususnya dalam radius 0-12 mil laut yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
- 7) Pencemaran udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Kepulauan Riau dan sekitarnya, dan juga banyaknya kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi kendaraan.

Sedangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2021 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan, terutama indeks kualitas air, walaupun tidak begitu signifikan.

Berikut dapat dilihat capaian kinerja Lingkungan Hidup Dasar dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 :

Tabel 3.36

**Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,73	74,13	106,31
2.	Indeks Kualitas Air Laut	76,75	85,56	111,48
3.	Indeks Kualitas Air	56,70	56,79	100,16



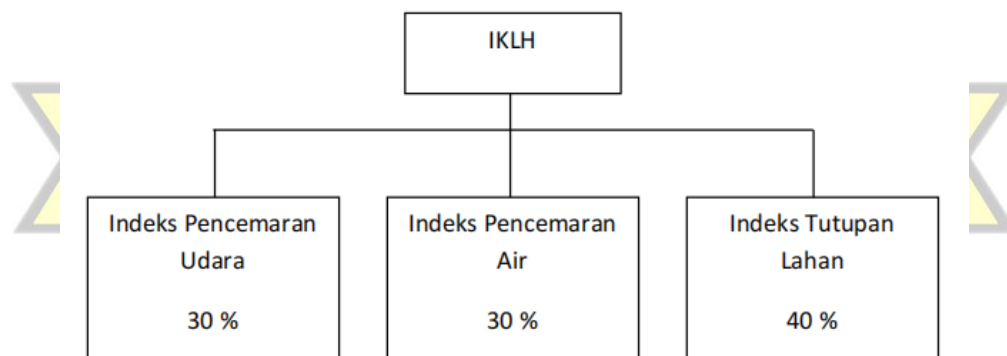
4.	Indeks Kualitas Udara	88,25	90,27	102,29
5.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,08	58,00	98,17

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau 2022

Analisis terhadap capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dapat digambarkan yaitu meningkatnya kualitas air laut, kualitas air bersih dan udara sedangkan kualitas tutupan lahan pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan. Hasil analisis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2022 dengan target sebesar 69,73 dapat tercapai yaitu sebesar 74,13 sehingga capaian kinerja sebesar 106,31% atau dalam kategori kinerja Baik.

Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ini disebabkan karena meningkatnya indeks kualitas air laut dan air bersih serta kualitas udara, tentu saja hal ini tidak terlepas dengan terlaksananya program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada Tahun 2022. Capaian kinerja dibidang lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan dengan formula penjumlahan dari indeks kualitas air laut, indeks kualitas air bersih, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan.

Struktur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari 3 (tiga) indikator, hal ini mengingat perlu adanya keseimbangan antara indikator yang mewakili green issues (isu hijau) dan brown issues (isu coklat).



Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$IKLH = (IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (IKTL \times 40\%)$$



Secara umum indikator kinerja sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sudah tercapai dengan sangat baik.

Mulai tahun 2020, indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO_3 , dan Fecal Coli; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO_2 dan NO_2 ; (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung; dan (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

IKLH Kabupaten/ Kota	$\text{IKLH} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$
IKLH Provinsi	$\text{IKLH} = (0.340 \times \text{IKA}) + (0.428 \times \text{IKU}) + (0.133 \times \text{IKL}) + (0.099 \times \text{IKAL})$
IKLH Nasional	$\text{IKLH} = (0.340 \times \text{IKA}) + (0.428 \times \text{IKU}) + (0.133 \times \text{IKL}) + (0.099 \times \text{IKAL})$

Berikut realisasi serta capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2022

Tabel 3.37
Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2022

Indikator kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,80	73,19	104,85	69,73	74,13	106,31
Indeks Kualitas Air Laut	76,10	75,68	99,44	76,75	85,56	111,48
Indeks Kualitas Air	56,60	55,15	97,43	56,70	56,79	100,16
Indeks Kualitas Udara	88,14	90,91	103,14	88,25	90,27	102,29
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,07	60,39	102,23	59,08	58,00	98,17



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi dan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 ke tahun 2022 terdapat peningkatan yaitu pada tahun 2021 dengan target 69,80 terealisasi sebesar 73,19 dengan persentase capaian 104,85%, artinya naik sebesar 3,39 poin, sedangkan pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi 106,31% dari target sebesar 69,74 dengan capaian sebesar 74,13 naik 4.40 point. Adapun perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2022 sebagai berikut:





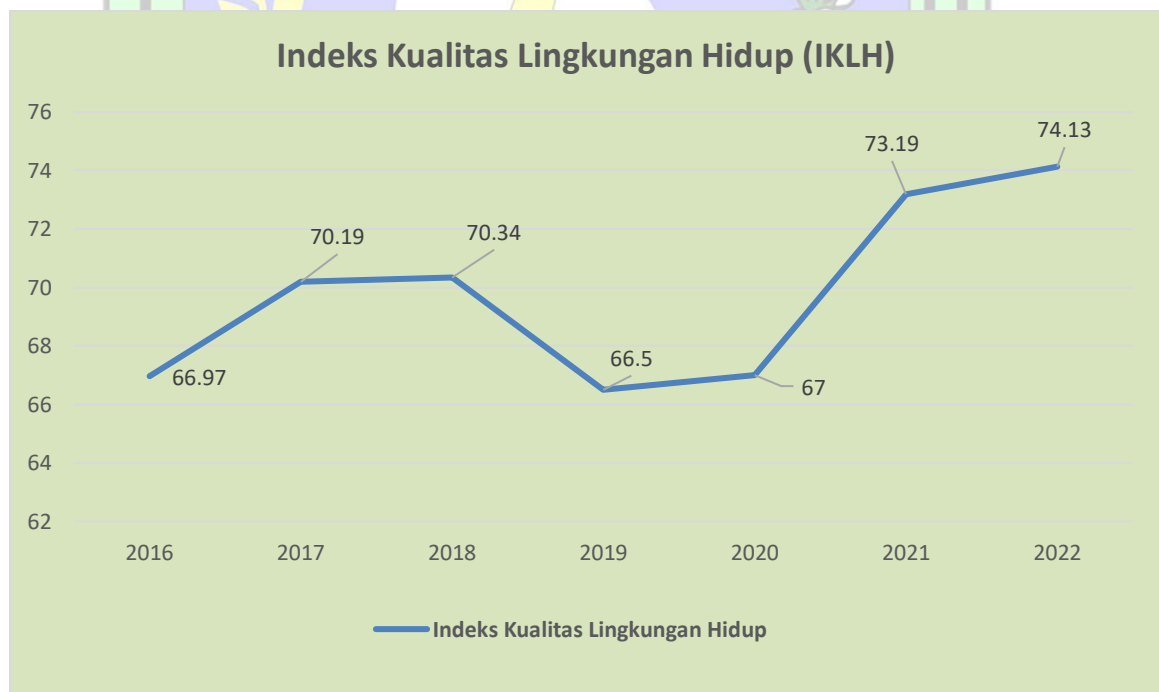
Tabel 3.38
Evaluasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2022

No	Indikator kinerja	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,97	70.19	70.34	66.50	67,00	73,19	74,13
2	Indeks Kualitas Air Laut					69,82	75,68	85,56
3	Indeks Kualitas Air	84.67	80.00	66.67	57.85	50,00	55,15	56,79
4	Indeks Kualitas Udara	86.61	78.60	95.47	90.83	90,80	90,91	90,27
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54.31	56.53	54.24	54.75	58,16	60,39	58,00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2016 realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,97, pada tahun 2017 meningkat menjadi 70,19, lalu pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi 70,34, tahun 2019 mengalami penurunan yaitu menjadi 66,50 dan tahun 2020 kembali meningkat sedikit menjadi 67,00 kemudian pada tahun 2021 meningkat cukup signifikan yaitu 73,19 dan kemudian terjadi peningkatan kembali pada tahun 2022 menjadi 74,13 indeks.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2016-2022 dapat digambarkan seperti grafik dibawah ini :

Grafik 3.5
Pencapaian Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2016-2022



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Sedangkan pada Tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2021 dan 2022 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami peningkatan sebesar 73,19 sedangkan sampai dengan tahun 2022 meningkat menjadi 74,13 maka ada peningkatan sebesar 1,28. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional dengan indeks IKLH Provinsi Kepulauan Riau maka IKLH Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Nasional.

Berikut realisasi serta capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

Tabel 3.39
Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Nasional
dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Indikator kinerja	IKLH Nasional			IKLH Provinsi Kepulauan Riau		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,22	72,42	104,62	69,73	74,13	106,31

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi dan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) secara Nasional yaitu sebesar 72,42 dari target yang ditetapkan yaitu 69,22 sedangkan capaian IKLH Provinsi Kepulauan Riau sebesar 74,13 dari target yang ditetapkan sebesar 69,80. Capaian secara Nasional naik 3,2 poin, sedangkan capaian Provinsi Kepulauan Riau naik 4,40 poin.

Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebesar 74,13 lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Nasional yaitu sebesar 72,42. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, selain itu IKLH juga merupakan perpaduan konsep ENVIRONMENTAL QUALITY INDEX (EQI) dan konsep ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung



proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami peningkatan secara nasional karena terdapat 42 kab/kota dimana berdasarkan evaluasi terhadap indeks respon daerah pada Program Langit Biru pada umumnya kab/kota tersebut memiliki kebijakan dan peraturan, SDM, serta implementasi berupa menyiapkan sarana prasarana seperti pedestrian, jalur sepeda, Ruang Terbuka Hijau (RTH), penerapan area rendah emisi (LEZ); melaksanakan program seperti CAR FREE DAY (CFD) dan gerakan masyarakat (germas) bersepeda.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) mengalami kenaikan karena dari 34 provinsi yang dipantau dan dievaluasi, ada 27 provinsi yang meningkat mutunya, salah satunya adalah Provinsi Kepulauan Riau, selain itu ada juga Provinsi yang menurun Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yaitu sebanyak 6 provinsi. Peningkatan kualitas air laut tentu tak terlepas dari adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir seperti penanaman mangrove, partisipasi masyarakat dalam pengolahan pesisir dan laut dan tentu perbaikan di hulu, hal ini terlihat naiknya IKA dan IKTL. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaran dan kerusakan di darat (LANDBASE POLLUTION). Pada data Indeks Kualitas Lahan, terdapat 145 kab/kota yang meningkat nilai IKL-nya, sedangkan yang mengalami penurunan sebanyak 116 kab/kota. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 148.689,35 ha secara nasional.

Tujuan penyusunan nilai IKLH dimaksudkan sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, nilai IKLH digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Nilai IKLH dapat digunakan sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.



Dalam rangka meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di Provinsi Kepulauan Riau, masih terdapat beberapa kendala yaitu :

1. Masih terdapatnya pencemaran limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/*sludge oil* di wilayah pesisir Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Kejadian ini terjadi pada setiap tahun memasuki musim utara, hal ini diduga disebabkan oleh banyaknya kapal-kapal yang labuh jangkar dan melakukan kegiatan *tank cleaning* secara ilegal dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dari kegiatan tersebut dengan baik di perairan Provinsi Kepulauan Riau sehingga limbah B3 dimaksud menyebabkan kerusakan pada kawasan pesisir di Kota Batam dan Kabupaten Bintan.
2. Dampak dari tumpahan minyak dan bahan-bahan kimia beracun berbahaya (B3) yang sifatnya destruktif terhadap lingkungan hidup perairan.
3. Belum teratasinya kerusakan ekosistem laut dan pesisir laut yang berada di sekitar Pulau Bintan dan Pulau Batam sehingga sangat merugikan terhadap sektor pariwisata dan nelayan.
4. Belum optimalnya penanganan limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/ *sludge oil* yang mencemari di wilayah pesisir khususnya wilayah pantai Kota Batam dan Kabupaten Bintan dikarenakan keterbatasan anggaran
5. Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha/kegiatan dalam hal pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
6. Belum optimalnya pelaksanaan amanat Gubernur Kepulauan Riau melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 742 Tahun 2018 Tentang Tim Daerah Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan tidak mendapat anggaran.
7. Minimnya penanganan dan sarana/prasarana/fasilitas pengelolaan limbah B3 (limbah medis yang bersumber dari Fasyankes) di Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan kendala tersebut diatas, upaya yang dilakukan diantaranya yaitu:

1. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti dari kementerian, instansi vertikal yang ada di daerah, aparat keamanan dan juga masyarakat.

2. Peran aktif dari seluruh semua pihak baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan dan permasalahan yang sedang dihadapi yaitu penanganan Limbah B3

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja:

A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

1. Anggaran

Pagu Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 mengalami rasionalisasi berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri pagu anggaran.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia/personil pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau telah cukup memadai dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan.

Program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup dengan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Rp. 300.000.000,- terealisasi Rp.270.563.068 (90,38%) pada sub kegiatan:

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan pagu Rp. 100.000.000,-, terealisasi Rp. 90.950.000,- (90,95%).
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan pagu Rp. 200.000.000,- terealisasi Rp. 179.612.968,- (89,81%).



Tabel 3.40
Realisasi dan Capaian Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Program	Indikator	satuan	Target Kinerja		Pagu	Realisasi Anggaran
				Target	Realisasi		
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	76,75	85,56	Rp. 300.000.000,-	Rp.270.563.068
		Indeks Kualitas Air	Indeks	56,7	56,79		
		Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	88,25	90,27		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	59,08	58,00		
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	Laporan	1	1	Rp. 300.000.000,-	Rp.270.563.068
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Laporan hasil Pengamatan: (1) Air Bersih, (2) Udara Ambien, (3) Tutupan Lahan, dan (4) Air Laut	Laporan	1	1	Rp. 100.000.000,-	Rp. 90.950.000,-
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah Laporan (1) Penyusunan Inventarisasi GRK, dan (2) Pembinaan Kampung Iklim	Laporan	1	1	Rp. 200.000.000,-	Rp. 179.612.968,-



SASARAN. 4

Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif

Reformasi Birokrasi direncanakan dan ditata secara sistematis dalam sebuah Grand Design. Grand Design Reformasi Birokrasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Perpres tersebut dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997 dan kemudian pada tahun 1998 telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak itu telah terjadi berbagai perubahan penting yang menjadi tonggak dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk mengatasi berbagai masalah internal birokrasi pemerintahan. Sehingga proses reformasi yang terjadi saat ini mengakibatkan tuntutan masyarakat terhadap birokrasi menguat. Birokrasi dituntut untuk menjadi *public servant*, artinya tugas birokrasi adalah melayani masyarakat, bukan sebaliknya masyarakat yang melayani birokrat. Masyarakat menuntut manajemen yang baik dan transparan sebagai konsekuensinya, pemerintah harus meningkatkan kinerja dalam fungsi pelayanan publik agar lebih efektif, efisien dan transparan demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, kuat dan antisipatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, program reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan adalah : 1. Manajemen Perubahan; 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan; 3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi; 4. Penataan Tatalaksana; 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; 6. Penguatan Pengawasan; 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; serta 9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.



Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan indikator kinerja sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.41
Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kuat dan Antisipatif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	69.77	67,77	100.00

Indeks reformasi birokrasi dari table diatas menunjukkan bahwa sudah menunjukkan capaian yang maksimal. Dari target 69,77 pada Tahun 2022 tercapai 100 persen.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan Reformasi Birokrasi semenjak tahun 2012 sampai saat ini dan terus berupaya untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik dengan berkomitmen melaksanakan perubahan pada 8 area perubahan meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Sistem Pengawasan dan Pelayanan Publik.

Dinamika pembaharuan dan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), atau yang kita kenal sebagai Reformasi Birokrasi, merupakan upaya pembaharuan terutama pada aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (Business Process) dan sumber daya manusia aparatur.

Tabel 3.42
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan kondisi akhir RPJMD (2026)

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	%
1	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	72.17	69,77	96,67

Berdasarkan tabel diatas nilai Reformasi Birokrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak sampai pada target jangka menengah dikarenakan menurut hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum terdapat perbaikan yang signifikan dalam penerapan reformasi birokrasi.



Berbagai rekomendasi yang telah disampaikan oleh Tim Evaluator pada hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum sepenuhnya terinternalisasi keseluruh unit kerja, khususnya dalam pembangunan budaya kinerja
2. Agen perubahan yang dibentuk baik di tingkat pemerintah daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum semua memiliki rencana aksi perubahan yang konkret dan inovatif, sehingga belum mampu menunjukkan hasil nyata dalam menggerakkan perubahan pada lingkup organisasi
3. Proses deregulasi kebijakan belum berjalan secara komprehensif dengan mengidentifikasi, merevisi dan mencabut regulasi yang menghambat kinerja birokrasi sekaligus memetakan kebutuhan peraturan yang dapat mendorong tercapainya kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan
4. Telah menyusun proses bisnis dan Standar Operating Procedure (SOP) di level pemerintah daerah maupun di level OPD, namun perlu dipastikan hasil dari penyusunan tersebut dapat menjadikan proses kerja di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lebih efektif dan efisien untuk mencapai kinerja yang diharapkan
5. Telah melakukan transformasi digital dalam proses bisnis utama, administrasi dan pelayanan publik namun belum dilakukan evaluasi untuk mengukur kesesuaian dengan arsitektur SPBE yang ada dan kebermanfaatan dari aplikasi-aplikasi maupun sistem yang telah dibangun
6. Penguatan sistem manajemen SDM masih belum optimal, antara lain belum dimanfaatkannya seluruh hasil pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi. Di samping itu, hasil asesmen pegawai belum sepenuhnya dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai.
7. Kualitas implementasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum optimal sehingga belum mendorong pelaksanaan organisasi yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja
8. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengawasan telah dilakukan, namun hasilnya belum dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan

Aksi Perubahan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Area Manajemen Perubahan

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi

Capaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada area ini, yaitu:

- Telah dilaksanakan Internalisasi *Core Values* BerAKHLAK.
- Telah dilakukan penguatan tugas dan fungsi Agen Perubahan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- Telah dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pendampingan dan penggunaan **aplikasi SIREMBO** (Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi).
- Telah disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMN, RPJMD, *Road Map* RB Nasional dan memprioritaskan pencapaian *outcome* dalam upaya pelayanan kepada masyarakat

2. Area Deregulasi Kebijakan

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi (***right function***) dan tepat ukuran (***right sizing***).

Capaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada area ini dengan melakukan sinkronisasi kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal, kebijakan dengan sistematisa dan struktur yang sesuai dengan prinsip-prinsip legal drafting, prosedural, transparan dan partisipatif, dan mudah diakses dan informatif, diantaranya yaitu:

- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan Deregulasi Kebijakan melalui proses evaluasi dari Kemendagri dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), yaitu 8 Peraturan Daerah dan 83 Peraturan Kepala Daerah dengan hasil "Harmonisasi" tanpa ada Regulasi Daerah yang dibatalkan atau dihapus.



- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah melakukan fasilitasi, harmonisasi, evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh produk hukum Kab/Kota se-Provinsi Kepri.

No	Kebijakan(ProdukHukum)	Jumlah	Deregulasi	
			Usulan	Realisasi
1	Peraturan Daerah	8	8	8
2	PeraturanKepala Daerah	83	83	83

3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

Bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang setara atau lebih tinggi penataan dan penguatan organisasi, dengan melakukan penguatan pengelolaan data, informasi, dan kearsipan:

- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan Penyederhanaan Birokrasi 100% sesuai model Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional sesuai rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan persetujuan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 31 Desember 2021.

SEBELUM PENYEDERHANAAN			SESUDAH PENYEDERHANAAN		
ADMINISTRATOR	PENGAWAS	JUMLAH	ADMINISTRATOR	PENGAWAS	JUMLAH
226 jabatan	659 jabatan	*) 885 jabatan	214 jabatan	239 jabatan	*) 453 jabatan
25,54%	74,46%	100%	47,25%	52,75%	100%

4. Area Penataan Tatalaksana

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

Capaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada area ini dengan melakukan penguatan teknologi informasi dalam pelaksanaan manajemen yang terintegrasi menghasilkan keterpaduan proses bisnis dan data infrastruktur secara terpadu, diantaranya yaitu:

- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah.
- Telah disusun Standar Operasional Prosedur sesuai Peta Proses Bisnis oleh Perangkat Daerah.
- Pemerintah Provinsi, telah melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebermanfaatan SPBE, membentuk Tim Koordinator SPBE, melakukan penilaian mandiri terkait indeks SPBE, menyusun kebijakan tentang penyelenggaraan SPBE, dan kebijakan tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE serta Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE.
- Mengikuti Pemantauan dan Evaluasi (TAUVAL) SPBE bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 4 domain, 8 aspek dan 47 indikator.

5. Area Penguatan Sistem Manajemen SDM

Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi dan transparan.

Capaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada area ini, yaitu pada sistem manajemen SDM aparatur, dengan melakukan penempatan dan jenjang karir SDM menggunakan model merit sistem, dan tata kelola yang profesional di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, adapun uraiannya sebagai berikut:

- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sedang membangun Sistem Karir ASN melalui *Assesment Center* dengan memperhatikan Potensi, Kompetensi dan Kinerja Individu untuk masuk kedalam *Talent Pool* sebagai bagian dari rencana Suksesi Pengisian seluruh Jabatan.



- Penempatan seluruh **JPT** telah dilaksanakan berdasarkan hasil assesmen melalui seleksi terbuka dan penyesuaian jabatan (*job fit*) sebanyak **42 jabatan**.
- Melaksanakan Assesmen secara bertahap kepada seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk tahun 2022 hingga Triwulan II, sudah melaksanakan assesmen sebanyak **245 pegawai** dari target **500 pegawai**.
- Telah dilakukan Diklat Perencana Untuk Jabatan Fungsional Perencana (JFP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022;
- Telah dilakukan pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) Kepulauan Riau Tahun 2022.
- Inovasi di bidang SDM yaitu **Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA Kepri)** yang telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja; **Aplikasi E-Disiplin** yang terintegrasi dengan Tunjangan Kinerja; **Aplikasi Sistem Informasi Layanan Aparatur Terpadu (SILAT)**;
- Kenaikan kelas jabatan bagi Kepala Bidang Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan inovasi pertama di Indonesia, dimana kelas jabatan Kepala Bidang yang sebelumnya berada di kelas jabatan 11 menjadi kelas 12.

TARGET JABATAN PELAKSANA YANG AKAN DI ASSESSMENT	PEJABAT PELAKSANA YANG SUDAH DI ASSESSMENT
235	98

6. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dengan melakukan penguatan e-kinerja untuk peningkatan indeks kinerja

Capaian pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada area ini yaitu:

- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam sasaran program prioritas dengan 16 indikator dan berpedoman pada RPJMD.
- Penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah telah dituangkan ke dalam *cascading*;



- Telah melaksanakan evaluasi implementasi AKIP oleh APIP atau Tim Satgas AKIP terhadap 43 Perangkat Daerah;
- Telah melakukan reuiu LKjIP Provinsi Kepulauan Riau;
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen dalam pencapaian target IKU Gubernur antara lain:
 - Rasio Elektrifikasi mendukung program Pengelolaan Ketenagalistrikan, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan slogan “KEPRI TERANG”.
 - Angka kemiskinan menurun mendukung program penanganan infrastruktur dasar, bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu, dan beasiswa.

KONDISI SEBELUM s/d 2021	KONDISI SETELAH TINDAK LANJUT s/d 2022
☐ Penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah terhamonisasi ☐ Pemetaan program/kegiatan disusun melalui crosscutting daerah ☐ Pencapaian sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sudah terintegrasi dan terkomunikasi	☐ Penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah telah di tuangkan ke dalam cascading ☐ Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan rapat perencanaan penentuan sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah yang mendukung kebijakan pembangunan crosscutting ☐ telah melaksanakan evaluasi implementasi AKIP oleh APIP atau Tim Satgas AKIP terhadap 43 Perangkat Daerah ☐ Telah melakukan reuiu LKjIP Provinsi Kepulauan Riau

7. Area Penguatan Sistem Pengawasan

Bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Capaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada area ini, yaitu:

- Telah disusun register risiko pada seluruh Perangkat Daerah.
- Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat dengan aplikasi SP4N LAPOR diseluruh Perangkat Daerah;
- Aplikasi Whistle Blowing System akan segera dibangun;



- Telah dilaksanakan penanganan gratifikasi melalui:
 - Peraturan Gubernur terkait Pengelolaan Gratifikasi sejak tahun 2018. Tata cara Pelaporan Gratifikasi telah disosialisasikan secara bertahap;
 - SE Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Tahun 2021 (Nomor: 700/862/It-Prov-SET/2021 tanggal 10 Mei 2021);
 - Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 539 /KPTS-3/I/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1890 /KPTS-3/X/2021 tentang Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- Melaksanakan penguatan satgas SPIP unit kerja;
- Penerapan SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berada pada Level 3 sejak tahun 2017, tahun 2020 dan telah dilaksanakan penilaian maturitas pada beberapa Perangkat Daerah strategis. Penataan dan Implementasi SPIP terus diupayakan dan berkelanjutan;
- Penanganan Benturan Kepentingan diupayakan melalui penandatanganan Pakta Integritas pada Seluruh Perangkat Daerah di tiap jenjang jabatan;
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan monitoring dan evaluasi pada pembangunan Zona Integritas di 5 Unit Pelayanan Publik. Dan telah mengusulkan 2 UPP untuk diusulkan menjadi WBK yaitu DPMPTSP dan UPT PPD SAMSAT Tanjungpinang.

8. Area Pelayanan Publik.

Bertujuan terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dengan melakukan pengintegrasian semua layanan dalam satu aplikasi, diikuti dengan pengembangan unit layanan terpadu dan informasi publik dengan bertransformasi dan terintegrasi pada Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Publik (SIAPP).

Capaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada area ini, yaitu:

- Telah dilakukan evaluasi dan Pengembangan aplikasi untuk pelayanan internal dan eksternal. Satu Inovasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan nama "***Proses Izin Dengan Jarimu***" dengan **Aplikasi SiJEMPOL BERHASIL** masuk dalam **TOP 5 Terpuji Kategori Replikasi Inovasi Pelayanan Publik KIPP Tahun 2021**.



- Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari Kemen PANRB Tahun 2021 mendapat nilai indeks **4,21** kategori **A- (Sangat Baik)**.
- Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari Ombudsman RI Tahun 2021 dengannilai **87,51** kategori **Kepatuhan Tinggi Zona Hijau**.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dengan nilai **83,69** mutu pelayanan **B (Baik)**.

Dengan demikian, kecepatan, ketetapan dan kemudahan dalam pemberian layanan publik prima semakin handal dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam berbagai keperluan pengguna jasa layanan, sesuai dengan peta bisnis yang dilaksanakannya.

Berikut Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020, 2021 dan tahun 2022:

TAHUN	Reformasi Birokrasi		
	Nilai	Kategori	Predikat
2020	68.57	B	Cukup Baik
2021	68.66	B	Cukup Baik
2022	?	B	Cukup Baik

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.43
EVALUASI KEMENPAN RB

NO	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20	12,94	13,03
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10	6,19	6,98
	III. Reform	30	19,84	19,01
	Total Komponen Pengungkit	60	38,97	39,02



NO	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
B.	Komponen Hasil			
	I. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	8,29	8,31
	II. Kualitas Pelayanan Publik	10	8,1	9,28
	III. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10	8,3	8,13
	IV. Kinerja Organisasi	10	5	5,03
Total Komponen Pengungkit		40	29,69	30,75
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + hasil)		100	68,66	69,77

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, berikut kami sampaikan beberapa hal:

1. Secara konsisten melaksanakan internalisasi arah perubahan yang ditetapkan kepada seluruh pegawai dan melakukan survey kepada seluruh pegawai secara berkala terkait internalisasi nilai-nilai organisasi, budaya kerja dan pemahaman reformasi birokrasi
2. Meningkatkan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif dan dinamis. Disamping itu, perubahan yang ingin diwujudkan oleh agen perubahan agar disesuaikan dengan karakter layanan utama pada masing-masing unit kerja
3. Memastikan proses deregulasi kebijakan berjalan secara menyeluruh dengan melakukan identifikasi secara keseluruhan peraturan yang ada dan memastikan bahwa tidak ada yang tumpang tindih dan menghambat kinerja maupun pelayanan
4. Mereviu proses bisnis dan SOP untuk menyesuaikan dengan penyederhanaan birokrasi dan memastikan keduanya mendukung proses kerja di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjadi lebih efektif dan efisien
5. Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebermanfaatan SPBE yang telah dibangun dan kesesuaiannya dengan kebutuhan organisasi serta pengguna layanan



selanjutnya melakukan tindak lanjut perbaikan untuk menjawab temuan yang ada

5. Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan memanfaatkan seluruh hasil pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi serta memanfaatkan hasil asesmen pegawai belum sepenuhnya dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai
6. Memastikan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari pusat hingga unit-unit kerja secara merata dan optimal, sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah dapat selaras dan mendukung dalam pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi
7. Membangun SPIP lebih efektif dengan menerapkan manajemen resiko, sehingga dapat mengendalikan gratifikasi, benturan, kepentingan, Whistle blowing System, dan pengaduan masyarakat secara baik yang akhirnya dapat mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan berintegritas; dan
8. Mengevaluasi efektivitas dan efesiensi penggunaan aplikasi yang digunakan untuk pelayanan internal dan eksternal, serta secara periodic melakukan survey kepuasan untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan berkelanjutan.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik perlu mendapat perhatian dan ditata ulang atau diperbaharui, serta disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian hasil Reformasi Birokrasi ini, pemerintah menetapkan 9 (sembilan) percepatan Reformasi Birokrasi, yaitu: Penataan Struktur Organisasi Pemerintah; Penataan Jumlah dan Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS); Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka; Peningkatan Profesionalisasi PNS; Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi; Peningkatan Pelayanan Publik; Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja program Aparatur; Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; dan Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur.

Namun seiring dengan perkembangan terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Permasalahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Terdapat tujuh permasalahan di dalam

birokrasi yakni Budaya kerja yang masih feodalistik, organisasi yang gemuk, overlapping kebijakan, kompetensi SDM yang kurang, overlapping kewenangan, pola pikir yang bersifat rule based dan pelayanan yang masih buruk. Disamping permasalahan birokrasi terdapat juga permasalahan dalam pelayanan publik yaitu rendahnya responsivitas, rendahnya sosialisasi informasi, rendahnya aksesibilitas, struktur dan kelembagaan birokrasi, cenderung inefisiensi, profesionalitas SDM yang masih rendah dan sarana prasarana kurang memadai.

Sebagai saran strategi optimalisasi dari pelayanan publik maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah :

1. Mengidentifikasi kembali jenis-jenis pelayanan yang dibutuhkan dan dievaluasi
2. Melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan yang sudah berlangsung dan menindaklanjuti hasil evaluasi secara konsisten
3. Penguatan kapasitas, baik SDM, sistem dan sarana prasarana layanan
4. Melaksanakan SKM secara rutin
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pelayanan publik (konsep Collaborative Government)
6. Menyerahkan tugas-tugas sektor publik kepada manajer profesional
7. Menetapkan secara eksplisit standar dan ukuran kinerja
8. Menegaskan pentingnya "hasil" daripada "proses" sehingga hasil harus terus menerus dikendalikan
9. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dengan mendesentralisasikan tugas-tugas ke bawah dan ke unit lain di luar.

Inilah strategi-strategi yang digunakan untuk mencegah permasalahan yang muncul di birokrasi dan juga pelayanan publik.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis di reformasi birokrasi adalah sebanyak satu program 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program/kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5
A.	Fasilitasi Kelembagaan dan Analysis Jabatan			
1.	Fasilitasi Penataan KelembagaanProvinsi	118.843.600	102.020.296	
2.	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	21.653.300	21.469.500	
3.	Penataan Analysis Jabatan	72.700.080	63.081.663	
B.	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			
1.	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	147.014.640	144.744.050	
2.	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	61.946.880	53.293.983	
3.	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	22.419.000	21.420.000	
4.	Pengelolaan tatalaksana pemerintahan	108.728.000	103.966.935	
5.	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	192.656.000	182.495.219	
	TOTAL	745.961.500	692.491.646	92,83%



Berdasarkan uraian tabel anggaran diatas terlihat bahwa terdapat efesiensi dalam pengelolaan anggaran, hal ini terlihat dari tidak adanya angka yang melebihi anggaran belanja, yang mampu menghemat anggaran belanja sebesar 7,17 persen sehingga dapat dikatakan efesiensi berhasil dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan dimana pelaksanaan program/kegiatan telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan pada Bidang Reformasi Birokrasi berjalan dengan baik

DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 DALAM BIDANG REFORMASI BIROKRASI :

1. Peringkat 2 dalam Penilaian Kompetensi Pegawai BKN Award;
2. Peringkat 3 atas capaian dalam Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja BKN Award;
3. Penghargaan Pemerintah Daerah dengan Ketepatan Waktu dalam Melaporkan SPM seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah nya tahun 2021 dari Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
4. Penghargaan Pemerintah Daerah dengan Realisasi Belanja APBD Tertinggi di tahun 2021 dari Kementerian Dalam Negeri;
5. Penghargaan UPTD PPD Samsat Batam Centre BP2RD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai kategori sangat Baik dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2021 dari Kementerian PANRB;
6. Penghargaan kategori Unit Penyelenggara Pelayanan PublikDPMPTSP kategori Sangat Baik di lingkup Pemerintah Daerah tahun 2021 dari Kementerian PAN-RB

SASARAN. 5

Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter

Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan umur harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia diperoleh melalui hal-hal sebagai berikut:

a. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

b. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

c. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok menurut status capaiannya. Adapun pengelompokan tersebut adalah:

1. sangat tinggi: $IPM \geq 80$
2. tinggi: $70 \leq IPM < 80$
3. sedang: $60 \leq IPM < 70$
4. rendah: $IPM < 60$

Tabel 3.44

Capaian Kinerja indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,7	76,46	99%

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dalam satu dekade terakhir, pembangunan manusia di Kepulauan Riau terus mengalami kemajuan. IPM Kepulauan Riau meningkat dari 72,36 pada tahun 2012 menjadi 76,46 pada tahun 2022. Selama periode tersebut, status IPM Kepulauan Riau selalu berada pada status IPM “tinggi” dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,55 persen per tahun.

Analisis terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 76,7% pada tahun 2022, sebab capaian realisasi sebesar 76,46% dan capaian kinerja sebesar 99% atau dalam **Kategori Baik**.

Berikut disampaikan perbandingan capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2022:

Tabel 3.45

Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2021 -2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2021	2022*
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,79	76,46

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. IPM Kepulauan Riau tahun 2022 mencapai 76,46, meningkat 0,67 poin atau tumbuh 0,88 persen dibandingkan capaian tahun 2021.

Peningkatan IPM 2022 didukung oleh peningkatan ketiga dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan.

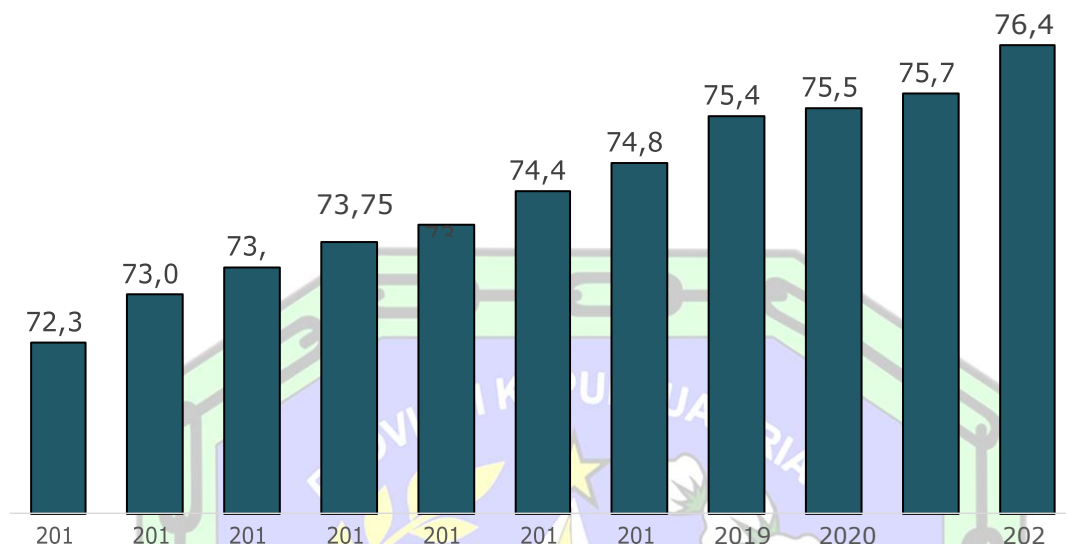
Dalam satu dekade terakhir, pembangunan manusia di Kepulauan Riau terus mengalami kemajuan. IPM Kepulauan Riau meningkat dari 72,36 pada tahun 2012 menjadi 76,46 pada tahun 2022. Selama periode tersebut, status IPM Kepulauan Riau selalu berada pada status IPM "tinggi" dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,55 persen per tahun.

Pandemi COVID-19 telah memberikan ketidakpastian ekonomi dan pukulan terhadap dunia kerja. Berkurangnya permintaan pasar mendorong pengusaha mengambil langkah preventif dengan mengurangi jam kerja bahkan pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan menurunnya tingkat penghasilan dan daya beli masyarakat. Selain itu, pandemi COVID-19 juga memengaruhi kesehatan masyarakat dan mengancam akses masyarakat terhadap pendidikan terutama pada kelompok rentan. Namun demikian, pada tahun 2022, kondisi perekonomian sudah mulai pulih, tingkat penghasilan dan daya beli masyarakat meningkat dibandingkan kondisi tahun 2019 (sebelum Pandemi COVID-19). IPM Kepulauan Riau tahun 2022 tumbuh 0,88 persen dibandingkan tahun 2021 dan tumbuh 0,43 persen dibandingkan tahun 2019. Peningkatan IPM Kepulauan Riau tahun 2022 didorong oleh peningkatan semua dimensi pembentuknya.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019 (kondisi sebelum Pandemi COVID-19), pembangunan manusia Kepulauan Riau tahun 2022 meningkat. Gambar 3.8 menunjukkan perkembangan IPM satu dekade terakhir, sedangkan perkembangan dimensi pembentuk IPM ditunjukkan oleh Tabel 3.46.



Gambar 3.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau, 2012-2022



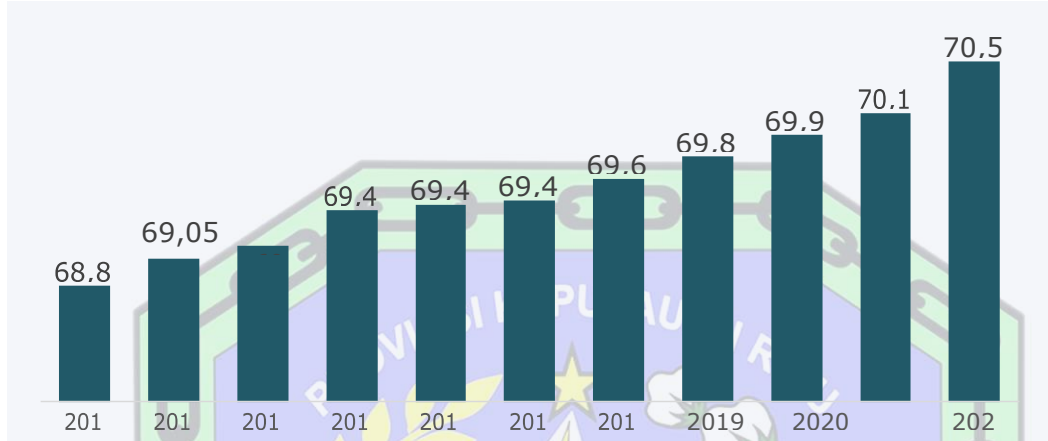
Tabel 3.46
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau Menurut Komponen, 2012-2022

Komponen	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	68,85	69,05	69,15	69,41	69,45	69,48	69,64	69,80	69,96	70,12	70,50
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,90	12,26	12,51	12,60	12,66	12,81	12,82	12,83	12,87	12,98	12,99
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,58	9,63	9,64	9,65	9,67	9,79	9,81	9,99	10,12	10,18	10,37
Pengeluaran riil per Kapita per Tahun yang disesuaikan	Rp 000	12.740	12.942	13.019	13.177	13.359	13.566	13.976	14.466	14.209	14.122	14.469
IPM		72,36	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	76,46

Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Selama satu dekade terakhir, UHH Kepulauan Riau terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode tersebut, UHH telah meningkat sebesar 1,65 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,24 persen per tahun. Pada tahun 2022, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kepulauan Riau mencapai 70,50 tahun yang

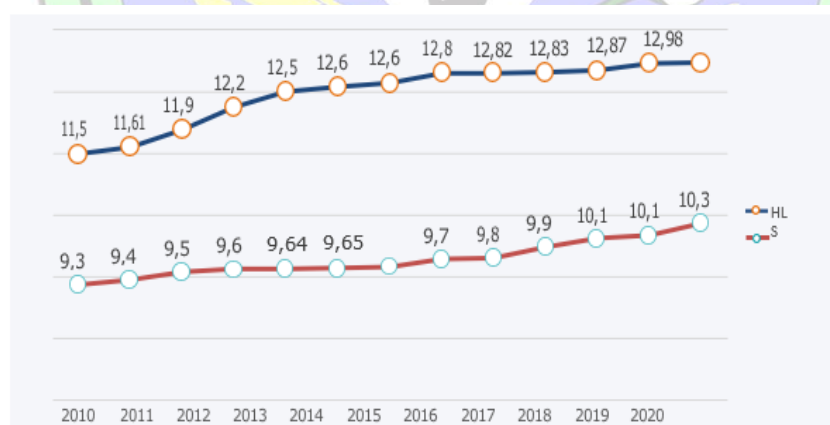
artinya bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,50 tahun.

Gambar 3.9 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kepulauan Riau, 2012-2022



Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama satu dekade terakhir, HLS Kepulauan Riau telah meningkat sebesar 1,09 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,88 persen per tahun, sementara RLS meningkat sebesar 0,79 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,80 persen per tahun.

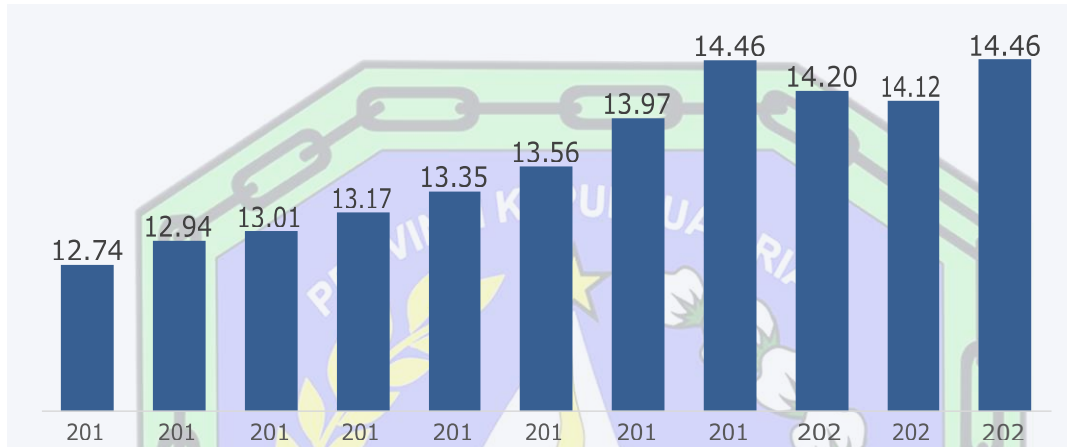
Gambar 3.10 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kepulauan Riau, 2012-2022



Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran riil per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2022 pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) penduduk Kepulauan Riau mencapai Rp14,469 juta per tahun. Dimensi standar hidup layak tahun 2022 mulai meningkat kembali, bahkan dibandingkan kondisi tahun 2019 (sebelum Pandemi COVID-19) pengeluaran riil per kapita per tahun Kepulauan Riau

meningkat. Selama satu dekade terakhir, pengeluaran riil per kapita Kepulauan Riau telah meningkat sebesar Rp. 1,729 juta per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,28 persen per tahun.

Gambar 3.11 Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan (PPP) Kepulauan Riau, 2012-2022



Berikut disampaikan perbandingan capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 berdasarkan Target RPJMD:

Tabel 3.47
Capaian Kinerja indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,7	76,46	99%

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Capaian pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan target RPJMD maka diperoleh capaian kinerja sebesar 99% dengan target RPJMD sebesar 76,7% dan realisasi sebesar 76,46%.

Peningkatan IPM juga terjadi di semua kabupaten/kota di Kepulauan Riau. Secara umum, tidak terjadi perubahan baik dalam peringkat maupun kategori status pembangunan manusia di masing-masing kabupaten/kota. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Lingga (66,57), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Batam (81,67) yang sekaligus menjadikan Kota Batam sebagai satu-satunya kabupaten/kota di Kepulauan Riau dengan status pembangunan manusia yang “sangat tinggi” (IPM $\geq$ 80).



Selama periode 2012 hingga 2022, disparitas IPM antarkabupaten/kota di Kepulauan Riau konsisten menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai dengan semakin rendahnya gap antara IPM yang tertinggi dengan yang terendah, yaitu dari 19,07 poin di tahun 2012 menjadi 15,10 poin di tahun 2022. Dilihat dari kecepatan capaian IPM, pada tahun 2022 Kabupaten Karimun tercatat sebagai kabupaten dengan peningkatan IPM tercepat, yaitu sebesar 0,95 persen. Kemudian disusul oleh Kabupaten Lingga (0,74%) dan Kota Tanjungpinang (0,71%).

Tabel 3.48
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota, 2022

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran riil per kapita per tahun (Rp. 000)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	71,53	12,59	8,48	12.304	72,65
Bintan	70,76	13,27	8,70	14.739	74,99
Natuna	65,76	13,92	8,96	14.834	73,47
Lingga	62,92	12,61	7,12	12.134	66,57
Kep. Anambas	67,73	12,89	7,38	12.137	69,61
Batam	73,62	13,32	11,17	18.506	81,67
Tanjungpinang	72,49	14,14	10,49	15.864	79,64

Dari sisi indikator penyusunnya, bila dibandingkan antar kabupaten/kota, Kota Batam memiliki umur harapan hidup saat lahir tertinggi di Kepulauan Riau, yaitu 73,62 tahun, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lingga sebesar 62,92 tahun. Sementara itu, Kota Tanjungpinang tercatat memiliki harapan lama sekolah tertinggi sebesar 14,14 tahun, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Karimun sebesar 12,59 tahun. Untuk rata-rata lama sekolah, Kota Batam adalah yang tertinggi dengan RLS sebesar 11,17 tahun dan di posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Lingga dengan RLS sebesar 7,12 tahun. Pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) atas dasar harga konstan 2012 tertinggi tercatat di Kota Batam sebesar Rp18,506 juta per tahun, sedangkan yang terendah tercatat di Kabupaten Lingga sebesar 12,134 juta per tahun.



Berikut disampaikan perbandingan capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau tahun Tahun 2022 berdasarkan capaian IPM secara nasional:

Tabel 3.49

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Nasional dan Kepulauan Riau, 2022

Dimensi/Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014 2021	2015 2022	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Indeks Pembangunan Manusia 72,29 72,91 (IPM) Nasional		66,53	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94		
Indeks Pembangunan Manusia 75,59 75,79 76,46 (IPM) Kepri		-	-	72,36	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48			

Peningkatan IPM tahun 2022 terjadi di seluruh provinsi termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Dari tahun 2021-2022 IPM Provinsi Kepulauan Riau meningkat 0,67 poin atau tumbuh 0,88 persen dimana IPM secara nasional sebesar 72,91 atau dalam kategori "tinggi". Jika dibandingkan dengan kondisi nasional pada Tahun 2022 Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi sebesar 3,55 poin dan dalam kategori "tinggi".

Terdapat sedikit perubahan pada peringkat dan status capaian pembangunan manusia di tingkat provinsi. Peringkat Kalimantan Tengah bertukar dengan Kalimantan Utara. Peringkat Kalimantan Tengah turun dari urutan ke-21 menjadi urutan ke-22, sementara Kalimantan Utara meningkat dari urutan ke-22 menjadi urutan ke-21. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Papua (61,39), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh DKI Jakarta (81,65).

Pada tahun 2022, status pembangunan manusia di Lampung, Sulawesi Tengah, dan Maluku meningkat dari "sedang" menjadi "tinggi", dengan capaian IPM masing 70,45; 70,28; dan 70,22. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah provinsi dengan status pembangunan manusia yang "tinggi" ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 24, dengan status "sedang" ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 8, dan tidak ada provinsi dengan status "rendah" ($\text{IPM} < 60$). Sejak tahun 2018, tidak ada lagi provinsi dengan status pembangunan manusia "rendah" setelah status pembangunan manusia di Papua meningkat dari "rendah" menjadi "sedang". Sementara itu, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta

menjadi provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” (IPM ≥ 80).

Beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebagai dimensi Umur Harapan Hidup (UHH) dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta kendala yang di hadapi pada tahun 2022 dalam rangka Peningkatan Angka Patisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 yaitu:

1. Masih adanya pelayanan kesehatan ibu hamil yang belum memenuhi standar 10T dan pemeriksaan yang belum adekuat sehingga belum mampu melakukan pendeteksian risiko komplikasi pada ibu hamil. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dalam pendeteksian risiko komplikasi pada ibu hamil, saat ini dibuat kebijakan pelayanan kesehatan ibu hamil 6 kali (K6) dengan pemeriksaan oleh dokter minimal 1 (satu) kali pada trimester pertama dan 1 (satu) kali pada trimester kedua disertai dengan pemeriksaan kehamilan menggunakan USG oleh dokter. Saat ini cakupan K6 Provinsi Kepulauan Riau masih belum sesuai dengan yang diharapkan, salah satunya karena belum meratanya distribusi alat USG dan dokter terlatih USG.
2. Masih adanya persalinan yang ditolong oleh non tenaga kesehatan dan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di non fasilitas pelayanan kesehatan. Masih banyak masyarakat di wilayah pulau – pulau di kabupaten/ kota yang lebih memilih untuk bersalin di rumah karena berbagai macam alasan diantaranya faktor tradisi yang turun menurun, wilayah kepulauan yang membuat jarak antara rumah dengan fasilitas pelayanan kesehatan cukup jauh dan moda transportasi yang kurang memadai, fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai dalam pelayanan persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
3. Masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta alat kesehatan di sebagian fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Salah satunya yaitu alat USG, logistik pemeriksaan laboratorium bagi ibu, bayi, dan calon pengantin, alat stabilisasi ibu dan bayi dengan komplikasi, fasilitas dalam ambulans sebagai sarana rujukan kegawatdaruratan.



4. Masih belum meratanya distribusi tenaga kesehatan spesialis seperti dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesi, dan dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter spesialis lainnya. Dokter spesialis banyak terdistribusi di daerah perkotaan sedangkan di daerah DTPK seperti Kabupaten Kepulauan Anambas masih minim.
5. Minimnya kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan berupa pelatihan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota, salah satunya karena adanya keterbatasan anggaran dan adanya efisiensi anggaran Dekonsentrasi Program Pembinaan Kesehatan Keluarga.
6. Sistem manual rujukan maternal neonatal yang belum berjalan dengan baik;
7. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di kabupaten/ kota belum optimal, efektif, dan sesuai dengan yang diharapkan.
8. Program kesehatan reproduksi calon pengantin yang belum berjalan optimal.
9. Faktor Geografis, yaitu jarak antar sekolah yang jauh, sehingga keterbatasan akses terhadap satuan pendidikan terutama yang ada di Pulau Pulau; hal ini bisa di lihat dengan Angka Partisipasi yang tinggi di daerah perkotaan seperti Kota Tanjungpinang dan Kota Batam
10. Sarana dan Prasarana yang belum seluruhnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
11. Tingkat kesejahteraan sosial calon peserta didik, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah .

Beberapa solusi yang perlu dilakukan untuk menangani permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Kepulauan Riau antara lain :

1. Melakukan kegiatan AMP sebagai proses pembelajaran kasus kematian ibu dan bayi agar tidak terulang lagi dengan kasus yang sama.
2. Membenahi sistem manual rujukan penanganan kasus komplikasi pada ibu dan bayi, melakukan penunjukan dokter spesialis kandungan dan anak sebagai penanggungjawab wilayah yang memberikan arahan kepada tenaga kesehatan di wilayah kerja puskesmas untuk stabilisasi pasien ibu dan bayi sebelum merujuk.



3. Melengkapi sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau puskesmas dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Salah satunya yaitu alat USG, logistik pemeriksaan laboratorium bagi ibu, bayi, dan calon pengantin, alat stabilisasi ibu dan bayi dengan komplikasi, fasilitas dalam ambulans sebagai sarana rujukan kegawatdaruratan.
4. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Beberapa diantaranya yaitu pelatihan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, pelatihan integrasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan gizi buruk, pelatihan penanganan asfiksia dan BBLR, pelatihan dokter dalam pelayanan KIA termasuk penggunaan USG, pelatihan bidan dalam pelayanan KIA, dan pelatihan lainnya.
5. Peningkatan koordinasi dengan organisasi profesi (POGI, IBI, IDI, dll) untuk pemerataan SDM dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
6. Pelaksanaan refreshing deteksi risiko dini dan penapisan faktor risiko ibu dan bayi bagi bidan – bidan di wilayah kerja puskesmas.
7. Penguatan peran lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat dan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
8. Optimalisasi dan monitoring pemanfaatan JKN, DAK, Dekonsentrasi untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Adapun program/kegiatan yang terus dilakukan guna meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebagai berikut :

1. OJT Orientasi Dokter Dalam Penggunaan USG Dasar Obstetri Terbatas Melalui Blended Learning .
2. OJT Pelatihan Pelayanan Kesehatan Balita Untuk Penatalaksanaan Balita Sakit dan/ atau Masalah Gizi
3. Pertemuan Dalam Rangka Pemantauan Pelaksanaan AMPSR, Orientasi Sistem Informasi Matneo, MPDN, dan Ekohort



4. Pembinaan Surveilans Kelainan Bawaan
5. Monitoring Evaluasi Program KIA Dalam Rangka Penurunan AKI dan AKB
6. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Bidan Dalam Penurunan AKI dan AKB
7. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya, khususnya di wilayah yang angka partisipasinya masih rendah,
8. Tetap meneruskan Pemberian Bantuan bagi siswa tidak mampu melalui bantuan transportasi darat dan laut, kompensasi SPP dan juga bantuan bagi siswa yang melaksanakan magang.
9. Melakukan koordinasi secara terus menerus baik di internal Dinas Pendidikan, maupun dengan Instansi/lembaga terkait, serta pemerintah pusat dalam rangka mendorong pemenuhan SPM di bidang pendidikan khususnya jenjang menengah.

Adapun Sumber daya anggaran dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebagai dimensi Umur Harapan Hidup (UHH) dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta kendala yang di hadapi pada tahun 2022 dalam rangka Peningkatan Angka Patisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 yaitu:

NO	Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	961,848,100	922,744,092	95,93	



Tabel 3.50

Realisasi Belanja berdasarkan Program Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Program Pengelolaan Pendidikan	343,849,050,681	332.123.887.540	96,59
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	183.690.074.285	177.004.165.941	96,36
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kujuruan	146.924.996.066	142.125.535.790	96,73
Pengelolaan Pendidikan Khusus	13.233.980.330	12.994.185.809	98,18
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	795.960.700	766.615.950	96,31
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	795.960.700	766.615.950	96,31

Sumber Data : Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIPP)

SASARAN_6

Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, mulai merancang berbagai gebrakan untuk kemajuan dunia pendidikan Indonesia. dengan mencetuskan sistem pendidikan bernama Merdeka Belajar. Hal ini mengacu kepada visi pendidikan Indonesia 2035 yang dirumuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia yaitu:

"Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila."

Rancangan sistem pendidikan ini terdiri dari bermacam strategi yang memasukkan peran seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menjadi agen perubahan. Mulai dari institusi pendidikan, guru, siswa, keluarga, dunia usaha / industri, serta masyarakat yang tergabung dalam organisasi penggerak, perusahaan teknologi edukasi, dan lainnya. Harapannya adalah agar terciptanya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Strategi-strategi yang disusun untuk mendukung gebrakan Merdeka Belajar ini terdiri dari 10 kebijakan pendidikan baru hasil pembaharuan dari sistem sebelumnya. 10 kebijakan tersebut tertuang dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020 – 2035.

10 Kebijakan Pendidikan Baru pada Sistem Pendidikan Merdeka Belajar :

1. Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah (TK – SD – SMP – SMA, informal)
2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah
3. Membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi
4. Memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian
5. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata
6. Membangun sekolah / lingkungan belajar masa depan
7. Memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan
8. Mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi



9. Membentuk pendidikan tinggi kelas dunia

10. Menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih

Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas Pendidikan.

Menurut Badan Pusat Statistik Angka Partisipasi Sekolah adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Tabel 3.51
Capaian Sasaran Meningkatkan akses dan mutu Pendidikan
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	Target Jangka Menengah	Capaian (%)
1.	Angka Partisipasi Sekolah	100	84,54	100	84,54

*Sumber Data BPS

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebesar 84,54 atau 84,54% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan **Kategori Kinerja Baik**, Capaian 84,54% merupakan hasil dari perhitungan Jumlah Penduduk usia 16-18 tahun yang masih sekolah (75.328) dibagi Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun (89.103) dikali 100%. Ini berarti bahwa sekitar 84,54% Penduduk usia 16-18 Tahun di Provinsi Kepulauan Riau terdaftar dan masih aktif mengikuti pendidikan, baik di pendidikan formal maupun nonformal. Penerapan Standar



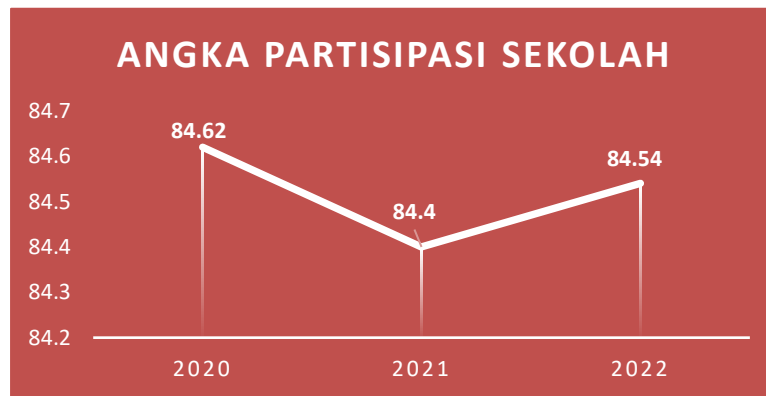
Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Pemenuhan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Menengah sebesar 100%. Dengan belum mencapai nya target APS 100% menandakan bahwa di Provinsi Kepulauan Riau masih ada sekitar 15% belum atau tidak sedang sekolah pada usia 16-18 Tahun. Kondisi ini mesti dicarikan jalan keluar agar terjadi peningkatan sehingga program wajib belajar 12 tahun dapat tercapai, meskipun saat ini Provinsi Kepulauan Riau masih mencanangkan wajib belajar 9 Tahun.

Tabel 3.52
Perbandingan Realisasi Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2022,2021 dan Tahun 2020

Provinsi	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2020	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2021	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2022
Kepulauan Riau	84,62	84,40	84,54

**Sumber Data BPS*

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK pada tahun 2021 sebesar 84,40% mengalami penurunan 0,22 % dibandingkan Realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK tahun 2020 yaitu 84,62%. Penurunan di Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di tahun 2021 imbas dari pandemi Covid 19 yang terjadi, sehingga Tingkat partisipasi anak sekolah menurun. Meskipun belum mencapai target realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Tahun 2022 sebesar 84,54% mengalami kenaikan sebesar 0,016% dibandingkan realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Tahun 2021. Capaian ini menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan yang sudah meningkat setiap tahunnya. Program Pemberian Bantuan Biaya Personil Peserta Didik pada tahun 2022 yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berhasil menurunkan angka putus sekolah jenjang pendidikan sekolah menengah. Meski belum mencapai target, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) meningkat pada jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK).



Grafik 3.6 Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Adapun program/kegiatan yang terus dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau melalui Pelaksanaan guna meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebagai berikut :

1. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya, khususnya di wilayah yang angka partisipasinya masih rendah,
2. Tetap meneruskan Pemberian Bantuan bagi siswa tidak mampu melalui bantuan transportasi darat dan laut, kompensasi SPP dan juga bantuan bagi siswa yang melaksanakan magang.
3. Melakukan koordinasi secara terus menerus baik di internal Dinas Pendidikan, maupun dengan Instansi/lembaga terkait, serta pemerintah pusat dalam rangka mendorong pemenuhan SPM di bidang pendidikan khususnya jenjang menengah.

Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah Di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2020s/d 2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.53

Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Menurut Kabupaten/Kota

Wilayah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota (Persen)		
	16-18		
	2020	2021	2022
Kepulauan Riau	84,62	84,40	84,54
Kabupaten Karimun	76,49	76,91	77,41
Kabupaten Bintan	87,31	90,36	90,42



Kabupaten Natuna	77,57	77,55	77,59
Kabupaten Lingga	80,11	79,06	79,11
Kabupaten Kepulauan Anambas	87,28	78,30	83,64
Kota Batam	84,68	79,88	82,16
Kota Tanjungpinang	78,86	85,83	88,44

Sumber: BPS Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Kabupaten Bintan pada Tahun 2022 mencapai angka 90,42% atau 0,02% lebih tinggi di bandingkan Kota Tanjungpinang yaitu sebesar 88,44%. Pencapaian angka partisipasi sekolah di Kabupaten Bintan di bandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi, ini berarti Penduduk usia 16-18 Tahun di Kabupaten Bintan terdaftar dan masih aktif mengikuti pendidikan, baik di pendidikan formal maupun nonformal.

Perbandingan capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.54
Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah Nasional

Provinsi	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2020	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2021	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2022
Kepulauan Riau	84,62	84,40	84,54
Nasional	72,72	73,09	73,15

"Sumber data BPS

Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK usia 16-18 tahun di Provinsi Kepulauan Riau masih lebih tinggi 15,5% di bandingkan capaian secara nasional. Ada beberapa kendala yang di hadapi pada tahun 2022 dalam rangka Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

1. Faktor Geografis, yaitu jarak antar sekolah yang jauh, sehingga keterbatasan akses terhadap satuan pendidikan terutama yang ada di Pulau Pulau; hal ini bisa di lihat dengan Angka Partisipasi yang tinggi di daerah perkotaan seperti Kota Tanjungpinang dan Kota Batam;
2. Sarana dan Prasarana yang belum seluruhnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;



3. Tingkat kesejahteraan sosial calon peserta didik, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah.

Beberapa hal yang dilakukan Dinas Pendidikan terkait penanganan kendala tersebut di atas yaitu :

- a. Dinas Pendidikan secara konsisten untuk memberikan Bantuan transportasi, baik laut dan darat,
- b. Menyediakan kelas jauh bagi peserta didik yang jauh jaraknya dengan sekolahnya.
- c. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana seperti Ruang Kelas Belajar, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dan akan dilakukan pemetaan kebutuhan Sarana dan Prasarana dan akan dilakukan program ketuntasan sesuai arahan Kemendikbudristek.
- d. Pemetaan bagi siswa yang tidak mampu, sehingga bisa masuk sekolah dengan gratis.

Dukungan terhadap Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pada Tahun 2022 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menjalankan 2 (Dua) Program pembangunan untuk urusan pendidikan yaitu :

1. **Program Pengelolaan Pendidikan** ,Pagu Program sebesar 343,849,050,681,- dengan realisasi Rp.332.123.887.540,- atau 96,59%, yang di tunjang oleh 3 Kegiatan yaitu :

- 1) *Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas* pagu sebesar Rp. 183.690.074.285 dengan realisasi Rp. 177.004.165.941,- atau 96,36%.
- 2) *Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kujuruan* pagu sebesar Rp. 146.924.996.066 dengan realisasi Rp.177.004.165.941,- atau 96,73%.
- 3) *Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus* pagu sebesar Rp. 13.233.980.330,- dengan realisasi Rp. 12.994.185.809 atau 98,18%.

2. **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Program ini di tahun 2022 hanya menjalankan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi pagu Rp. 795.960.700 realsiasi 766.615.950 atau 96,31%.

Data alokasi belanja Dinas Pendidikan Tahun 2022 berdasarkan Program terlihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.55

Realisasi Belanja berdasarkan Program Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Program Pengelolaan Pendidikan	343,849,050,681	332.123.887.540	96,59
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	183.690.074.285	177.004.165.941	96,36
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kujuruan	146.924.996.066	142.125.535.790	96,73
Pengelolaan Pendidikan Khusus	13.233.980.330	12.994.185.809	98,18
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	795.960.700	766.615.950	96,31
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	795.960.700	766.615.950	96,31
Program Pengembangan Kurikulum	19.974.000	9.663.102	48,38
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	9.987.000	-	0
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	9.987.000	9.987.000	96,76

Sumber Data : Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIPP)

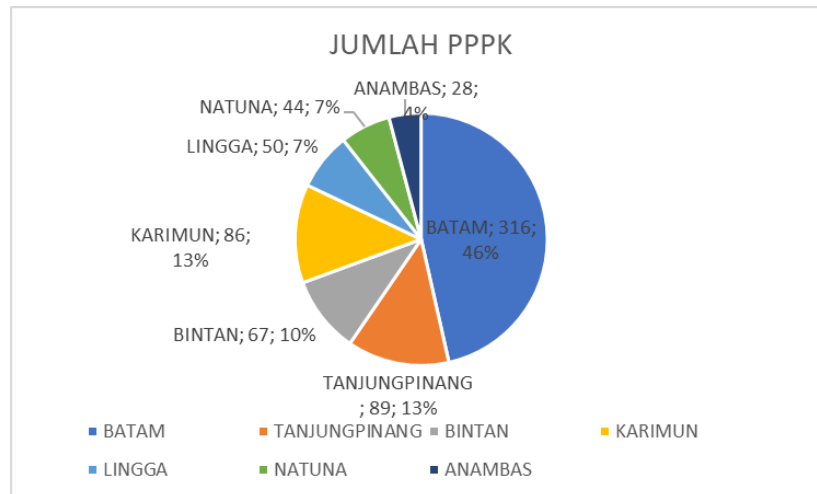
Pemerataan tenaga pendidik dengan hadirnya P3K di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu menutup lobang lobang kekurangan tenaga pendidik, terutama di sekolah yang berada di pulau pulau. Tahun 2022 sebanyak 680 P3K tersebar di Kabupaten Kota se Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3.56
Jumlah P3K di Provinsi Kepulauan Riau

KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PPPK
KOTA BATAM	316
KOTA TANJUNGPINANG	89
KABUPATEN BINTAN	67
KABUPATEN KARIMUN	86
KABUPATEN LINGGA	50
KABUPATEN NATUNA	44
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	28
TOTAL	680

Data Olahan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Grafik 3.7 Penyebaran P3K di Provinsi Kepulauan Riau



Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya :

a. Anggaran

Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dasar atas pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Target kinerja urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau, Alokasi belanja pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau bidang pendidikan mengalami kenaikan pada Tahun 2022 dibanding Tahun 2021. Kenaikan ini terkait usaha pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19. Anggaran yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK bersumber selain dari APBD juga berasal dari Dana Alokasi Khusus. Anggaran yang tersedia dalam pemberian bantuan biaya personil bagi peserta didik diharapkan mampu menekan angka Putus Sekolah peserta didik hingga bisa mencapai angka partisipasi sekolah secara maksimal.

Dengan adanya anggaran bidang pendidikan diharapkan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kepulauan Riau yang indikatornya salah satunya peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK, dan juga Peningkatan anggaran sebagai upaya dalam meningkatkan Mutu dan akses layanan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau.

Pada tahun 2022 anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengalami rasionalisasi anggaran, rasionalisasi anggaran ini sesuai dengan hasil evaluasi Kemendagri terhadap belanja belanja yang belum menggambarkan efektifitas anggaran.



Penganggaran ditahun 2022 dalam mendukung peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung seperti Penambahan Ruang kelas baru mengalami kenaikan yang cukup tinggi, di tahun 2021 hanya dapat membangun Ruang Kelas baru sebanyak 7 ruang sedangkan di tahun 2022 penambahan ruang kelas baru sebanyak 143 ruang yang tersebar untuk jenjang Sekolah menengah Atas, sekolah menengah kejuruan dan Pendidikan khusus.

b. Sumberdaya Manusia

Pelaksanaan Program/kegiatan Subkegiatan telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan. Penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi, tim penilai, pemberi masukan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam pengelolaan kegiatan pendidikan.

Jumlah sumberdaya manusia pada Dinas Pendidikan pada tahun 2022 berkurang karena adanya memasuki masa pensiun dan mutasi, namun demikian komitmen pelayanan tetap dilaksanakan, ini terbukti dengan adanya Cabang Dinas di Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna sebagai perpanjangan tangan Kepala Dinas Pendidikan dalam mengurus administrasi kependidikan. Secara umum dengan Sumberdaya Manusia yang ada saat ini berpengaruh terhadap peningkatan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan. Tingkat pengetahuan dan keterampilan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Perhatian terhadap SDM perlu ditingkatkan khususnya dalam kreativitas dan inovasi agar dapat menjamin kelangsungan Pelayanan pada Dinas Pendidikan.

c. Waktu Pelaksanaan

Mulai dari awal pelaksanaan kegiatan, sebagian besar tidak mengalami kendala dan dapat berjalan sebagaimana waktu yang telah ditentukan.

d. Sarana dan Prasarana Penunjang

Ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia sudah mulai terpenuhi meskipun tidak secara keseluruhan, akan tetapi pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi pendidikan tetap berjalan dengan baik seperti

pengurusan legalisir ijazah, Pengurusan Pindah rayon dan pengurusan administrasi tenaga pendidik (Guru).

Penigkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Tahun 2022
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan



SMAN 1 PULAU TIGA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya (DAK) SMAN 1 SERASAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU





PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK OLEH
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU







SASARAN. 7

Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat, kultur, maupun negara. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara. Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Jadi kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sementara itu, keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.

Capaian kinerja Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Tahun 2022 masih menggunakan data tahun 2021, dikarenakan data IPG Tahun 2022 baru dikeluarkan oleh BPS Pada Agustus 2023. Capaian dari indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai berikut :



Tabel 3.57
Capaian Kinerja Meningkatnya
Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,20	93,49	100,31%

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dengan diskripsi capaian terpisah antara laki-laki dan perempuan. IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan dengan kriteria yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data disajikan terpisah antara laki-laki dan perempuan.

IPG digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG Kepri dalam kurun waktu tahun 2017 - 2021 mengalami peningkatan, Berikut evaluasi realisasi indikator indeks pembangunan gender Tahun 2017-2021 :

Tabel 3.58
Evaluasi Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,96	92,97	93,10	93,31	93,49

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) disetiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,96, pada Tahun 2018 meningkat menjadi 92,97, pada Tahun 2019 menjadi 93,10, pada tahun 2020 naik kembali sebesar 93,31 dan pada tahun 2022 menjadi 93,49 jauh diatas target yang sudah ditetapkan yaitu 93,20.



Berikut rincian IPG Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022:

Tabel 3.59
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 - 2021

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)				
		2021	2020	2019	2018	2017
1	KEPULAUAN RIAU	93.49	93.31	93.10	92.97	92.96
2	Karimun	91.00	91.25	90.91	91.48	91.35
3	Bintan	93.53	93.12	93.10	92.79	92.58
4	Natuna	91.95	91.67	91.72	91.62	91.31
5	Lingga	89.73	89.25	89.26	89.29	89.73
6	Kepulauan Anambas	90.30	90.27	90.16	90.12	89.97
7	Kota Batam	94.51	94.43	94.42	94.22	94.21
8	Kota Tanjung Pinang	97.14	96.79	96.77	96.47	96.46
9	INDONESIA	91.27	91.06	91.07	90.99	90.96

Sumber BPS 2022

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) dalam kurung waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan capaian setiap tahunnya bahkan capaiannya melebihi capaian IPG Nasional Tahun 2022.

IPG Tahun 2022 (93,49) menunjukan kenaikan dari tahun sebelumnya (93,31). kenaikan IPG Tahun 2022 dapat dilihat pada tiga komposit pendukung IPG antara lain : Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, dan Angka Pengeluaran Perkapita.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang di harapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada tahun 2021 HLS penduduk laki-laki sebesar 12,85 tahun dan penduduk perempuan sebesar 13,15 tahun. Hal ini menunjukkan hampir tidak ada ketimpangan dalam hal harapan lama sekolah di Provinsi Kepri antara perempuan dan laki-laki atau juga menunjukkan bahwa hampir setaranya harapan lama sekolah bagi perempuan dengan laki-laki di Indonesia. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.60
Angka Harapan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau

	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
	2020	2021	2020	2021
KEPULAUAN RIAU	12,84	12,85	12,97	13,15
Karimun	12,19	12,35	12,85	12,92
Bintan	12,99	13,13	13,82	14,02
Natuna	13,75	13,76	13,99	14
Lingga	12,86	12,87	12,11	12,35
Kepulauan Anambas	12,78	12,81	12,93	13,01
Kota Batam	13,05	13,06	13,18	13,19
Kota Tanjung Pinang	14,03	14,04	14,31	14,6

Sumber BPS 2022

Dalam pembangunan suatu bangsa, pendidikan yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan yang akan menentukan arah perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dan negara. Pendidikan merupakan faktor penting dalam kemajuan pembangunan manusia karena pendidikan membawa dampak yang positif bagi kualitas manusia. Indikator pembentuk IPG selanjutnya adalah Rata-rata Lama sekolah (RLS), seperti halnya pembentuk indikator IPM. Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: (1) *partisipasi sekolah* (2) *jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki* (3) *ijazah tertinggi yang dimiliki* (4) *tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki*. Selama periode 2020 - 2021 capaian RLS penduduk laki-laki masih lebih tinggi dari capaian penduduk perempuan. Kondisi ini ditunjukkan oleh capaian yang mengalami kesenjangan. Untuk melihat capaian rata-rata lama sekolah secara rinci menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.61
Rata – Rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau

	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
	2020	2021	2020	2021
KEPULAUAN RIAU	10,25	10,30	9,98	10,06
Karimun	8,48	8,49	7,81	7,82
Bintan	8,94	8,95	8,33	8,56
Natuna	9,13	9,14	8,63	8,83



Lingga	7,2	7,38	6,42	6,67
Kepulauan Anambas	7,44	7,65	6,72	6,85
Kota Batam	11,33	11,34	10,97	11,04
Kota Tanjung Pinang	10,43	10,44	10,25	10,26

Sumber BPS 2022

Pada indikator Pengeluaran Perkapita, penduduk laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan capaian penduduk perempuan. Pada tahun 2020 terjadi kesenjangan pendapatan yang sangat tinggi untuk penduduk laki laki penduduk perempuan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama adalah terkait dengan kesempatan kerja dan keterampilan yang dimiliki. Untuk melihat lebih rinci capaian pengeluaran perkapita di provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.62
Pengeluaran Perkapita (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun)
di Provinsi Kepulauan Riau

	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
	2020	2021	2020	2021
KEPULAUAN RIAU	20 222	20 212	12 462	12 362
Karimun	18 308	18 307	9 722	9 615
Bintan	21 437	21 341	12 400	12 319
Natuna	21 035	21 049	11 520	11 521
Lingga	17 764	17 693	9 860	9 808
Kepulauan Anambas	17 017	17 083	9 097	9 173
Kota Batam	26 443	26 356	17 361	17 304
Kota Tanjung Pinang	18 740	18 644	15 037	14 984

Sumber BPS 2022

Perbandingan target akhir RPJMD dengan capaian tahun 2022 disajikan seperti pada tabel di bawah:

Tabel 3.63
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target akhir RPJMD Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,20	93,49	100,31%

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2022 maka Provinsi Kepulauan Riau masih diatas target pada akhir periode RPJMD (2022), di mana pada akhir periode RPJMD jumlah



Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kepulauan Riau ditargetkan sebesar 93,20, namun terealisasi sebesar 93,49 atau dengan capaian 100,31%.

Jika di bandingkan secara nasional dengan daerah lain, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2022 berada pada urutan ke- 6. Berikut data lengkap dari seluruh Provinsi se-Indonesia :

Tabel 3.64
Capaian Kinerja IPG Berdasarkan Provinsi se Indonesia
Tahun 2022

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) SE-INDONESIA		
RANGKING	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2021
	INDONESIA	91.27
1	D I YOGYAKARTA	94.88
2	DKI JAKARTA	94.84
3	SULAWESI UTARA	94.61
4	SUMATERA BARAT	94.34
5	BALI	94.01
6	KEPULAUAN RIAU	93.49
7	MALUKU	93.19
8	SULAWESI SELATAN	92.85
9	NUSA TENGGARA TIMUR	92.63
10	JAWA TENGAH	92.48
11	SUMATERA SELATAN	92.35
12	ACEH	92.23
13	SULAWESI TENGAH	91.91
14	BANTEN	91.83
15	JAWA TIMUR	91.67
16	BENGKULU	91.16
17	SUMATERA UTARA	90.73
18	SULAWESI TENGGARA	90.68
19	NUSA TENGGARA BARAT	90.53
20	LAMPUNG	90.37
21	MALUKU UTARA	89.75
22	SULAWESI BARAT	89.57
23	JAWA BARAT	89.36
24	KEP. BANGKA BELITUNG	89.11
25	KALIMANTAN SELATAN	88.86



26	KALIMANTAN TENGAH	88.79
27	JAMBI	88.62
28	RIAU	88.38
29	GORONTALO	87.50
30	KALIMANTAN UTARA	87.30
31	KALIMANTAN BARAT	86.95
32	KALIMANTAN TIMUR	85.95
33	PAPUA BARAT	83.00
34	PAPUA	80.16

Capaian IPG Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 sebesar 93,49 jauh diatas angka capaian Nasional yaitu sebesar 91,27, kondisi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat serius dalam memperhatikan kesetaraan gender dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun beberapa program pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Gender Provinsi (IPG) antara lain:

1) Memberikan Pemahaman kepada perempuan untuk menjadi perempuan yang cerdas.

Pembangunan karakteristik gender di Kepulauan Riau yang tentunya wajib mendapatkan perhatian penuh dari berbagai pihak, mengingat isu gender merupakan isu dengan lintas sektoral serta lintas disiplin ilmu yang beragam serta memiliki makna yang kuat dalam pembangunan, untuk itu upaya Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB melaksanakan Kegiatan yang dilakukan dari dana APBD tahun 2022 yaitu **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**. Kegiatan ini ialah kegiatan yang memberikan kontribusi kepada para perempuan untuk melanjutkan sekolah (Paket C). pada tahun 2022 18 orang perempuan mendapatkan bantuan untuk menyelesaikan sekolah Paket C. dengan anggaran sebesar Rp. 203.879.010,- dengan realisasi sebesar Rp. 199.872.716,- atau 98,03%. Adapun rincian program / kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat di tabel bawah ini :



Rincian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		FISIK
						Rp	%	
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan yang mengikuti sekolah perempuan	203.879.010	199.872.716	98,03	100

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian program / kegiatan / sub kegiatan ini ialah :

- a. Belum optimalnya capaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 25 orang, namun besaran anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 203.879.010,- Hal ini diakibatkan oleh 2 (dua) kali refocusing anggaran. Sehingga anggaran tersebut hanya cukup untuk mengakomodir 18 orang peserta sekolah perempuan di Provinsi Kepri.

2) Meningkatkan kontribusi perempuan dalam pendapatan

Kegiatan yang dilaksanakan dari dana APBD tahun 2022 antara lain **Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi** Rp. 897.760.016,- dengan Realisasai Rp. 887.305.786,- (98,84%), **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi** Rp. 1.717.402.622,- dengan Realisasi Rp. 1.667.369.137,- (97,09%). Selanjutnya kegiatan **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota** Rp. 409.350.900,- dengan Realisasi Rp. 400.484.795,- (97,83%). Dan terakhir kegiatan **Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi** Rp. 1.872.163.302,- dengan Realisasi Rp. 1.842.636.220,- (98,42%). Adapun rincian program / kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat di table bawah ini :



Rincian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		FISIK
						Rp	%	
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaku Industri Rumahan yang ditingkatkan kapasitasnya	897.760.016	887.305.786	98,84	100
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya dibidang ekonomi	1.717.402.622	1.667.369.137	97,09	100
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang terlatih untuk peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga	409.350.900	400.484.795	97,83	100
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan yang ditingkatkan keterampilan / life skil	1.872.163.302	1.842.636.220	98,42	100

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian program / kegiatan / sub kegiatan ini ialah :

- Rendahnya pendapatan ekonomi perempuan dilihat dari rendahnya angka rata-rata pengeluaran perkapita perempuan dimana hal ini dikarenakan kurangnya perempuan untuk bekerja pada sector formal. Hal ini dikarenakan pengeluaran perkapita adalah proksi dari pendapatan atau tingkat kesejahteraan secara ekonomi.
- Masih banyaknya perempuan yang enggan untuk mengikuti pelatihan pelatihan untuk peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas khususnya dibidang ekonomi.



Kebijakan pembangunan nasional telah menetapkan kesetaraan gender merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan yang dilihat dari Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Saat ini perempuan masih harus menghadapi berbagai ketimpangan, mulai dari mengakses, berpartisipasi, ikut menentukan arah, serta menikmati manfaat pembangunan. Hambatan yang dialami perempuan untuk mengakses layanan yang disebabkan persoalan struktur dan budaya patriarki, seperti pembatasan pendidikan perempuan serta capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah di mana saat ini laki-laki sebesar 10,30 tahun dan perempuan sebesar 10,06 tahun. inilah menjadi salah satu inisiasi peningkatan Life skill perempuan dan sekolah perempuan di Provinsi Kepulauan Riau.

➤ ***Efektifitas dan Efisiensi Sumber Daya***

- Dalam upaya mencapai sasaran : Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, Dinas P3AP2KB memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 103 orang, dengan rincian 42 org pegawai PNS, 26 Org pegawai PTT dan 35 Org pegawai THL dengan struktur organisasi terdiri dari 1 org Kepala Dinas, 6 orang pejabat Eselon III, 4 org Pejabat Eselon IV atau 14 orang pejabat fungsional yang disetarakan. Pegawai PTT dan THL dilingkungan Dinas P3AP2KB disamping berada di Dinas, juga berada di UPTD PPA, Workshop dan Puspaga (Pusat Pembelanjaraan Keluarga) dalam upaya pemberian perlindungan kepada perempuan dan anak, peningkatan keterampilan dan penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga.





BERPANCANG AMANAH BERSAUH MARWAH



➤ **Kendala yang dihadapi**

- Masih terjadi kesenjangan kesenjangan di berbagai macam bidang akibat situasi masa pandemi Covid-19 seperti: Kehilangan Pekerjaan, Pendapatan Menurun, Tingkat Stress meningkat, pekerjaan rumah tangga meningkat dan juga tanggungjawab mengajar anak sekolah secara daring, Produktivitas Usaha Menurun dengan meningkatnya beban yang bertambah berlipat-lipat, Menjadi tulang punggung keluarga karena pasangan meninggal atau sakit dan harus isolasi mandiri dan Peningkatan Kekerasan Berbasis Gender.

Hal ini menjadi kendala untuk optimalnya pelaksanaan peningkatan life skill perempuan.

- Pembinaan dan pendampingan lebih lanjut belum optimal dilakukan terhadap peserta peningkatan kapasitas baik ekonomi maupun sosial karena terkendala dengan lingkup jangkauan dinas.

➤ **Solusi**

- ✚ Salah satu upaya dilakukan pemerintah selain meningkatkan life skill perempuan adalah mendorong perempuan terlibat dalam perekonomian dan membangun jejaring sosial.
- ✚ Tindak lanjut berupa dukungan sosial dan support system dari Pemerintah. Perlu peraturan-peraturan yang menguntungkan perempuan. Termasuk juga institusi atau kelembagaan-kelembagaan harus mendukung perempuan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% EFISIENSI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan gender (IPG)	93,20	93,49	100,31	5.100.555.850,00	4.997.668.654,00	97,98	Efisien

SASARAN. 8
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam UU No. 36 tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Dalam rangka terwujudnya sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat maka ditetapkan indikator kinerja yaitu Prevalensi stunting.

Gizi baik merupakan fondasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas karena berkaitan erat dengan peningkatan kapasitas belajar, kemampuan kognitif dan intelektualitas seseorang. Gizi baik juga merupakan penanda keberhasilan pembangunan dan terpenuhinya hak azasi manusia terhadap pangan dan kesehatan. Perbaikan gizi masyarakat merupakan sarana untuk memutus rantai kemiskinan melalui meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada kesejahteraan di tingkat masyarakat, keluarga dan individu.

Sektor kesehatan khususnya peningkatan perbaikan gizi masyarakat merupakan salah satu fokus dalam pembangunan sesuai dengan RPJMD Kepulauan Riau 2021 – 2026 dan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menjadi salah satu sasaran pembangunan pemerintah daerah Kepulauan Riau.

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tidak lepas dari kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Kesehatan merupakan tanggung jawab semua elemen, baik pemerintah daerah, lintas program, lintas sektor, akademisi, praktisi, komunitas, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat akan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, hal ini akan menjadi investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.



Evaluasi capaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.65

**Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022**

NO	Indikator Kinerja	Target)	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prevalensi Stunting	15,8	15,4	102,6

Stunting adalah Keadaan gagal tumbuh dan kembang, gagal pertumbuhan tinggi badan tidak tercapai sesuai dengan anak seusianya (-2 SD Median) dimana kecerdasan intelektual dan emosional tidak tercapai dengan ciri-ciri tinggi badan lebih pendek dari seusianya, anak menjadi lebih pendiam dan apatis, tidak banyak melakukan eye contact, IQ nya rendah, pertumbuhan melambat tanda pubertasnya juga melambat, wajah tampak lebih muda dari usianya dan pertumbuhan gigi terlambat.

Indeks PB/U atau TB/U menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek (stunted) atau sangat pendek (severely stunted), yang disebabkan oleh gizi kurang dalam waktu lama atau sering sakit. Anak-anak yang tergolong tinggi menurut umurnya juga dapat diidentifikasi. Anak-anak dengan tinggi badan di atas normal (tinggi sekali) biasanya disebabkan oleh gangguan endokrin

Prevalensi stunting adalah jumlah balita yang mempunyai panjang badan atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur (PB/U atau TB/U - 3 SD <- 2 SD). Untuk data prevalensi stunting didapat melalui hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dipublikasikan setiap tahun oleh Kementerian Kesehatan RI. Per tahun 2022, capaian prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau dari hasil data SSGI sebesar 15,4%. Namun untuk rincian perhitungan capaian tersebut tidak dipublikasikan.

Berdasarkan data SSGI 2022, menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi terendah nomor 4 se-Indonesia setelah Bali, DKI Jakarta dan Lampung dalam hal prevalensi stunting. Untuk pengukuran kinerja, maka capaian prevalensi stunting Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam kategori **sangat baik** karena sudah melampaui target dengan capaian kinerja sebesar 102,6 %.



Berikut disampaikan capaian indikator meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 - 2022 :

Tabel 3.66
Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2022

NO	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2021	2022
1.	Prevalensi Stunting	17,6	15,4

Dilihat data tabel diatas prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 sebesar 17,6% mengalami penurunan sebesar 2,2% dimana prevalensi stunting pada tahun 2022 sebesar 15,4%. Sementara itu prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 8,2 %. Sementara itu prevalensi stunting di Provinsi pada tahun 2022 dibandingkan dengan prevalensi tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,4%. Prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan prevalensi pada akhir tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar 8,2%.

Perbandingan target dan realisasi prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.67
Capaian Kinerja Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 - 2022

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi
1.	Prevalensi stunting	2018	21.35	23.6
		2019	20.85	16.8
		2020	20.35	7.2
		2021	20	17.6
		2022	15.8	15.4

Sementara itu capaian pada prevalensi stunting pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target nasional maka sudah diatas target yang ditetapkan. dImana pada tahun 2022 prevalensi stunting di Kepulauan Riau sebesar 15,4% dibawah target nasional 18,4%.



Tabel 3.68
Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prevalensi Stunting	18,4	15,4	119,5

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2022 di bandingkan dengan target nasional maka persentase *stunting* Provinsi Kepulauan Riau sangat baik karena sudah melampaui target dengan capaian nasional sebesar 119,5 % atau dalam kategori **sangat baik**.

Berikut jumlah prevalensi stunting di 7 kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 – 2022 sebagai berikut

Tabel 3.69
Prevalensi Stunting se- Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2022

NO	Kabupaten Kota	2021	2022
1.	KARIMUN	17,6	13,3
2.	BINTAN	20	17,8
3.	NATUNA	17,8	18
4.	LINGGA	25,4	18,9
5.	KEPULAUAN ANAMBAS	21,7	14
6.	BATAM	17,5	15,2
7.	TANJUNGPINANG	18,8	15,7
8.	PROVINSI	17,6	15,4

Pada tahun 2022, prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau tertinggi di Kabupaten Lingga dengan capaian 18,9 % dan terendah di Kabupaten Karimun 13,3%. Apabila dilihat angka Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan semua Kabupaten/Kota mengalami penurunan, kecuali Kabupaten Natuna yang mengalami kenaikan prevalensi sebesar 0,2%. Penurunan prevalensi tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 7,7% disusul dengan lingga (6,5%) dan karimun (4,3%).



Berikut disampaikan prevalensi stunting di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2021 – 2022 :

Tabel 3.70
Persentase Stunting di Indonesia Tahun 2021-2022

NO	Kabupaten Kota	2021	2022
1.	BALI	10,9	8
2.	DKI JAKARTA	16,8	14,5
3.	LAMPUNG	18,5	15,2
4.	KEPULAUAN RIAU	17,6	15,4
5.	DI YOGYAKARTA	17,3	16,4
6.	RIAU	22,3	17
7.	dst		
8.	INDONESIA	24,4	21,6

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa secara nasional prevalensi stunting di Indonesia menurun dari tahun 2021 sebesar 24,4% menjadi 21,6% pada tahun 2022. Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami penurunan stunting dari tahun 2021 17,6% menjadi 15,4% pada tahun 2022, angka ini menjadikan Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi provinsi terendah prevalensi stunting ke 4 se Indonesia selama 2 tahun berturut-turut.

Untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berusaha memaksimalkan sumber daya manusia yang ada. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berusaha mencapai sasaran dengan melibatkan seluruh stakeholder baik dari lintas program maupun lintas sektor. Adapun OPD yang mendukung dalam penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau telah tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 901 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kepulauan Riau.

Sementara itu Provinsi Kepulauan Riau juga telah berusaha memaksimalkan penggunaan sumber daya anggaran untuk mencapai sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.71
Tingkat Efisiensi dari capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran yang
dipergunakan untuk pencapaian sasaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	15,4	102,6	1,888,809,330	96,02	+6,58

Di lihat dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dari target 15,4 tercapai 102,6% pada tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran, maka untuk tingkat efisiensi sebesar positif 6,58%.

Tabel 3.72
Tingkat Efisiensi dari capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran yang
dipergunakan untuk pencapaian sasaran Tahun 2022-2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021			2022		
		% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	113,6	89,97	+23,63	102,6	96,02	+6,58

Persentase tingkat efisiensi pada tahun 2022 mencapai +6,58%, sedangkan persentase efektifitas pada tahun 2021 sebesar +23,63%. Jumlah anggaran yang dipergunakan untuk pencapaian sasaran tahun 2022 sebesar Rp. 1,888,809,330,- mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana anggaran dukungan untuk menurunkan prevalensi stunting sebesar Rp. 2,785,791,500,-.

Walaupun dari segi anggaran untuk sasaran tersebut menurun akan tetapi prevalensi stunting Provinsi Kepulauan Riau terus bergerak menurun, hal ini dikarenakan penurunan stunting dipengaruhi oleh upaya dalam jangka panjang. Penurunan ini telah berada di atas target yang ditetapkan oleh pemerintah.



Keberhasilan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau merupakan hasil dari peran aktif lintas program dan lintas sektor. Prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau dapat diturunkan dan mencapai target kinerja ditetapkan karena peran dari berbagai pihak yang turut terlibat dalam Penanganan stunting sesuai yang diamanatkan pada perpres 72 tahun 2021. Penanganan stunting telah menysasar sektor sensitif yaitu penanganan diluar kesehatan dengan melibatkan OPD terkait dimana sektor ini memberikan kontribusi 70% dalam upaya penurunan stunting. Adapun hal-hal yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas PU dan Dinas Perkim terkait penyediaan akses air bersih dan sanitasi.
- Setiap keluarga miskin harus memiliki Jaminan Sosial berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat)
- Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas PP dan KB terkait layanan kesehatan dan KB
- Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
- Optimalisasi Pemanfaatan/Konsumsi Pangan Sayur, Buah dan Protein bersumber hewani kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan
- Kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan melalui program ketahanan pangan dan gizi.
- Meningkatkan konsumsi Ikan melalui Program Gemarikan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan
- Selain upaya sensitif, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kesehatan dan jajarannya juga melakukan upaya-upaya spesifik dalam menangani permasalahan dan pencegahan stunting diantaranya

Upaya spesifik :

- Pemberian bantuan F100 bagi balita kasus gizi buruk
- Pelacakan kasus gizi buruk dan gizi kurang bagi balita yang tidak datang ke Posyandu melalui sweeping
- Pemberian Suplemen Taburia pada balita stunting
- Perawatan kasus gizi buruk di Puskesmas dan Rujukan ke Rumah Sakit
- Distribusi dan Pemberian PMT bagi Ibu Hamil dan Balita gizi kurang



- Pemantauan kasus gizi buruk pasca perawatan (Follow up)
- Konseling pada keluarga melalui kunjungan rumah
- Program 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) berupa pemberian tablet Fe (zat besi) pada Ibu Hamil, IMD, ASI Eksklusif, MP-ASI
- Pemberian tablet Fe kepada Remaja putri dengan konsumsi 1 tablet perminggu sepanjang tahun.
- Konseling pra nikah kepada calon pengantin dengan berkerjasama dengan KUA
- Integrasi program KIA – Gizi melalui Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita
- Sosialisasi Gerakan KADARZI, Gizi Seimbang melalui media massa dan elektronik.

Kedepannya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga akan terus mengupayakan agar upaya preventif dalam pencegahan stunting di kedepankan melalui perbaikan status gizi remaja putri, calon ibu, ibu hamil dan Balita. Sehingga semakin dini stunting dideteksi maka penanganan akan semakin mudah.

➤ **Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja**

Jumlah total anggaran pada Dinas Kesehatan tahun 2022 termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Rp. 80,940,668,237.00.- (Delapan Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Tabel 3.73
Realisasi Keuangan APBD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022 yang Menunjang Persentase Balita Pendek (stunting) Pada anak balita
Provinsi Kepulauan Riau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET
1	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	961,848,100	922,744,092	95.93	
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	672,383,530	623,036,366	92.66	
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	254,577,700	253,230,100	99.47	
			Total Anggaran	1,888,809,330	1,799,010,558	96.02	Efisien



Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis “meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” melalui pelaksanaan Program/kegiatan dalam upaya menurunkan prevalensi stunting per tahun 2022 sebesar Rp. 1,888,809,330.- dengan realisasi sebesar Rp. 1,799,010,558,- atau 96,02 %.

Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam penurunan stunting oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2022 seperti pelacakan kasus gizi buruk, pelatihan bagi petugas kesehatan dan kader dalam hal komunikasi antar pribadi dalam penurunan stunting, pelatihan manajemen balita sakit dan tata laksana balita gizi buruk, pelatihan USG bagi dokter di Puskesmas, peningkatan kapasitas kader posyandu, pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat, pembudayaan Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan), pencapaian imunisasi dasar lengkap bagi anak, penanggulangan kecacingan dan sebagainya. Berikut ini dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan : Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis “meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” melalui pelaksanaan Program/kegiatan dalam upaya menurunkan prevalensi stunting per tahun 2022 sebesar Rp. 1,888,809,330.- dengan realisasi sebesar Rp. 1,799,010,558,- atau 96,02 %.

Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam penurunan stunting oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2022 seperti pelacakan kasus gizi buruk, pelatihan bagi petugas kesehatan dan kader dalam hal komunikasi antar pribadi dalam penurunan stunting, pelatihan manajemen balita sakit dan tata laksana balita gizi buruk, pelatihan USG bagi dokter di Puskesmas, peningkatan kapasitas kader posyandu, pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat, pembudayaan Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan), pencapaian imunisasi dasar lengkap bagi anak, penanggulangan kecacingan dan sebagainya.

Berikut ini dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan :

DOKUMENTASI KEGIATAN



Pelacakan Balita Stunting



Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan Balita di Posyandu

SASARAN. 9
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar

➤ **Rasio Elektrifikasi**

Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari atas ribuan pulau, sehingga masih banyak daerah yang belum merasakan aliran listrik dari PLN. Banyak daerah-daerah terpencil di Provinsi Kepulauan Riau yang belum teraliri listrik. Penyebab utamanya dikarenakan infrastruktur ketenagalistrikan belum tersedia karena rata-rata wilayah yang belum mendapat pasokan listrik merupakan wilayah perdesaan yang secara geografis berada di pulau-pulau yang sangat jauh dari perkotaan. Merupakan suatu kenyataan bahwa kebutuhan akan energi listrik semakin meningkat ditambah seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan pembangunan di bidang teknologi, industri dan informasi. Namun pelaksanaan penyediaan energi listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero), selaku lembaga resmi yang ditunjukkan oleh pemerintah untuk mengelola masalah kelistrikan di Indonesia, sampai saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi listrik secara keseluruhan.

Berikut dapat dilihat capaian kinerja Percepatan Infrastruktur Dasar dengan indikator Rasio Elektrifikasi tahun 2022:

Tabel 3.74

Capaian Kinerja Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar
Rasio Elektrifikasi Tahun 2022

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1	Rasio Elektrifikasi	95,5 Rasio	96,32 Rasio	101 Rasio

Evaluasi terhadap persentase rasio elektrifikasi tahun 2022 dapat digambarkan jumlah rumah tangga yang memakai tenaga listrik (baik dari PLN maupun Non PLN) sebesar 650.793 RT dibagi dengan jumlah rumah tangga Provinsi Kepulauan Riau sebesar 675.631 RT= 96,32%.

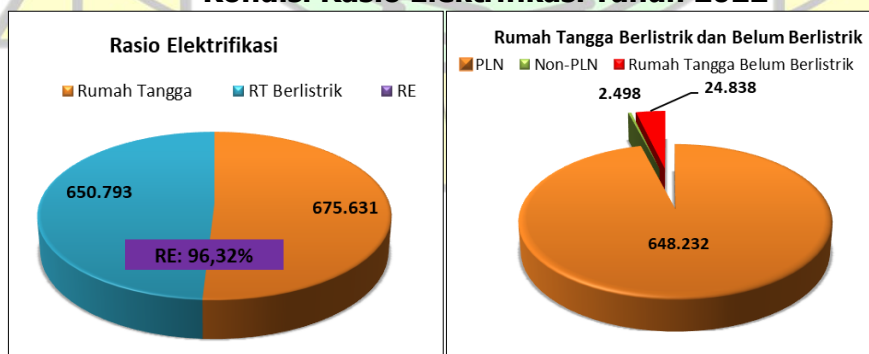
Hasil analisis Rasio Elektrifikasi pada tahun 2022 dengan target sebesar 95,5 Rasio dapat tercapai sebesar 96,32 Rasio sehingga capaian kinerja sebesar 101 Rasio atau dalam kategori **kinerja Sangat Baik**.

Penambahan yang sangat signifikan ini disebabkan meningkatnya penyambungan listrik kepada masyarakat oleh PT. PLN (Persero) dengan terlaksananya beberapa program kelistrikan seperti Program Bantuan Penyambungan Listrik PLN bagi Rumah Miskin, Program Listrik Pedesaan Tahun 2022, program melistriki daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) program merangkai pulau-pulau dengan kelistrikan, serta adanya program penambahan pembangunan kelistrikan Non PLN di beberapa daerah di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau. Keberhasilan pencapaian Sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Program Pengelolaan Energi Terbarukan dengan kegiatan, yaitu:

1. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan dengan melakukan pengadaan dan pemasangan instalasi listrik baru kepada masyarakat tidak mampu yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang belum berlistrik, pengadaan pembangkit tenaga disel (Genset) di pulau-pulau yang belum berlistrik.
2. Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi antara lain dalam pemanfaatan Energi Baru Terbarukan khususnya Pemasangan *Solar Home system* (SHS).

Capaian kinerja dibidang kelistrikan di Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan dengan jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik PLN, rumah tangga yang menggunakan listrik Non-PLN (baik yang diadakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, swasta) dan rumah tangga yang belum menggunakan listrik ditampilkan sebagai berikut :

Grafik 3.8
Kondisi Rasio Elektrifikasi Tahun 2022





Untuk kondisi rasio elektrifikasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.75
Data Rasio Elektrifikasi
Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Berlistrik				Rumah Tangga Belum Berlistrik	RE (%)
			PLN	Non-PLN	LTSHE	Jumlah		
1	BINTAN	58.866	57.705	214	-	57.289	1.577	97,32
2	KARIMUN	83.237	80.155	274	-	80.429	2.808	96,63
3	NATUNA	24.932	24.667	-	-	24.667	265	98,94
4	LINGGA	30.944	27.416	152	-	27.568	3.376	89,09
5	KEP. ANAMBAS	15.203	14.554	46	-	14.600	603	96,03
6	BATAM	369.796	351.961	1.812	63	353.836	15.960	95,68
7	TANJUNGPINANG	92.653	92.404	-	-	92.404	249	99,73
Total Provinsi Kepri		675.631	648.232	2.498	63	650.793	24.838	96.32%

Grafik 3.9
Rasio Elektrifikasi
Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022



Keterangan:

1. Jumlah Rumah Tangga Berlistrik PLN berdasarkan Data Unit Layanan Pelanggan PT. PLN (Persero) UP3 Tanjungpinang dan Pemegang Wilayah Usaha Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau.



2. Jumlah Rumah Tangga Berlistrik Non PLN berdasarkan wilayah yang mendapatkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Komunal baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berikut realisasi serta capaian kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2022 :

Tabel 3.76
Realisasi dan Capaian Kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2022

Indikator kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian
Rasio Elektrifikasi	94,50%	94,50%	100	95,5 Rasio	96,32 Rasio	101 Rasio

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi dan capaian kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 ke tahun 2022 terdapat peningkatan yaitu pada tahun 2021 dengan target 94,50% terealisasi sebesar 94,50% dengan persentase capaian 100%, sedangkan pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi 96,32 Rasio dari target sebesar 95,5 Rasio dengan persentase capaian sebesar 101 Rasio.

Adapun perkembangan Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

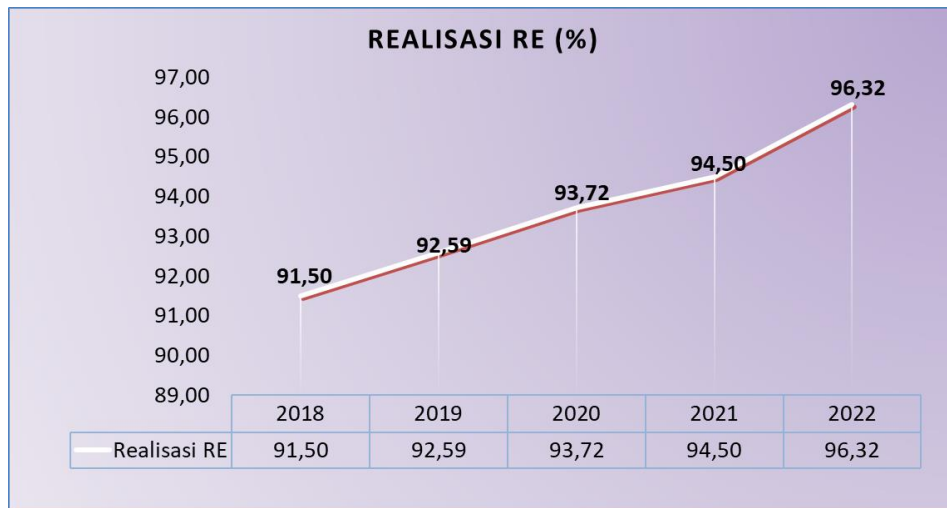
Tabel 3.77
Evaluasi Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018-2022

No	Indikator kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Jumlah Pelanggan Rumah Tangga (RT)	523.931	539.421	628.596	635.593	650.793
2	Jumlah Rumah Tangga (RT)	572.581	582.570	670.701	672.614	675.631
3	Rasio Elektrifikasi	91,50%	92,59%	93,72%	94,50%	96,32 Rasio

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan rasio elektrifikasi dari tahun 2018 ke tahun 2022. Pada tahun 2018 realisasi rasio elektrifikasi sebesar 92,50%, pada tahun 2019 meningkat menjadi 92,59%, lalu pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 93,72%, tahun 2021 juga meningkat menjadi 94,5 Rasio, tahun 2022 kembali meningkat menjadi 96,32 Rasio.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2018-2022 dapat digambarkan seperti grafik dibawah ini :

Grafik 3.10
Pencapaian Realisasi Kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2018-2022



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan Rasio Elektrifikasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2018 Rasio Elektrifikasi sebesar 91,50% sedangkan sampai dengan tahun 2022 meningkat menjadi 96,32 Rasio maka ada peningkatan sebesar 4,82 Rasio.

Dalam rangka peningkatan cakupan pemenuhan kebutuhan listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat beberapa kendala yaitu:

1. Masih terdapat sebagian masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang belum menikmati listrik, terutama di daerah terpencil dan kurang mampu dengan wilayah tersebar dikarenakan kondisi geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil dan jarak antara pulau yang terpisah jauh dan keterbatasan anggaran baik di PT. PLN (Persero), Pemerintah Pusat maupun APBD serta jenis sumber energi primer yang terbatas.
2. Untuk rasio desa berlistrik, selain kendala diatas adalah masalah mobilisasi material ke lokasi pembangkit yang akan dibangun oleh PT. PLN (Persero), serta tanah/jalur yang akan dilalui jaringan distribusi tegangan menengah.



Berdasarkan kendala tersebut diatas, upaya yang dilakukan diantaranya yaitu:

1. Menggunakan pembangkit yang kecil, tersebar dan menghubungkan antar pulau yang berdekatan serta memanfaatkan sumber energi primer yang tersedia melimpah di Provinsi Kepulauan Riau, serta melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan pemerintah daerah setempat, tokoh masyarakat, alim ulama dan pemilik lahan yang akan dihibahkan atau jalur yang dilalui jaringan distribusi tegangan menengah.
2. Peran aktif dari pemilik wilayah usaha ketenagalistrikan, peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja:

A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

1. Anggaran

Pagu Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 mengalami rasionalisasi berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri pagu anggaran.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia/personil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau telah cukup memadai dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan.

Program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dalam menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Rasio Elektrifikasi sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Rp. 8.081.192.888,- terealisasi Rp. 7.906.454.263,29 (97,84%) pada sub kegiatan :



- Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu dengan pagu Rp. 1.705.405.863,-, terealisasi Rp. 1.631.220.943,- (95,65%).
 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan dengan pagu Rp. 47.438.000,-, terealisasi Rp. 33.039.400,- (69,65%).
 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan dengan pagu Rp. 6.170.672.025,-, terealisasi Rp. 6.091.280.836,29 (98,71%).
 - Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan dengan pagu Rp. 157.677.000,-, terealisasi Rp. 150.913.084,- (95,71%).
2. Program Pengelolaan Energi Terbarukan dengan Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi pada Sub Kegiatan sebagai Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi dengan pagu Rp. 2.754.313.630,-, terealisasi Rp. 2.742.121.590,63,- (99,56%).

➤ **Pengurangan Luas Kawasan Kumuh**

A. Perbandingan Target dan Realisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar ditetapkan indikator kinerja yaitu Pengurangan Luas Kawasan Kumuh. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, pengurangan luas Kawasan kumuh pada tahun anggaran 2022 dapat dilakukan dengan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan dengan perizinan, standar teknis dan kelayakan fungsi. Keseuaian standar teknis dan kelayakan fungsi dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis, antara lain :

1. Bangunan Gedung;
2. Jalan lingkungan;
3. Penyediaan air minum;



4. Drainase lingkungan;
5. Pengelolaan air limbah;
6. Pengelolaan persampahan; dan
7. Proteksi kebakaran.

Pemenuhan kesesuaian standar teknis dan kelaikan fungsi yang di capai pada tahun anggaran 2022 dalam pencegahan dan/atau pengurangan luas kawasan kumuh, sebagaimana disampaikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.78
Capaian Kesesuaian Standar Teknis dan Kelaikan Fungsi Tahun 2022

No.	Kriteria Kekumuhan	Indikator Kekumuhan	Jumlah Target Awal	Satuan	Capain Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
1	Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	2.125	Unit	750
		Tingkat Kepadatan Bangunan	-	Ha	0
		Ketidaksesuaian Dengan Persyaratan Teknis	476	Unit	0
2	Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	12.830,28	Meter	4.084
		Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	42.501,05	Meter	3.085
3	Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1.216	KK	16
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	2.051	KK	16
4	Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	28,10	Ha	0
		Ketidaktersediaan Drainase	11.056,47	Meter	334
		Kualitas Konstruksi Drainase	49.744,98	Meter	650
5	Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	338	KK	0
		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	1.595	KK	0
6	Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	3.232	KK	0
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	2.865	KK	36
7	Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	1.977	Unit/KK	699



LAPORAN KINERJA INSTANSI 2022 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Kriteria Kekumuhan	Indikator Kekumuhan	Jumlah Target Awal	Satuan	Capain Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	3.659	Unit/KK	0

Sumber Data diolah dari Data Kotaku

Lokasi pencegahan dan pengurangan luas kawasan kumuh yang dicapai dan/atau dijangkau pada tahun anggaran 2022 berada pada 3 (tiga) lokasi, sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.79
Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh Tahun 2022

No.	Lokasi Kumuh / Kelurahan	Alokasi Anggaran (Rp)	Luas Capaian Kumuh (Ha)
1	2	3	4
1	Baloi Permai – Kota Batam	2.035.529.336,00	6,08
2	Batu Merah – Kota Batam	169.982.226,00	0,51
3	Sagulung Kota – Kota Batam	1.898.300.932,00	5,67
4	Sungai Harapan – Kota Batam	590.679.920,00	1,76
5	Dompak – Kota Tanjungpinang	633.043.808,00	1,89
6	Kampung Bulang – Kota Tanjungpinang	657.769.142,00	1,96
7	Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang	335.590.172,00	1,00
8	Tanjung Uban Kota – Kabupaten Bintan	1.483.425.168,00	4,43
	Jumlah	7.804.320.704,00	23,30



Evaluasi Capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.80
Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	145.27 Ha	147.24 Ha

Hasil evaluasi Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun 2022 dengan target 145.27 Ha terealisasi sebesar 147.24 Ha, sehingga penurunan Luasan kumuh yang ditargetkan Tahun 2022 sebesar 25.27 Ha dapat tertangani sebesar 23.30 Ha. Sehingga capaian kinerja Indikator Pengurangan Luas Kawasan Kumuh sebesar 92,20% atau dalam kategori **kinerja sangat memuaskan**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Berikut perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun 2021 dan tahun 2022:

Tabel 3.81
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		2022	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	381,45 Ha	66,87%	147.24 Ha	92.20%

Pengurangan Luas Kawasan Kumuh merupakan pengurangan Luas Total kawasan kumuh Kewenangan Provinsi dikurangi Luas kawasan kumuh Kewenangan Provinsi yang ditangani pada tahun n. Evaluasi terhadap Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun 2022 dapat digambarkan dengan formulasi Luas Total kawasan kumuh Kewenangan Provinsi sebesar 170,54 Ha dikurangi Luas kawasan kumuh Kewenangan Provinsi yang ditangani pada tahun 2022 sebesar 147.24 Ha.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022

Berdasarkan capaian realisasi kinerja Tahun 2022 maka indikator kinerja Pengurangan Luas Kawasan Kumuh mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.82
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022

Indikator Kinerja	2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	255,09 Ha	381,45 Ha	145.27 Ha	147.24 Ha

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dari Tahun 2021 ke Tahun 2022. Pada Tahun 2021 Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi sebesar 18.43 Ha sedangkan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 23.30 Ha. Adapun Penanganan Kumuh pada setiap Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.83
Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Pada Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022

KOTA/KAB	NOMOR SK TERAKHIR	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	KEWENANGAN PROVINSI (10-15Ha)	PENANGANAN KUMUH PER TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
BINTAN	435/IX/2014	BINTAN UTARA	TANJUNG UBAN KOTA	13,6	1,48				
		1	1	13,6	1,48	0	0	0	0
LINGGA	17/KPTS/I/2017	LINGGA	PANGAK LAUT	10,02					
LINGGA	17/KPTS/I/2017	SINGKEP BARAT	MAROK TUA	13,3					
		2	2	23,32	0	0	0	0	0
BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	BULANG	PANTAI GELAM	12,38					
BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	BULANG	TEMOYONG	14,88					
BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	BULANG	BATU LEGONG	12,18					
BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	SAGULUNG	SAGULUNG KOTA	10,7	1,90				
BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	BATAM KOTA	BALOI PERMAI	11,67	2,04				
BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	SEKUPANG	SUNGAI HARAPAN	12,6	0,59				
BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	SEKUPANG	TANJUNG PINGGIR	10,84					
BATAM	KPTS.290/HK/X/2019	BATUAMPAR	BATU MERAH	14,6					
		8	8	99,85	4,52	0	0	0	0
TANJUNGPINANG	594 Tahun 2019	BUKIT BESTARI	TANJUNGPINANG TIMUR	11,79	7,11				
TANJUNGPINANG	594 Tahun 2019	BUKIT BESTARI	DOMPAK	11,16	1,08				
TANJUNGPINANG	594 Tahun 2019	TANJUNGPINANG TIMUR	KAMPUNG BULANG	10,82	9,1				
		3	3	33,77	17,29	0	0	0	0
TOTAL		14,00	14,00	170,54	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Tahun 2022 terdapat di Kelurahan Tanjunguban Kota, Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Baloi Permai, Kelurahan Sungai Harapan, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Dompok dan Kelurahan Kampung Bulang.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Nasional

Penanganan permukiman kumuh dilakukan pada lokasi permukiman kumuh yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota, berdasarkan penilaian indikator dan kriteria kumuh yang tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dapat dilihat perbandingan realisasi capaian indikator kinerja Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dengan target nasional pada tabel berikut :

Tabel 3.84
Perbandingan Realisasi Kinerja Provinsi dan Target Nasional Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi Provinsi	Capaian
1	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	10.000 Ha	147.24 Ha	1,47%

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024, salah satunya menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 4,4% (menjadi 10.000 ha).

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dinilai atas dua aspek yaitu kinerja pembangunan yang dinilai melalui pencapaian sasaran strategis dan kinerja keuangan yang dinilai dari tingkat penyerapan dana dan tingkat efisiensi keuangan. Penanganan Kawasan kumuh berdasarkan RPJMD 2021-2026 seluas 170,54 Ha. Pada Tahun anggaran 2022 ditargetkan Pengurangan Luasan Kawasan kumuh sebesar 25.27 Ha, sehingga berkurang menjadi 145.27 Ha, realisasi Pengurangan Luas Kawasan Kumuh pada tahun 2022 sebesar 23.30 Ha atau sebesar 92,20% dari target di tahun 2022. Pendekatan penanganan permukiman kumuh dilakukan dengan memperhatikan tingkat kekumuhan dan tipologi permukiman. Peningkatan Penanganan



Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun 2022 antara lain di Kota Tanjungpinang, Kota Batam dan Kabupaten Bintan.

F. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang diuraikan diatas, maka secara rata-rata persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau dalam kategori **sangat memuaskan**. Dukungan program/kegiatan/subkegiatan penunjang capaian kinerja Pengurangan Luasan Kawasan kumuh pada tahun anggaran 2022 Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari rincian sebagai berikut :

Tabel 3.85
Program/Kegiatan Penunjang Capaian Pengurangan Luas Kawasan Kumuh

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran				Ket
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi	
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	145.27 Ha	147.24 Ha	92.20%	1.372.943.274,00	1.292.304.000,00	94,13%	-	-
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1.372.943.274,00	1.292.304.000,00	94,13%		
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1.372.943.274,00	1.292.304.000,00	94,13%		
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	145.27 Ha	147.24 Ha	92.20%	6.431.377.430	6.424.568.416	99,89%	-	-
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman				6.431.377.430	6.424.568.416	99,89%		
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman				6.431.377.430	6.424.568.416	99,89%		

G. Analisis Atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Pagu Anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 untuk penanganan pengurangan luas Kawasan kumuh adalah Rp 7.804.320.704,00 atau sebesar 3,54% dari total pagu APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sejumlah Rp220.358.678.160,00.

2. Sumber Daya Manusia

Di lingkungan internal jumlah Sumber Daya Manusia/Personil terkait tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau cukup memadai dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan yang terdiri dari 35 ASN, 22 PTT dan 38 THL sedangkan dari eksternal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau yang perlu dilakukan adalah memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk pembinaan pencegahan kelompok agar potensi Kawasan permukiman kumuh tidak bertambah dan menjadi Kawasan Kumuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Indikator kinerja yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dikategorikan tercapai dengan baik berdasarkan capaian kinerja 92,20% dan sesuai dengan target waktu pelaksanaan yang telah direncanakan.

SASARAN. 10
Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan
Pengintegrasian Antar Pulau

Infrastruktur merupakan syarat dasar yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ketika keadaan infrastruktur di sebuah daerah lemah, itu hanya berarti bahwa perekonomian daerah itu berjalan dengan cara yang tidak efisien. Biaya logistik yang sangat tinggi dan sulitnya penduduk untuk mengakses layanan publik adalah beberapa dampak dari buruknya ketersediaan infrastruktur. Hasil akhirnya kesejahteraan menjadi rendah (tidak tumbuh).

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi makro memiliki hubungan timbal balik. Pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek multiplier, sementara ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada.

Hingga saat ini kondisi infrastruktur di Kepulauan Riau secara makro sudah cukup baik, namun terdapat permasalahan pada pemerataan infrastruktur yang tersedia. Ketidakmerataan infrastruktur itu dapat diidentifikasi dari tingginya ketimpangan kesejahteraan antar-Kabupaten/Kota.

Ketimpangan antarwilayah untuk mengejar perkembangan kebutuhan ekonomi dan sosial berdampak pada kesejahteraan yang rendah. Banyak kajian menyatakan bahwa untuk kasus Indonesia lambatnya pengembangan infrastruktur dihambat oleh sulitnya masalah pembebasan lahan dan tingginya biaya infrastruktur, sementara swasta memiliki keengganan yang tinggi untuk berinvestasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur.

Saat ini kondisi pembangunan di perkotaan dan perdesaan dimana terjadi ketimpangan yang sangat besar, kondisi infrastruktur merupakan salah satu komponen yang dapat dilihat. Pembangunan ekonomi selalu dipusatkan di daerah perkotaan yang lebih maju dan lebih siap infrastrukturnya daripada daerah perdesaan. Kondisi ini dapat diamati di provinsi Kepulauan Riau, Terciptanya konektivitas atau keterhubungan antar wilayah diperlukan untuk membuka ruang-ruang baru untuk menyatukan suatu negara. Ketimpangan pembangunan antar wilayah tidak akan lagi tercipta karena pembangunan tidak berfokus di wilayah tertentu dan tanpa diskriminasi pada daerah yang dianggap

terbelakang. Dengan konsep perspektif regional ini maka pembangunan antar wilayah tidak lagi berdiri sendiri namun ada konektivitas diantaranya. Konektivitas tersebut diwujudkan dalam ketersediaan infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah satu dengan yang lain dan meminimalisir adanya kesenjangan antar wilayah. Pembangunan ini akan meningkatkan dan meratakan pembangunan, minimal pembangunan secara ekonomi, dan memangkas angka kemiskinan.

1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

Indikator Rasio Konektivitas Provinsi merupakan gabungan indikator kinerja angkutan darat, angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi.

Berikut ini adalah data jumlah layanan trayek angkutan darat (Angkutan Perkotaan dan AKDP) dan Lintas angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi.

Tabel 3.86
Data Trayek Angkutan Darat Dalam Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Trayek Angkutan Darat
1	Tanjungpinang – Tanjung Uban (Kab. Bintan)
2	Tanjung Uban (Kab. Bintan) - Tanjungpinang
3	Tanjungpinang – Berakit (Kab. Bintan)
4	Berakit (Kab. Bintan) - Tanjungpinang
5	Tanjungpinang – Kijang (Kab. Bintan)
6	Kijang (Kab. Bintan) - Tanjungpinang

Tabel 3.87
Data Lintasan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

NO	Lintas Penyeberangan
1	Tanjung Pinang - Tanjung Balai Karimun
2	Dabo - Tanjung Pinang
3	Tanjung Balai Karimun - Kundur
4	Tanjung Balai Karimun - Mengkapan Sei. Selari
5	Dabo - Penarik
6	Dabo - Kuala Tungkal
7	Tanjung Uban - Tambelan
8	Tambelan - Sintete
9	Tanjung Uban - Matak
10	Matak - Midai
11	Midai - Penagi



12	Penagi - Subi
13	Subi - Serasan
14	Serasan - Sintete
15	Telaga Punggur - Dabo
16	Telaga Punggur - Kuala Tungkal
17	Telaga Punggur - Mengkapan Sei Selari
18	Tanjung Balai Karimun - Telaga Punggur

Berdasarkan data trayek dan lintas angkutan diatas maka indikator rasio konektivitas pada tahun 2022 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio konektivitas
Rumus	:	$\text{Rasio konektivitas} = (\text{IK1} \times \text{bobot angkutan jalan}) + (\text{IK2} \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut) • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) : • Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKDP • Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKDP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) : • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu <u>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan atau:</u> 1) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutanjalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan



	laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) <u>Bobot Trayek atau Lintas :</u> 1) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 2) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 3) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5
--	--

No	Trayek/Lintas	Tahun 2022		Bobot Lintas	Bobot Angkutan	Kebutuhan s/d Tahun 2026
		Target	Realisasi			
1	Trayek Angkutan Jalan	6	6	1	30%	10
2	Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	16	18	0,5	70%	24

	(jumlah trayek yang dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi)		(IK1 x bobot angkutan jalan)		Persentase Akhir IK1
IK1	$= \frac{6 \times 1}{10} = 0,6$	X	30%	=	18%

	(jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi)		IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan		Persentase Akhir IK2
IK2	$= \frac{18 \times 0,5}{24} = 0,38$	X	70%	=	26,25%

Rasio Konektivitas = IK1 + IK2 = 18% + 26,25% = 44,25%					
---	--	--	--	--	--

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 target capaian indikator Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 41,33% maka tingkat capaian indikator tersebut adalah 107% sehingga capaian kinerja dalam kategori **kinerja sangat baik**. Tingkat Capaian Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.88
Tingkat Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2022

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Rasio Konektivitas	41,33%	44,25%	107

2. Capaian Indikator Tahun Sebelumnya

Berikut data capaian sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau dengan indikator sarasannya yaitu rasio konektivitas tahun sebelumnya tabel berikut :

No	Trayek/Lintas	Tahun 2021		Bobot Lintas	Bobot Angkutan	Kebutuhan s/d Tahun 2026
		Target	Realisasi			
1	Trayek Angkutan Jalan	6	6	1	30%	10
2	Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	14	14	0,5	70%	24

Dihitung dengan menggunakan rumus rasio konektivitas di atas maka didapatkan rasio sebagaimana pada table berikut:

Tabel 3.89
Data Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2021

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Rasio Konektivitas	38,42%	38,42%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui terdapat peningkatan capaian realisasi atas indikator kinerja rasio konektivitas dari Tahun 2021 ke Tahun 2022. Pada Tahun 2021 realisasi rasio konektivitas sebesar 38,42 %, sehingga tingkat capaian pada tahun 2021 adalah telah sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu mencapai persentase sebesar 100% atau dalam kategori sangat baik.



Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja rasio konektivitas pada tahun 2021 dan tahun 2022 dapat tergambar pada table berikut:

Tabel 3.90
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas
Tahun 2021 dan Tahun 2022

TAHUN	Indikator kinerja	Target (rasio)	Realisasi (rasio)	Tingkat Capaian
2021	Rasio Konektivitas	38,42	38,42	100%
2022	Rasio Konektivitas	41,33	44,25	107%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Daerah dengan Nasional

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan sasaran “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau” dengan indikator kinerjanya “rasio konektivitas” dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Sedangkan pada tingkat Nasional menetapkan indikator kinerja rasio konektivitas nasional (khususnya angkutan darat) pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 22,46%.

Tabel 3.91
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas
Tingkat Nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

TAHUN	Indikator kinerja	Realisasi (rasio)
Nasional	Rasio Konektivitas	22,46
Provinsi Kepulauan Riau	Rasio Konektivitas	44,25
Tingkat Capaian Provinsi dibanding Nasional		197%

4. Permasalahan dan Solusi dalam Pencapaian Target Indikator Kinerja

Di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 telah ditetapkan sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau” dengan indikator kinerjanya “rasio konektivitas”. Berdasarkan RPJMD tersebut sampai dengan



tahun 2026 target rasio konektivitas ditetapkan sebesar 65% pada tahun 2022 telah tercapai 41,33% atau sudah tercapai 63,58% dari target akhir RPJMD

Tabel 3.92
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target akhir RPJMD

No	Indikator kinerja	Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Realisasi	Capaian
1	Rasio Konektivitas	65 %	41,33%	63,58%

Keberhasilan dalam mencapai target indikator yang ditetapkan tidak terlepas dari dukungan program/kegiatan untuk mencapai target tingkat capaian kinerja rasio konektivitas pada tahun anggaran 2022 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Riau. Maka Dinas Perhubungan telah membuat Rencana Kerja Tahun 2022 dengan merencanakan melaksanakan program/kegiatan yaitu:

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatannya:
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Program Pengelolaan Pelayaran, dengan kegiatannya:
 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional
 - Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan; dan
 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional



Keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dibagi atas dua aspek, aspek pertama yaitu kinerja pembangunan yang dinilai melalui pencapaian sasaran strategis dengan capaian sebesar 100%, sedangkan aspek yang kedua yaitu kinerja keuangan yang dinilai dari tingkat penyerapan dana dari jumlah pagu anggaran yang disediakan untuk mencapai indikator kinerja sesuai program dan kegiatan yang ditetapkan adalah sebesar Rp 70.260.061.344,- dengan capaian realisasi keuangan Rp 65.394.916.987,- atau sebesar 93,08%. Realisasi Keuangan ini dibawah target yang ditetapkan dikarenakan pada 31 Desember 2022 terdapat pekerjaan yang belum diajukan pembayarannya sehingga terjadi tunda bayar. Secara rinci capaian realisasi keuangan program dan kegiatan pendukung capaian indikator kinerja rasio konektivitas tahun 2022 sebagaimana tergambar pada table berikut:

Tabel 3.93
Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Pendukung

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1,627,000,406	1,610,878,002	99.01
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1,351,696,406	1,337,412,254	98.94
2	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	137,504,000	136,755,875	99.46
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	68,834,000	68,830,573	99.99
I	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	68,633,069,938	63,784,038,985	92.93
II	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	92,462,500	92,106,760	99.62
2	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Intern	7,720,351,000	7,567,426,713	98.02



3	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	246,591,500	246,362,581	99.91
4	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	60,573,655,938	55,878,142,931	92.25
JUMLAH		70,260,061,344	65,394,916,987	93.08

Keberhasilan dalam mencapai indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 juga tidak lepas dari dukungan sumberdaya manusia yang tersedia sesuai struktur organisasi yang ada. Sebagian besar pegawai dari pimpinan sampai dengan tingkat staff memiliki andil dalam mencapai indikator yang telah ditetapkan antara yaitu Kepala Dinas yang melakukan pembinaan, memberikan arahan, dan melakukan evaluasi terhadap upaya pencapaian indikator. Pada tingkat Kepala Bidang (1 orang) dan Kepala Seksi (3 orang) pada Bidang LLAJ yang dibantu oleh staff-staff yang ada sebagai pelaksana Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan mencapai target penyediaan trayek angkutan jalan.

Pada Program Pengelolaan Pelayaran dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Kepelabuhanan (1 orang Kepala Bidang dan 3 Orang Kepala Seksi) yang bertugas menyediakan prasarana pelabuhan (pelabuhan penyeberangan dan Bidang Angkutan Perairan (1 orang Kepala Bidang dan 3 Orang Kepala Seksi) yang bertugas menyediakan angkutan penyeberangan dan lintas penyeberangannya.

Kedua bidang ini saling berkoordinasi kedalam maupun keluar (Kementerian Perhubungan) yang dibantu oleh staff-staff yang ada telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai target kinerja penyediaan lintas angkutan penyeberangan.

Kinerja sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tersebut telah dapat diukur. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang diuraikan diatas, maka secara rata-rata persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau dalam kategori **sangat baik**.

SASARAN. 11
Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir

Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir merupakan salah satu hal yang penting untuk menunjang perekonomian masyarakat. Salah satu Infrastruktur penting untuk pendukung Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir adalah Infrastruktur Jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan dengan kondisi baik akan memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa antar wilayah. *Jalan kondisi Baik* dapat didefinisikan sebagai jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan. Secara harafiah jalan didefinisikan sebagai jalur di mana masyarakat mempunyai hak untuk melewatinya tanpa diperlukannya izin khusus untuk itu. Jalan merupakan prasarana transportasi yang sangat penting dalam menunjang segala kebutuhan manusia baik itu dalam kegiatan perekonomian dan sosial masyarakat. Pekerjaan terkait infrastruktur jalan merupakan tupoksi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau (Dinas PUPP). Untuk mendukung sasaran strategis dari Provinsi Kepulauan Riau yaitu Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir, Dinas PUPP menetapkan Indikator kinerja sesuai RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026 yaitu Persentase Jalan Kondisi Baik dengan target awal perencanaan 61,75%.

Untuk tahun 2022, target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis adalah 63,25%, setelah dilakukan survey kondisi jalan oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPP, capaian realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 76,55% dengan persentase sebesar 121,03%.



Jalan kondisi Baik merupakan salah satu sasaran yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026. Untuk mencapai sasaran **Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir**, ditetapkanlah indikator kinerja berupa *Persentase Jalan Kondisi baik*. Capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.94
Capaian Kinerja Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir Tahun 2022
(Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2022)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Jalan Kondisi Baik (%)	63,25	76,55	121,03

Untuk menghitung capaian kinerja persentase jalan berkondisi baik tahun 2022 adalah membandingkan kondisi kemantapan ruas jalan berkondisi baik dengan panjang ruas jalan sesuai dengan SK Gubernur Kepulauan Riau No 1863 tahun 2016 dengan Panjang ruas jalan 896,45 Km.

Tabel 3.95
Perhitungan Capaian Kinerja Persentase Jalan Kondisi Baik

Jalan Berkondisi Baik Tahun 2022 (A)	Total Jalan Provinsi Sesuai SK Gubernur Kepulauan Riau (B)	Capaian Kinerja jalan Berkondisi Baik Tahun 2022 (B/A*100)
686,199 KM	896,45 KM	76,55%

Dibandingkan dengan capaian tahun lalu, capaian tahun 2022 ada peningkatan kinerja sebesar 0,17% dari 76,38% ke 76,55% Analisis penyebab keberhasilan kinerja dikarenakan pekerjaan kegiatan pendukung indikator kinerja sebagian besar telah selesai dilaksanakan dengan realisasi 100% sehingga capaian kinerja pun bertambah. Namun untuk target kinerja, adanya perubahan target kinerja dari RPJMD dan Renstra lama (2016-2021) dengan RPJMD dan Renstra baru (2021-2026) dikarenakan adanya penyesuaian dan peralihan dari Renstra lama ke Renstra baru.



Tabel 3.96
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022

No	Indikator Kinerja	Target Sesuai RPJMD dan Renstra (%)	Realisasi (%)	Capaian Realisasi Kinerja %
1	Persentase Jalan Kondisi baik (%)	75,00 (RPJMD dan Renstra Lama Tahun 2021)	76,38%	101,84%
		63,25% (RPJMD dan Renstra Baru Tahun 2022)	76,55%	121,03%

Perbedaan target dari renstra lama ke baru yang targetnya menurun dikarenakan menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan di RPJMD dan Renstra terbaru (2021-2026). Berikut ini merupakan perbandingan realisasi dengan target akhir di RPJMD dan Renstra 2021-2026.

Tabel 3.97
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan kondisi akhir RPJMD (2026)

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	%
1	Persentase Jalan Kondisi Baik (%)	69,25	76,55	110,54

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Target Akhir RPJMD adalah 69,25% sedangkan Realisasi Tahun 2022 adalah 76,55 % sehingga Capaian Kinerja sebesar 110,54 %. Persentase jalan kondisi baik merupakan perbandingan dari jumlah jalan provinsi berkondisi baik dengan panjang jalan provinsi. Analisis terhadap Persentase jalan provinsi berkondisi baik Tahun 2022 dapat digambarkan jumlah jalan provinsi berkondisi baik yakni 686,199 KM dibagi dengan jumlah jalan provinsi yakni 896,45 KM dengan persentase 76,55%.

Hasil analisis jalan provinsi berkondisi baik dengan target sebesar 63,25 % dapat tercapai sebesar 76,55% sehingga capaian kinerja sebesar 121,03% atau dalam kategori **kinerja sangat baik**.

Berikut evaluasi capaian indikator kinerja persentase jalan Provinsi berkondisi baik dari Tahun 2017-2022:

Tabel 3.98
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	Persentase jalan kondisi baik (%)	67,97	67,30	69,73	70,31	71,49	73,64	73,24	74,51	75	76,38	63,25	76,55



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan persentase jalan provinsi kondisi baik dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Pada tahun 2017 realisasi persentase jalan provinsi kondisi baik adalah sebesar 67,30% dimana persentase jalan kondisi baik terus meningkat dari tahun 2017-2022 secara berturut-turut dengan persentase 67,30% (2017), 70,31% (2018), 73,64% (2019), 74,51% (2020), 76,38% (2021) dan 76,55% di (2022)

Dari capaian kinerja tahun 2022 dan tahun sebelumnya, tabel dibawah ini merupakan jalan kondisi baik per kabupaten/kota di Kepulauan Riau.

Tabel 3.99
Perbandingan Kondisi Jalan Baik Kabupaten/Kota
Se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

Panjang Jalan (Km)		Jalan Berkondisi Baik Tahun 2018		Jalan Berkondisi Baik Tahun 2019		Jalan Berkondisi Baik Tahun 2020		Jalan Berkondisi Baik Tahun 2021		Jalan Berkondisi Baik Tahun 2022	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Tanjungpinang	70,23	50,10	71,34	51,56	73,42	52,03	74,09	55,99	79,73	57,46	81,81
Batam	112,35	104,81	93,29	110,63	98,47	116,48	103,68	117,35	104,45	102,85	91,54
Bintan	139,10	129,93	93,41	130,71	93,97	131,17	94,30	132,55	95,29	130,80	94,03
Karimun	143,72	109,03	75,86	112,31	78,15	112,81	78,49	116,96	81,38	116,12	80,80
Lingga	236,72	128,62	54,33	138,35	58,44	138,61	58,55	141,55	59,80	131,66	55,62
Anambas	51,00	25,51	50,02	28,76	56,39	28,76	56,39	29,09	57,04	46,07	90,32
Natuna	143,33	82,26	57,39	87,86	61,30	88,05	61,43	91,19	63,63	101,25	70,64
TOTAL	896,45	603,32	70,31	660,17	73,64	667,91	74,51	684,67	76,38	686,20	76,55

Berdasarkan dari tabel di atas, bahwa kondisi ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Provinsi Kepulauan Riau yang telah diperbaiki, ditingkatkan, dan dibangun melalui APBD Provinsi maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) sepanjang 10,153 km melalui Program penyelenggaraan jalan provinsi. Namun kondisi rusak yang masih harus diperbaiki sepanjang 210.25 km, sehingga masih membutuhkan jumlah anggaran perbaikan yang masih sangat besar. Realisasi kinerja tahun 2022 meningkat dari 2021 dikarenakan kegiatan yang mendukung indikator kinerja tahun 2022 berhasil terlaksana walaupun sempat adanya refofusing anggaran di pertengahan tahun namun tetap berhasil meningkatkan kinerja sehingga melewati target dari yang telah ditetapkan dan kegiatan

yang dijalankan di tahun 2022 telah terlaksana sehingga capaian kinerja tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jalan kondisi baik terpanjang pada tahun 2022 berada di Kabupaten Lingga sepanjang 131,66 km dan yang terpendek berada di Kabupaten Anambas dengan panjang 46,07 km. Jika dilihat lebih lanjut untuk kondisi jalan kondisi baik dari tahun 2018-2022, jalan kondisi baik terpanjang di Tahun 2021 berada di Kabupaten Lingga (141.55 Km), Tahun 2020 berada di Kabupaten Lingga (138.61 km), 2019 berada di Kabupaten Lingga (138.35 km) dan 2018 juga berada di Kabupaten Lingga (603,32 Km) Untuk Kabupaten Lingga, panjang jalan kondisi baik memperlihatkan kecenderungan meningkat pada periode tahun 2018-2022 karena Kabupaten Lingga memang memperoleh alokasi anggaran untuk meningkatkan kondisi jalan pada periode waktu tersebut mengingat Kabupaten Lingga memiliki ruas jalan provinsi yang paling panjang, yang membutuhkan alokasi anggaran setiap tahun untuk meningkatkan panjang jalan kondisi baik.

Untuk menunjang pencapaian kinerja, alokasi anggaran merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Untuk mendukung tercapainya sasaran **Pembangunan antar pulau dan pesisir**, alokasi anggaran yang memadai perlu dianggarkan agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik untuk mencapai sasaran yang dimaksud.



Gambar 3.12 Dokumentasi Peningkatan Jalan Trans Batubi – Kelarik, Natuna (DAK)



Gambar 3.13 Dokumentasi Peningkatan Jalan Kerandin – Belungkur Kabupaten Lingga (DAK)



Gambar 3.14 Pemeliharaan Berkala Jln Toapaya Km. 46 Kab. Bintan (DAK)

Alokasi anggaran untuk mendukung indikator di anggarkan di Program Penyelenggaraan jalan dan kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi pada Tahun Anggaran 2022. Beberapa pekerjaan yang mendukung sasaran yang dimaksud berada pada sub kegiatan pembangunan jalan, pelebaran jalan menambah lajur, pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin jalan dan penanggulangan bencana/tanggap darurat. Berikut adalah program/kegiatan penunjang keberhasilan kinerja yang dilaksanakan di tahun 2022. Sebagian besar pekerjaan yang telah dianggarkan di tahun 2022 telah selesai dikerjakan semuanya dan juga analisis efektifitas dan efisiensi sumber daya.



Tabel 3.100
Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian
Indikator Kinerja Tahun 2022

Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Efisiensi (%)
2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI					
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN					
Peningkatan Jalan Kerandin - Belungkur, Kabupaten Lingga (DAK)	7.568.499.000	7.568.499.000	100,00	100,00	0,00
Pembangunan Jalan Sp. Rantau Panjang, Kabupaten Lingga	1.453.966.596	1.453.966.000	100,00	100,00	0,00
Pembangunan Jalan Sp. Setajam - Serteh, Kabupaten Lingga	1.468.713.000	1.468.162.000	99,96	100,00	0,04
Peningkatan Jalan Trans Batubi - Kelarik, Kab. Natuna (DAK)	9.719.879.000	9.215.709.000	94,81	100,00	5,19
TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN	20.211.057.596	19.706.336.000	97,50	100,00	2,5
SUB KEGIATAN PELEBARAN JALAN MENAMBAH LAJUR					
Peningkatan Jalan Simp. BNI - Underpass, Kota Batam (Lanjutan)	4.000.000.000	3.848.812.000	96,22	100,00	3,78
Peningkatan Jalan Simp. Franky - Simp. BNI, Kota Batam (Lanjutan)	6.000.000.000	5.769.454.000	96,16	100,00	3,84
TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN	10.000.000.000	9.618.266.000	96,18	100,00	3,82
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN					
Pemeliharaan Berkala Jln Toapaya Km. 46, Kab. Bintan (DAK)	10.176.157.000	9.514.204.000	93,50	100,00	6,50
TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN	10.176.157.000	9.514.204.000	93,50	100,00	6,50
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN					
Overlay Jalan Pada Ruas Jalan Sp. Sei Kecil - Sp. Sakera Segmen 1	199.981.314	199.860.000	99,94	100,00	0,60
Overlay Jalan Pada Ruas Jalan Sp. Sei Kecil - Sp. Sakera Segmen 2	199.981.314	199.874.000	99,95	100,00	0,05
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Muka Kuning – Tg Piayu, Kota Batam	150.000.000	149.973.000	99,98	100,00	0,02
TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN	549.962.628	549.707.000	99,95	100,00	0,05
SUB KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA/TANGGAP DARURAT					



Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Efisiensi (%)
2	3	4	5	6	7
Penanggulangan Pasca Bencana di Ruas Jalan Musai - Sp. Kerandin, Kab. Lingga	1.977.691.476	1.977.691.000	100,00	100,00	0,00
TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN	1.977.691.476	1.977.691.000	100,00	100,00	0,00
TOTAL ANGGARAN	42.914.868.700	41.366.204.000	96,39	100,00	3,61

Untuk mencapai sasaran, organisasi membutuhkan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang tersedia tentunya perlu dikelola dengan baik agar sasaran organisasi dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengelolaan sumber daya yang baik dapat dilihat dari besaran efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya terkait. Dari tabel diatas, terlihat efisiensi anggaran sebagian besar pekerjaan tidak sampai lebih dari 10% yang artinya dari anggaran yang diberikan, hampir seluruhnya terealisasi dan terpakai untuk pekerjaan terkait sehingga anggaran yang telah diberikan tidak banyak yang menjadi SILPA dan dari efektivitas pekerjaan, sebagian besar telah selesai dengan tepat waktu sebelum tahun anggaran berakhir. Dari tabel diatas juga, kesimpulan yang dapat diambil secara umum adalah bahwa efektivitas dan efisiensi sumber daya anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 menunjukkan kecenderungan meningkat karena berhasil menambah jalan kondisi baik dari tahun sebelumnya.

Pencapaian target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan karena hal tersebut didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target program kinerja;
2. Adanya upaya – upaya strategis dalam optimalisasi pencapaian kinerja OPD;
3. Melaksanakan perencanaan anggaran untuk menunjang kewenangan OPD sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap jalannya kegiatan;



Berikut ini adalah perbandingan total anggaran pendukung capaian kinerja antara tahun 2021 dan 2022.

Tabel. 3.101
Perbandingan Persentase Penambahan Anggaran Pendukung Kinerja Panjang Jalan Berkondisi Baik Pada Tahun 2021 dan 2022

No	Program	Tahun	Anggaran	Persentase penambahan Anggaran dari tahun sebelumnya
1	Program Penyelenggaraan Jalan	2021	Rp. 56.999.603.533	-21,83%
2	Program Penyelenggaraan Jalan	2022	Rp. 44.556.794.700	

Dari tabel diatas, Persentase penambahan anggaran menurun dikarenakan untuk tahun 2022 pekerjaan pendukung capaian kinerja jalan berkondisi baik tidak sebanyak 2021, namun untuk keseluruhan tidak terlalu mempengaruhi capaian kinerja dikarenakan capaian kinerja di tahun 2022 naik dari tahun 2021.





SASARAN. 12

Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat

Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu nilai budaya dan sikap mental seperti etos kerja, motivasi berprestasi, ulet, dan daya juang dapat menjadi pendorong produktivitas dan kemajuan bangsa. Nilai budaya dan mentalitas menjadi penentu untuk mencapai kemajuan dalam suatu proses pembangunan. Sejumlah negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Taiwan mampu melakukan akselerasi pembangunan sosial-ekonomi berbasis kebudayaan, dengan melakukan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui proses modernisasi. Menyadari begitu strategisnya peran kebudayaan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan. Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkuat jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Untuk mendukung pemajuan kebudayaan diperlukan data dan informasi yang memadai agar pemajuan kebudayaan tepat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingatnya pentingnya data dan informasi dalam pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pusat Statistik memiliki inisiatif menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun dengan mengacu pada konsep Culture Development Indicators (CDIs) UNESCO. CDIs UNESCO memiliki serangkaian dimensi dan indikator yang menyoroti tentang kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membantu individu dan



masyarakat untuk memperluas pilihan hidup, dan beradaptasi pada perubahan. Adapun Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Berdasarkan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2022, pembangunan kebudayaan kepulauan Riau cukup baik, namun masih perlu terus ditingkatkan. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan pada di provinsi Kepulauan riau dengan rentang nilai 0 – 100 sebesar 52,12 sedangkan untuk indeks pembangunan tingkat nasional 51,12. Adapun nilai untuk setiap dimensi sebagai berikut: dimensi ekonomi budaya (14,64), dimensi pendidikan (73,61), dimensi ketahanan sosial budaya (73,53), dimensi warisan budaya (37,81), dimensi ekspresi budaya (22,74), dimensi budaya literasi (66,78), dan dimensi kesetaraan gender (56,53). Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2021 Dimensi ketahanan sosial budaya memiliki nilai paling tinggi, sementara dimensi ekonomi budaya memiliki nilai paling rendah dibandingkan dengan dimensi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kepulauan Riau dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya pada kehidupan sosial cukup baik. Namun kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan ekonomi masih perlu terus ditingkatkan. diharapkan pembangunan kebudayaan dapat semakin terarah dan berkualitas. Publikasi Indeks Pembangunan Kebudayaan ini akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan yang knowledge-based, agar perumusan kebijakan pembangunan kebudayaan dapat lebih presisi sesuai kondisi masing-masing daerah. Selain itu Indeks Pembangunan Kebudayaan juga dapat dimanfaatkan oleh para akademisi dan peminat kajian kebudayaan untuk memperkaya data dan informasi terkait kebudayaan.



Capaian kinerja Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya, Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.102
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,90	52,12	82,86

Dari tabel diatas Capaian IPK provinsi kepulauan riau sebesar 52,12 sedangkan target yang di tetapkan sebesar 62,90 sebagaimana yang tersaji pada tabel diatas . Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan di provinsi kepulauan riau masih membutuhkan usaha dan kerja keras dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat guna mencapai hasil yang optimal

Hasil Analisis indeks pembangunan kebudayaan dengan target sebesar 62,90% hanya dapat tercapai sebesar 52,12% sehingga capaian kinerja sebesar 82,86% atau dalam kategori **baik**

Tahun	Nasional	KEPULAUAN RIAU RPJMD
2018	53.74	58.83
2019	55.91	60.90
2020	54.65	59.24
2021	51.90	52.12

Sumber data IPK direktorat kebudayaan ,bapennas ,Bps nasional

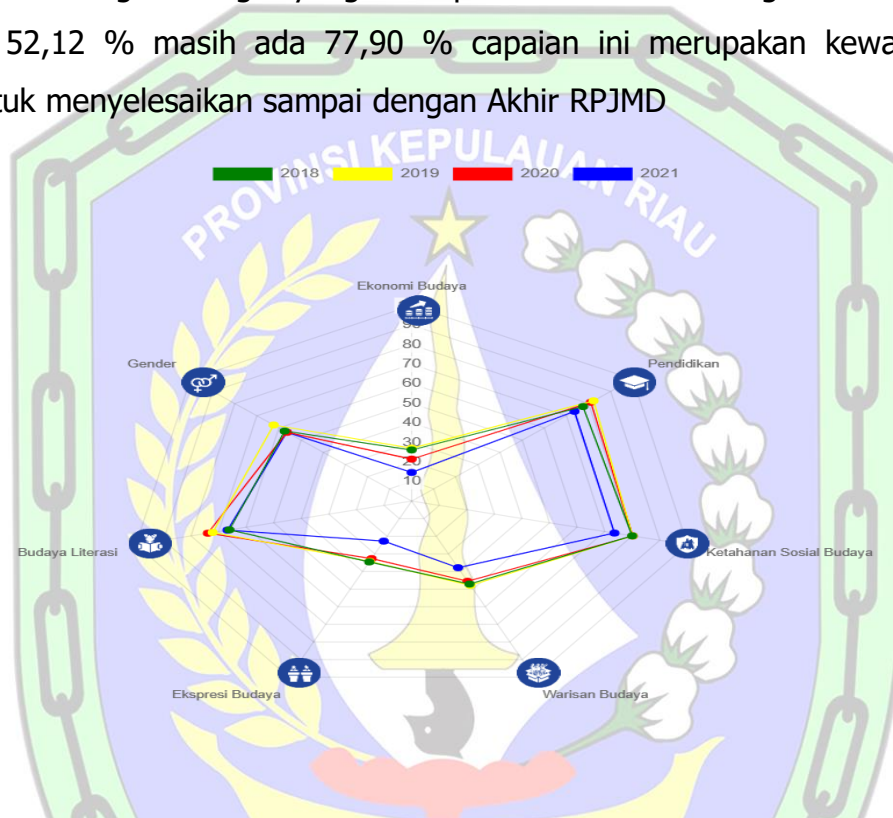
Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2021 s/d 2022:

Tabel 3.103
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Target akhir RPJMD	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
1	Indeks pembangunan kebudayaan	59,24	62,90	52,12	82,86	66,90	77,90

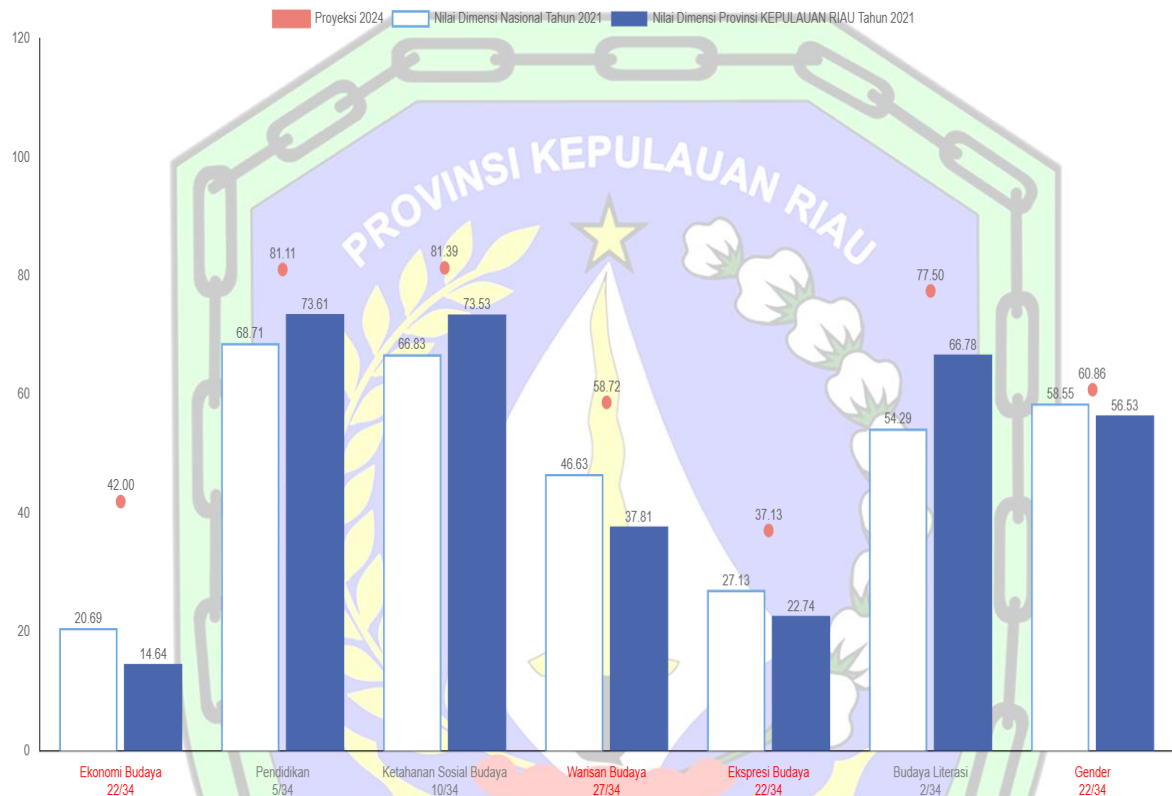


Jika dilihat dari table diatas Skor IPK Provinsi : 52,12 • Di atas skor IPK Nasional (51,90) • Peringkat 16 dari 34 Provinsi Capaian IPK 2021 Provinsi Kepulauan Riau: 59,24 (ada penurunan sebesar 7,12 poin) Dimensi dengan skor tertinggi ada pada Dimensi Pendidikan, sedangkan yang terendah adalah Dimensi Ekonomi Budaya.
pada Tahun 2022 Target akhir RPJMD yang ditetapkan oleh dinas kebudayaan sebesar 66,90%, jika kita bandingkan target yang ditetapkan tahun 2022 dengan realisasi capaian hanya sebesar 52,12 % masih ada 77,90 % capaian ini merupakan kewajiban dinas kebudayaan untuk menyelesaikan sampai dengan Akhir RPJMD



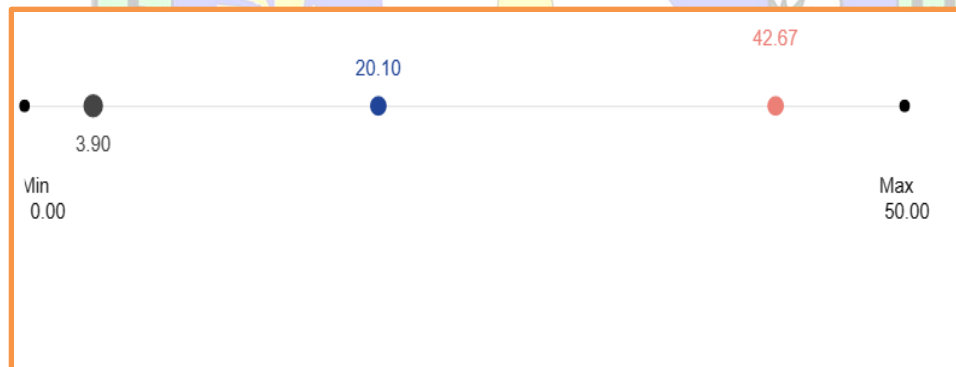
Dimensi		Nilai indeks	
		Nasional	Kepulauan Riau
Ekonomi Budaya		20,69	14,64
Pendidikan		68,71	73,61
Ketahanan Sosial Budaya		66,83	73,53
Warisan Budaya		46,63	37,81
Ekspresi budaya		27,13	22,74
Budaya Literasi		54,29	66,78
Gender	58,55	56,55	
Total		51,90	52,12

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 6 Lima dimensi yang memiliki nilai indeks di atas angka nasional adalah dimensi pendidikan, pada posisi ke-3, dimensi ketahanan sosial budaya pada posisi ke-4, dimensi budaya literasi . 4 dimensi lainnya berada di bawah angka nasional, yaitu : dimensi ekonomi budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya dan dimensi gender



➤ Analisis IPK 2022 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Ekonomi Budaya

Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan, terhadap masyarakat 15 tahun ke atas (persen)

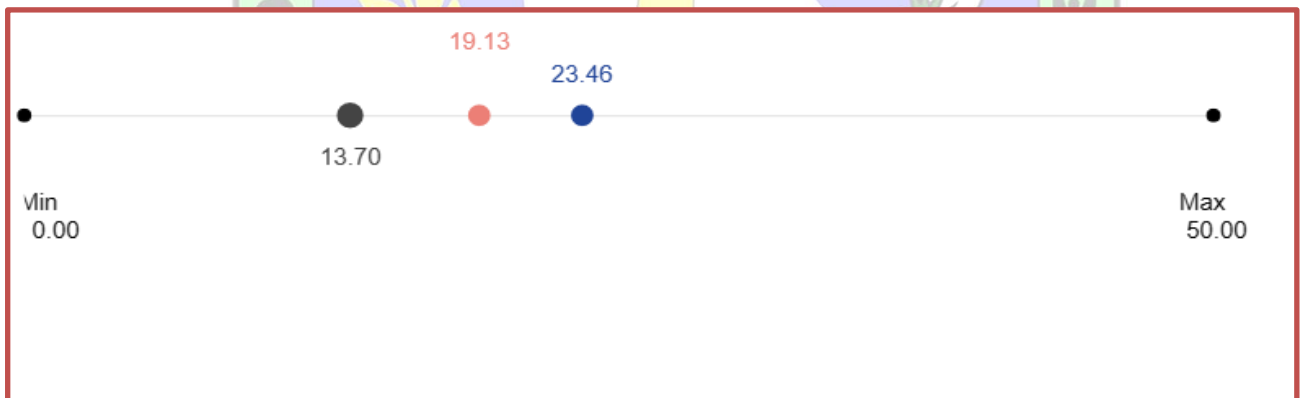


Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

BERPANCANG AMANAH BERSAUH MARWAH

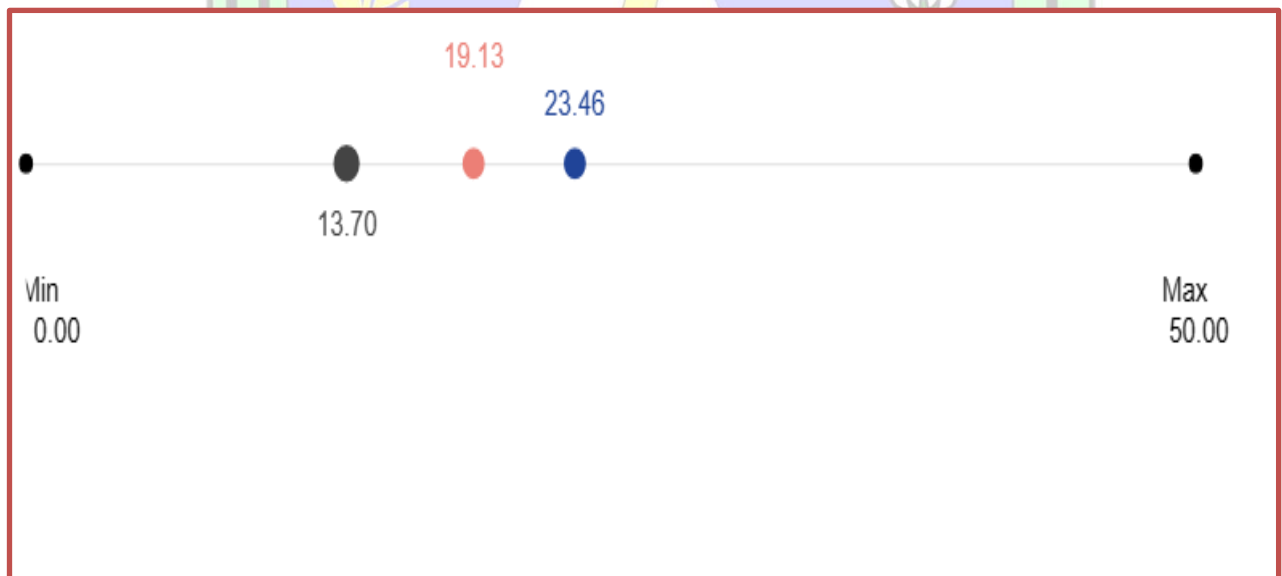
➤ **Analisis IPK 2022 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Warisan Budaya**

- ✚ Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

- ✚ Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi

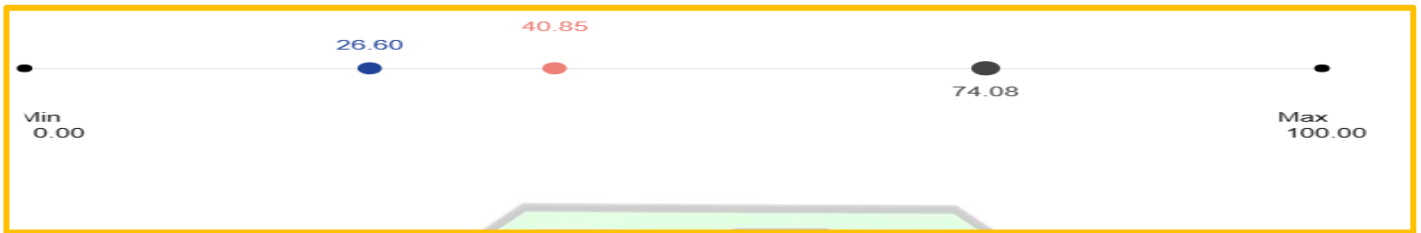


Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

BERPANCANG AMANAH BERSAUH MARWAH

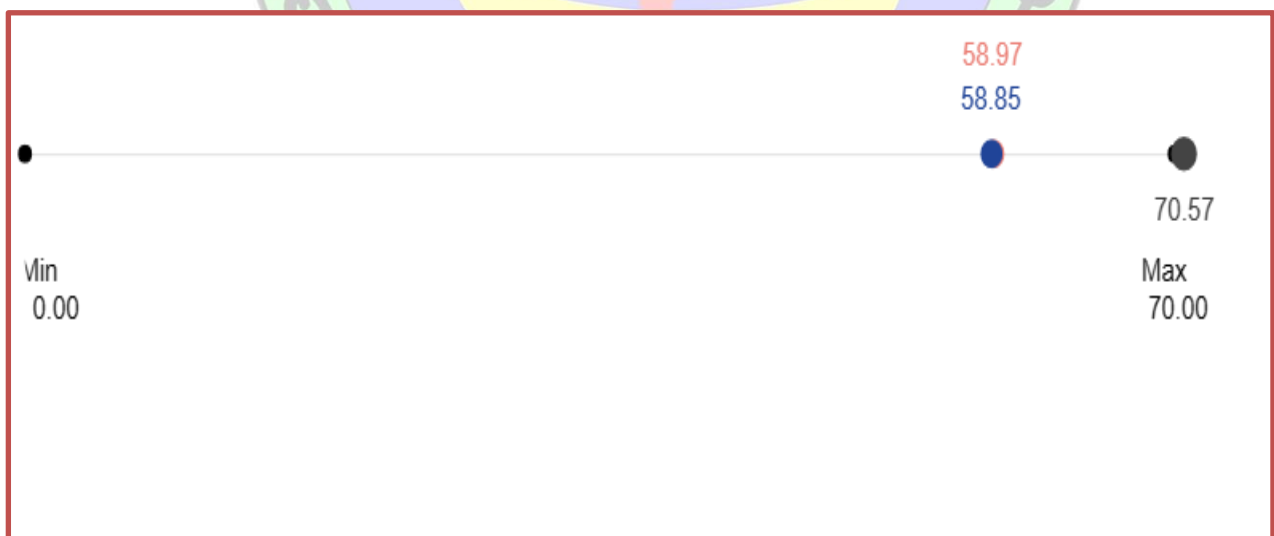


- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari



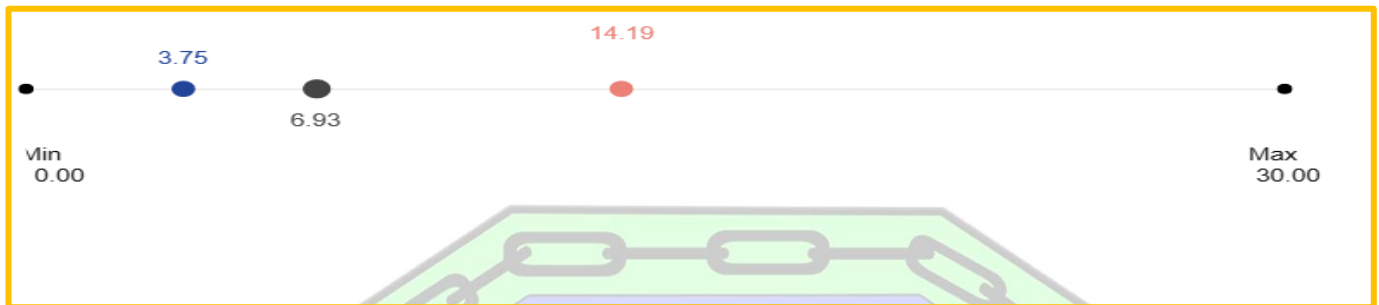
Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni



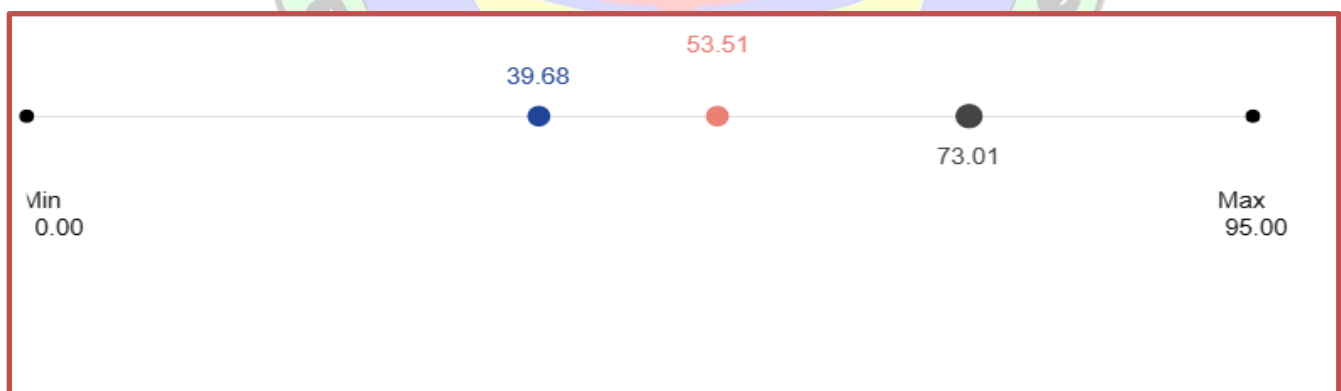
Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

- ✚ Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/wardun



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

- ✚ Persentase masyarakat yang menggunakan produk tradisional

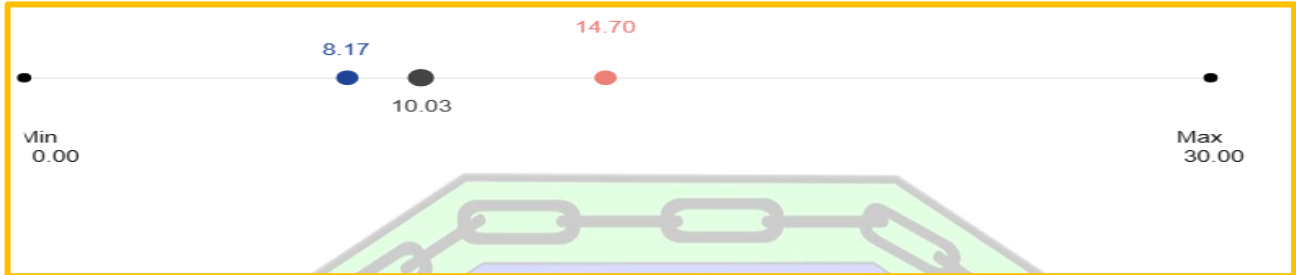


Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri



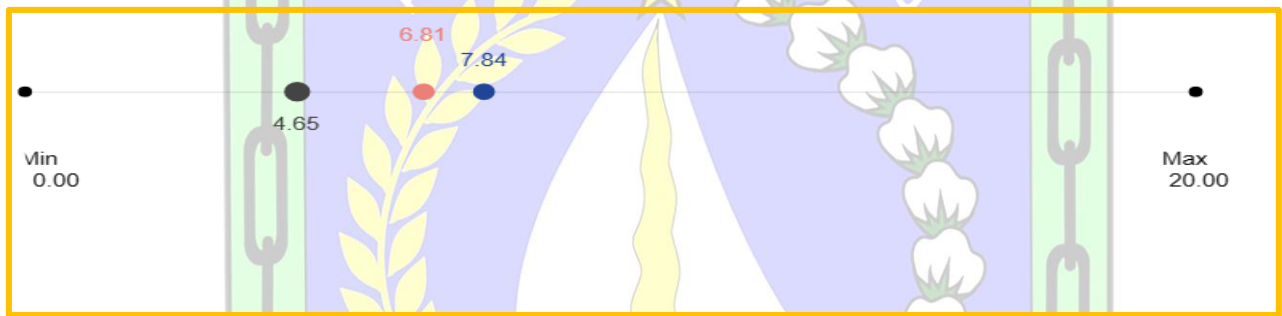
➤ **Analisis IPK 2022 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Ekpresi Budaya**

- ✚ Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir



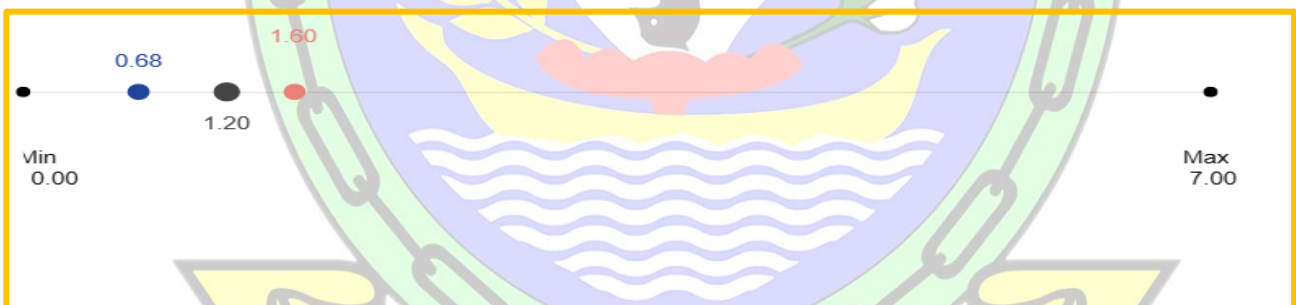
Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

- ✚ Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

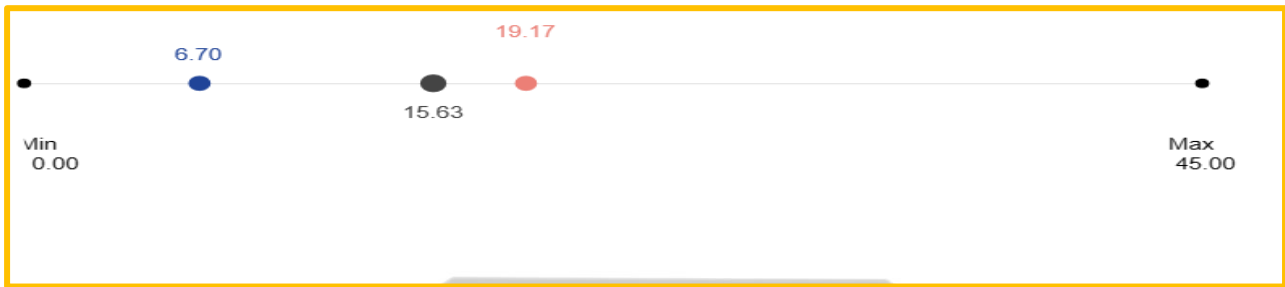
- ✚ Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri



✚ Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Analisis terhadap penyebab keberhasilan/kegagalan yang dapat dilihat dalam pencapaian indeks pembangunan Kebudayaan sebagai berikut :
 - a. Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Kualitas Budaya
 - b. Adanya perangkat regulasi yang cukup memadai
 - c. Adanya Program-Program terkait Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan
 - d. Adanya dukungan anggaran yang memadai dalam pembangunan kebudayaan
 - e. Peran serta aktif masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya , contohnya antusiasme dan partisipasi masyarakat (masyarakat umum dan dari sekolah) yang tinggi dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
 - f. Adanya dukungan dari stakeholder kebudayaan yang lain dalam pelaksanaan program kegiatan, seperti Berhasilnya sinergi antara Dinas Kebudayaan dengan lembaga terkait seperti instansi vertikal Kebudayaan (BPNB), lembaga non pemerintahan/LSM dan komunitas/penggiat kebudayaan dan seni serta masyarakat umum dalam upaya penyadaran pelestarian, hingga pengembangan kebudayaan dan seni.
 - g. Peran aktif guru dan siswa SD dan SMP yang melestarikan seni budaya di Provinsi Kepulauan Riau .
 - h. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.

Keberhasilan ini diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Guna memperbaiki proses dan kualitas pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dirumuskan rencana tindak lanjut atau pun solusi Dengan peningkatan pelayanan dan pengawasan yang sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM aparatur Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya



hambatan pelaksanaan tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan daerah dan sejenisnya yang pada akhirnya akan menurunkan citra pemerintah daerah di mata masyarakat.

➤ **AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 17.335.070.424 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 8.132.734.800 dan Belanja Langsung Rp 9.202.335.624. Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp 17.040.930.929,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 9.839.975.575,00 dan Belanja Langsung Rp 7.200.955.354,00.

1.3.1 Target Belanja Dinas Kebudayaan

Tabel 3.104
Target Belanja Dinas Kebudayaan APBD Perubahan Tahun 2022

Uraian	Target	Persentase
Belanja Tidak Langsung	Rp. 9.839.975.575,00	57,74
Belanja Langsung	Rp 7.200.955.354,00	42,26
Total	Rp.17.040.930.929	100

1.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2022 Dinas Kebudayaan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.105
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Rp.2.163.487.714	100	Semua belanja langsung dalam rangka mewujudkan satu sasaran



2	Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu"	Rp.3.968.980.528	100	Semua belanja langsung dalam rangka mewujudkan satu sasaran
---	--	------------------	-----	---

Tabel 3.106
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran strategis	kinerja				Anggaran			Ket
		indikator	target	realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% efesiensi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Indeks Pembangunan kebudayaan	62,90	52,12	82,86	5.539.892.396	5.285.593.019	95,41	efisien
2	Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu								

Pada tabel ini dapat dilihat bahwa indikator indeks Pembangunan kebudayaan yang telah ditetapkan target nya sebesar 62,90 hanya tercapai sebesar 52,12 % ini dapat dilihat dari dimensi ekonomi budaya yang masih cenderung rendah yang menandakan bahwa masih cukup rendahnya aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kebudayaan di provinsi kepulauan Riau dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya pada kehidupan sosial cukup baik. Namun kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan ekonomi masih perlu terus ditingkatkan. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ini terkait Penyerapan anggaran belanja langsung dalam pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 sebesar 95,41 % (Rp 5.285.593.019) dari total anggaran (Rp 5.539.892.396) terdapat 5 program 7 kegiatan 12 sub kegiatan yang mendukung indikator indeks pembangunan kebudayaan, pada Program Pengembangan Kesenian Tradisional yang merupakan program pendukung dimensi ekonomi budaya masih perlu di tingkatkan

karena untuk ekonomi budaya masih cenderung rendah , Solusi untuk kedepan dalam peningkatan dimensi ekonomi budaya yaitu komitmen dari kepala daerah untuk menyediakan Pendanaan melalui dana APBD untuk bidang kebudayaan yang lebih optimal dan Mengoptimalkan pemanfaatan sosial media, sebaga sarana promosi kegiatan event budaya dan juga sebagai media pertunjukan secara daring, dengan pengemasan yang lebih inovatif. ditetapkan setiap tahun nya oleh Dinas Kebudayaan sehingga akan lebih mudah dalam pencapaian indicator setiap tahunnya

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi.

➤ **REALISASI ANGGARAN**

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu. maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran. maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2022 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang **sangat tinggi**. Hal ini bisa dilihat bahwa dari 12 sasaran mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum. pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Berikut Capaian kinerja dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang di alokasi untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.



LAPORAN KINERJA INSTANSI 2022

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA				ANGGARAN			
		Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% EFISIENSI	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Percepatan Pemulihan dan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,8 – 5,6 %	5,09 %	106 %	81.299.340	60.690.180	74.65%	Efisien
		Pendapatan Per Kapita	80,07 Juta Rupiah	87,24 Juta Rupiah	109 %	81.299.340	60.690.180	74.65%	Efisien
		Indeks Gini	0,332 indeks	0,325 indeks	102 %	81.299.340	60.690.180	74.65%	Efisien
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Pengangguran	10,10 %	8,23 %	118,51 %	5,247,503,800	5,096,582,817	97,12%	Efisien
		Angka Kemiskinan	6,01 %	6,03 %	99,67 %	5.643.752.928	5.596.350.933	99,16 %	Efisien
3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69,73 indeks	74,13 indeks	106,31 %	300,000,000	270,563,068	90.38%	Efisien
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	69,77 indeks	69,77 %	100 %	745,961,500	692,491,646	92,83%	Efisien
5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	76,7 indeks	76,46 indeks	99 %	344,810,898,781	333,046,631,632	96,59 %	Efisien
6	Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100 %	84,54 %	84,54 %	343,849,050,681	332,123,887,540	96.59%	Efisien
7	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,20 indeks	93,49 indeks	100,31 %	5.100.555.850,00	4.997.668.654,00	97,98	Efisien
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	15,80 %	15,40 %	102,6 %	1,888,809,330	1,799,010,558	95,25%	Efisien
9	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi	95,5 Rasio	96,32 Rasio	101 %	10,835,506,518	10,648,575,853,9	98,3%	Efisien
		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	145,27 Ha	147,24 Ha	92,20 %	1,372,943,274	1,292,304,000	94.13%	Efisien
10	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio Konektivitas	41,33 Rasio	44,25 Rasio	107 Rasio	70,260,061,344	65,394,916,987	93.08%	Efisien
11	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Presentase Jalan Kondisi Baik	63,25 %	76,55 %	121,03 %	42,914,868,700	41,366,204,000	96.39%	Efisien
12	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,9 Indeks	52,12	82,86	5,539,892,396	5,285,593,019	95.41%	Efisien





BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, memuat pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 yang penyusunannya berdasarkan perjanjian kinerja perubahan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2022 namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun dan kontribusinya terhadap pencapaian RPJMD, Secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai, meskipun capaian tersebut mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19 yang melanda secara global termasuk di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Secara umum, nampak kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari 16 indikator sejumlah 10 indikator memenuhi kriteria sangat baik, 6 indikator berkriteria baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dari PK/IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2022, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Provinsi Kepulauan Riau, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya, sebagai berikut :

1. Aspek Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan upaya gambaran dan hasil analisis kondisi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, aspek kesejahteraan sosial, penurunan angka kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat seperti bantuan ekonomi produktif bagi fakir miskin, serta aspek seni budaya dan olah raga.

2. Aspek Pelayanan Umum

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat sehingga pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa faktor strategis pendukung perwujudan pemerintah yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance) adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan kesetaraan. Faktor-faktor tersebut menjadi hal penting dalam menciptakan iklim birokrasi yang sehat.

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lebih meningkatkan pelayanan dasar kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, dengan meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan pada daerah yang belum terjangkau layanan kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, dan pelabuhan sebagai sarana prasarana perekonomian rakyat, peningkatan pemenuhan ketersediaan air bersih, listrik dan pelayanan sanitasi.

Mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan peningkatan sarana belajar mengajar yang memadai dan merata di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan Mengupayakan peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata ditengah pandemi covid-19 ini dengan menerapkan CHSE penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada Cleanliness (kebersihan), Health (kesehatan), Safety (keamanan), dan Environment Sustainability (kelestarian lingkungan), meningkatkan mutu calon tenaga kerja dalam menghadapi peluang usaha yang tersedia dengan didukung program pemberdayaan masyarakat, pengembangan produktifitas pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

Selain aspek tersebut diatas, agar tetap memperhatikan aspek penting lainnya antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan.
2. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas perencanaan SKPD dengan merumuskan sasaran strategis dan indikator kinerja yang menunjukan hasil (outcome).

Akhirnya segenap aparat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja masa yang akan datang.



Lampiran I : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

**Hasil Pengukuran Kinerja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	- Pertumbuhan Ekonomi	4,8-5,6 %	5,09 %	106 %	Sangat Baik
		- Pendapatan Per Kapita	80,07 Juta Rupiah	87,24 Juta Rupiah	109 %	Sangat Baik
		- Indeks Gini	0,332 indeks	0,325 indeks	102 %	Sangat Baik
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	- Angka Pengangguran	10,10 %	8,23 %	118,51 %	Sangat Baik
		- Angka Kemiskinan	6,01 %	6,03 %	99,67 %	Baik
3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69,73 indeks	74,13 indeks	106,31%	Sangat Baik
4	Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	69,77 indeks	69,77	100%	Baik
5	Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	76,7 indeks	76,46 indeks	99 %	Baik
6	Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100 %	84,54 %	84,54 %	Baik
7	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,20 Indeks	93,49 Indeks	100,31 %	Sangat Baik
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	15,80 %	15,40 %	102,6 %	Sangat Baik
9	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	- Rasio Elektrifikasi	95,5 Rasio	96,32 Rasio	101 %	Sangat Baik
		- Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	145,27 Ha	147,24 Ha	92,20 %	Baik
10	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio Konektivitas	41,33 Rasio	44,25 Rasio	107 Rasio	Sangat Baik
11	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Persentase Jalan Kondisi Baik	63,25 %	76,55 %	121,03 %	Sangat Baik
12	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,9 Indeks	52,12 Indeks	82,86 Indeks	Baik





Lampiran II : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

**DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022**

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
2. Indikator Utama Kesempatan Kerja Terbaik
3. Penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak Tahun 2022 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
4. Penghargaan atas keberhasilan sebagai Provinsi menuju nol kasus Penyakit Kuku dan Mulut dari Kementerian Pertanian RI
5. Penghargaan Top Pembina BUMD Tahun 2022 dari Top BUMD 2022
6. Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari Kementerian PAN RB RI
8. Penghargaan Sahabat Pers Indonesia Tahun 2022 dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
9. Penghargaan atas Partisipasi dalam Intermediate Training (LK) II Tingkat Nasional Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tanjungpinang-Bintan Tahun 2022
10. Penghargaan peringkat 2 dalam Penilaian Kompetensi Pegawai BKN Award Tahun 2022 dari BKN RI
11. Penghargaan peringkat 3 atas Capaian dalam Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja BKN Award tahun 2022 dari BKN RI
12. Penghargaan atas Penyelenggaraan Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022 dari Kementerian Dalam Negeri RI
13. Penghargaan Dewan Kehormatan PW IK PMII Provinsi Kepulauan Riau Periode 2022-2027 dari IKKA-PMII
14. Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI
15. Penghargaan Anugerah Meritokrasi Tahun 2022 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
16. Penghargaan Anugerah Media Humas 2022 dari Kementerian Kominfo RI
17. Penghargaan Kategori Pemprov Indonesia Melayani pada ARM 2022



18. Penghargaan BI Award 2022 dari Bank Indonesia (BI)
19. Penghargaan sebagai Peserta Terbaik ke – 1 dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan Insiden Keamanan Siber pada CSIRT Pemerintah Daerah yang Teregistrasi
20. Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022
21. Anugerah Media Humas 2022
22. Penghargaan Atas Prestasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dengan Predikat Nilai B
23. Penghargaan Auntabiliitas Kinerja Dengan Predikat Nilai "BB"
24. Penghargaan Peringkat II OPD yang Membidangi Sub-Urusan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Terbaik kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

